



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2021, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil dan capaian atas pelaksanaan program/kegiatan jajaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Pontianak, 27 Januari 2022

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat



Imik Eko Putro

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. LAKIN ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021. LAKIN adalah juga sebagai perwujudan akuntabilitas salah satu alat ukur dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai diharapkan dapat mengungkapkan secara memadai (*disclosure*) hasil analisis terhadap pengukuran capaian kinerja Kanwil dari kinerja Kanwil selama tahun 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, sebagai salah satu Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak menyusun rencana strategis tahun 2020-2024. Rencana strategis Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024, visi DJPb adalah "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan: "Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan". Dan dalam rangka melaksanakan visinya, DJPb memiliki misi yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Pada tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang tertuang dalam Peta Strategis Kanwil, yang kemudian dituangkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU Kanwil yang tertuang dalam Nilai Kinerja

Organisasi (NKO) Kanwil tahun 2021 adalah 109.06. Capaian ini diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) dan telah mencapai realisasi di atas target yang ditentukan. Adapun capaian Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2021 menurut sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengelola Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif mencapai 110.13%
2. Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien mencapai 101.62%
3. Sasaran Strategis Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mencapai 100.00%
4. Sasaran Strategis Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan mencapai 107.25%
5. Sasaran Strategis Pengelolaan kas yang optimal 120,00%
6. Sasaran Strategis Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien mencapai 107.75%
7. Sasaran Strategis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu mencapai 105.59%
8. Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi mencapai 112.12%
9. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel mencapai 106.40%
10. Sasaran Strategis Sistem informasi dan teknologi yang andal mencapai 120.00%

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan selama tahun 2021, antara lain meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 dengan Kategori Kanwil Besar, Peringkat Pertama atas Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2020 dan Peringkat ketiga Penilaian Laporan RPA Semester I Tahun 2021 Kategori Kanwil Sedang, Peringkat Kedua atas Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 Kategori Kanwil Sedang, dan Peringkat Ketiga atas Laporan Analisis Penyaluran Pembiayaan UMi Terbaik Tahun 2021.

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi atas manajemen dan pelayanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai akan terus ditingkatkan sehingga dapat mengantarkan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk kinerja yang belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, selanjutnya dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja sebagaimana diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG.....	2
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
Tugas	3
Fungsi	3
Struktur Organisasi	4
PERAN STRATEGIS	6
SISTEMATIKA LAPORAN	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS.....	10
PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA	12
Perjanjian Kinerja.....	12
Refinement Kontrak Kinerja.....	18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021	21
REALISASI ANGGARAN	100
KINERJA LAIN-LAIN	104

BAB IV PENUTUP

PENUTUP	111
---------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

C. Peran Strategis

D. Sistematika Laporan



LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan unit instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sebelumnya merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Anggaran. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Anggaran Pontianak secara resmi berdiri sejak tanggal 12 Juni 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.645/KMK.01/1989 dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sejalan dengan adanya reorganisasi pada Departemen Keuangan maka seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran berganti nama menjadi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ditandai dengan adanya pelantikan eselon II Kanwil XVI DJPb Pontianak pada bulan Oktober 2004. Pada bulan Juli 2010 terdapat perubahan nomenklatur dimana Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.01/2008 berubah menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 disusun sebagai suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu satu tahun dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021. Laporan kinerja juga memuat gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi:

- a. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
- c. Penyusunan reuviu belanja pemerintah (spending review) dan reuviu pelaksanaan anggaran;
- d. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
- f. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- i. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
- j. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- k. Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah;
- l. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
- m. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
- n. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
- o. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- p. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- q. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- r. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
- s. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:

Struktur Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat



1. Bagian Umum

Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.

2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melaksanakan penyusunan reviu atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.

3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional (KFR), analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah.

4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

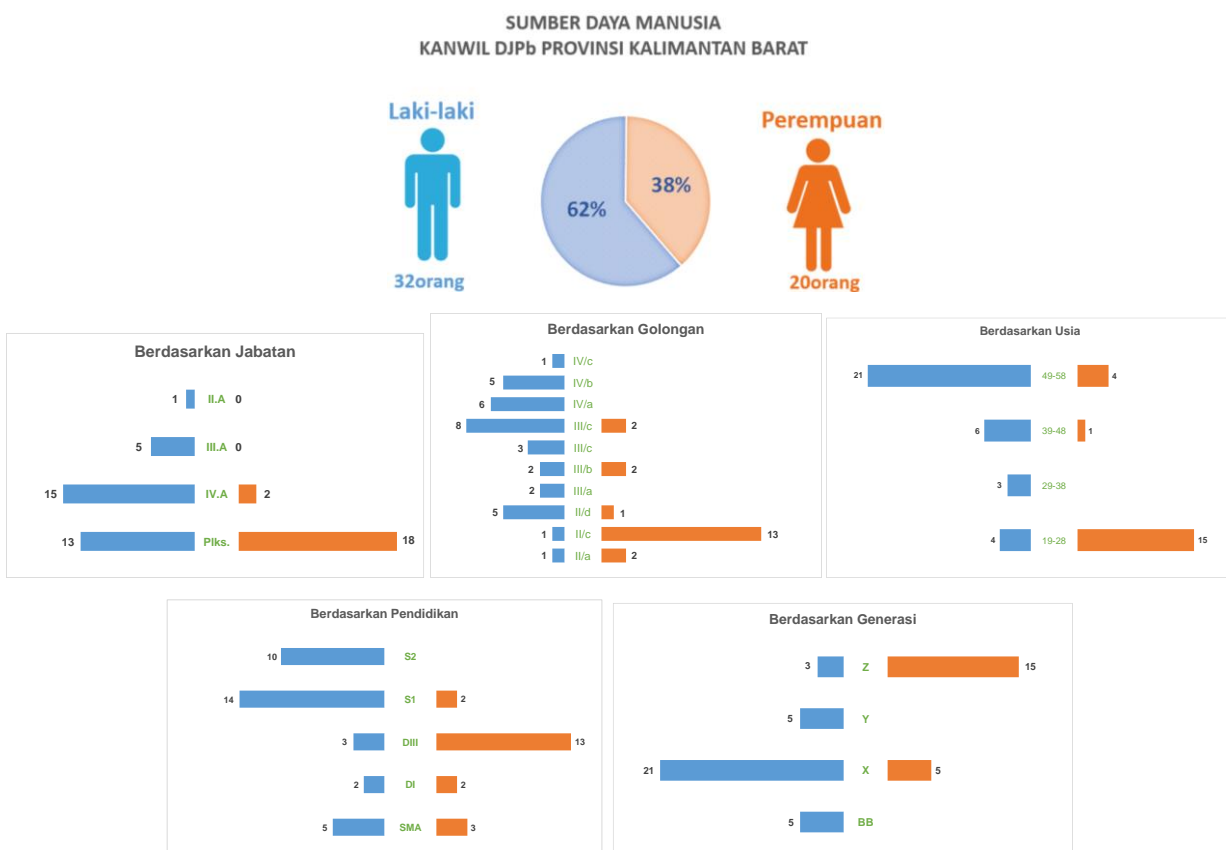
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melaksanakan penyusunan statistic keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistics* (GFS), serta melaksanakan analisis atas laporan keuangan.

5. Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan Internal

Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervise, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan koordinasi mutu layanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan pertanggungjawaban bendahara dan pengelola rekening pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi serta professional. Posisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2021 menurut posisi jabatan, gender, pendidikan, dan kelompok umur adalah sebagai berikut:



PERAN STRATEGIS

Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi yang strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setidaknya karena tiga alasan di bawah ini:

1. Merupakan wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi Kuasa BUN di Daerah;
2. Merupakan satu-satunya wakil Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal sehingga seluruh data, informasi dan pelaporan fiskal regional menjadi kekuatan untuk Ditjen Perbendaharaan.
3. Merupakan ujung tombak Pelayanan Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dengan demikian, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan berdampak langsung pada citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peran strategis tersebut diatas semakin memiliki dampak dengan penyebaran pandemi Covid-19 di tahun 2020. Disaat kinerja perekonomian secara umum turun, APBN diharapkan mampu menahan gejolak perekonomian. Kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan penyerapan anggaran. Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat harus senantiasa berorientasi dan berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan tuntutan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku. Keberhasilan mengemban amanat ini, disadari sangat dipengaruhi oleh tiga komponen dominan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu SDM yang berkualitas yang ditopang oleh *Standard Operating Procedure (SOP)* dan senantiasa mengantisipasi perkembangan yang terjadi serta tersedianya dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengambil peran dalam mewujudkan Nawacita, antara lain:

1. Sejalan dengan Nawacita ke 3, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam mensukseskan program pembangunan kawasan pedesaan melalui pembinaan dan koordinasi penyaluran Dana Desa serta penguatan tata kelola pemerintah daerah.
2. Sejalan dengan Nawacita ke 7, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam penguatan sektor keuangan dan kapasitas fiskal pemerintah melalui penyempurnaan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR), implementasi *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* dalam pengelolaan dana APBN melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan spending review.
3. Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat secara aktif bertugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, khususnya alokasi anggaran untuk program-program prioritas yg mendukung pencapaian Nawacita.

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, fungsi-fungsi treasury dapat berkembang untuk mengikuti tuntutan stakeholders. Konsep keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi.

SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan hal umum tentang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistematika Laporan

BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi:

- A. Rencana strategis yang menyajikan informasi visi, misi, dan tujuan strategis tahun 2020-2024 dan target kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis unit tahun 2020-2024.
- B. Penetapan/perjanjian kinerja yang memuat informasi perjanjian kinerja tahun 2021 yang memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU, target kinerja, dan pendanaan. Juga dijelaskan perubahan IKU yang ditetapkan pada kontrak tahun 2021 dari tahun-tahun sebelumnya (refinement IKU). Serta penjelasan umum atas penyebab perbedaan target kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2021 dan Renstra tahun 2020-2024.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan:

- A. Capaian Kinerja Organisasi memuat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai kinerja untuk setiap perspektif, tabel menyeluruh atas NKO, serta penjelasan setiap sasaran strategis yang meliputi definisi, capaian IKU, dan penjelasannya.
- B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja. Uraian ini berisi perbandingan pagu dan realisasi per jenis belanja beberapa tahun terakhir, perbandingan pagu dan realisasi belanja tahun 2020 per kegiatan/output, dan analisis atas efisiensi penggunaan keuangan yang terkuantifikasi dan dapat dijelaskan.
- C. Kinerja Lainnya
Kinerja lainnya berisi informasi capaian kinerja lainnya yang dicapai pada tahun 2021. Kinerja lainnya dapat diklasifikasikan yaitu inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2021 lainnya

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021.

Lampiran :

Lampiran LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 meliputi Perjanjian kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 serta dokumen lainnya seperti Form IIAA dan Laporan Realisasi Anggaran.

BAB II

PERENCANAN KINERJA



A. Rencana Strategis

B. Penetapan/Perjanjan Kinerja



RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, sebagai salah satu Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak menyusun rencana strategis tahun 2020-2024. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. visi DJPb adalah

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan: “Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Dan dalam rangka melaksanakan visinya, DJPb memiliki misi yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, DJPb menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kas negara yang pruden dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*;
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan DJPb, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang jelas dan terukur dalam pencapaian indikator kinerja yang ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut:

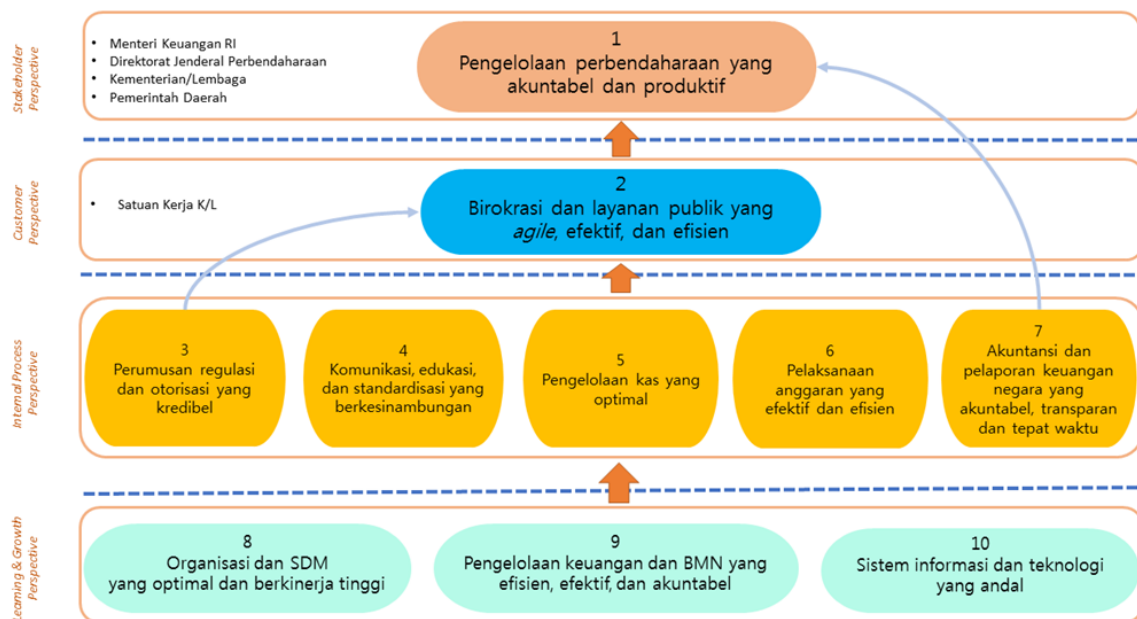
Tabel 2.1
Target Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	UIC
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94	PAPK
		Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82	PPA II
		Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91	PPA I; PPA II
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4.64	PPA I; Bagian Umum
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100	PPA I
4	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	87.5	PPA I; PAPK; SKKI
		Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8.5	SKKI
		Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100	SKKI
5	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan Kas Kanwil	82	PPA I
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	PPA I
		Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	PPA II
7	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1	PAPK
		Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79	PAPK
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84	Bagian Umum
		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	SKKI
		Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78	Bagian Umum dan semua Bidang
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95.5	Bagian Umum
		Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	82	Bagian Umum
		Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100	Bagian Umum
10	Sistem informasi dan teknologi yang andal	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80	SKKI; Bagian Umum

PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 10 Sasaran Strategis (SS) dan dijabarkan dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi Kanwil DJPb Tahun 2021 sebagaimana tergambar dalam Peta Strategi sebagai berikut:



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

- Stakeholder Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
- Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.
- Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

d. Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Sepuluh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Stakeholders perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu

1. Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia. Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien.

b. Customer perspective

1. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

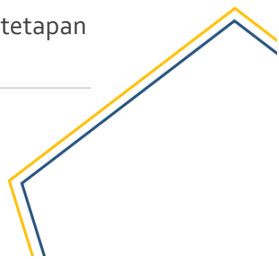
Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminisitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

c. Internal Process Perspective

1. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan



yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak saling bertentangan.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan.

2. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

3. Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi *idle cash* secara pruden.

Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah.

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

4. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

5. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.



Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

d. Learning and Growth Perspective

1. Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

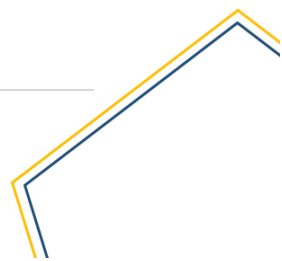
Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

2. Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi

3. Sistem Informasi dan teknologi yang andal

Sistem Informasi dan teknologi yang andal adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (*resources*) keuangan menjadi hasil keluaran (*output*) *real time* data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.



Pada tahun 2021, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing ditargetkan pada Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2021.

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Tahun 2021

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif		
	1a-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94
	1b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
	1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91
<i>Customer Perspective</i>			
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien		
	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,64 (skala 5)
<i>Internal Process Perspective</i>			
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel		
	3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
4	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan		
	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.5
	4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervise Kanwil DJPb terhadap KPPN	8.5
	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
5	Pengelolaan kas yang optimal		
	5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien		
	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
	6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu		
	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%
	7b-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi		
	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
	8c-N	Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	78
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel		
	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95.5%
	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82
	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10	Sistem informasi dan teknologi yang andal		
	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Sebagaimana disepakati dalam kontrak kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, dalam upaya mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat didukung pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Anggaran Kanwil per Output

NO	KODE	URAIAN OUTPUT	ANGGARAN
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			
4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			
1	4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	21.525.000
4804 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara			
2	4804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4.376.000
6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			
3	6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	46.580.000
4	6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	63.880.000
5	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	177.176.000
6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			
6	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.920.000
7	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	155.740.000
6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara			
8	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	4.830.000
6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara			
9	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	81.912.000
6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif			
10	6216.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	15.800.000
Program Dukungan Manajemen			
4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			
1	4715.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12.500.000
2	4715.EAC	Layanan Umum	1.208.481.000
3	4715.EAD	Layanan Sarana Internal	596.080.000
4	4715.EAE	Layanan Prasarana Internal	374.542.000
5	4715.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	96.016.000
4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi public			
6	4718.BMB	Komunikasi Publik	68.000.000
4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM			
7	4719.EAF	Layanan SDM	821.590.000
8	4719.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	247.224.000
4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			
9	4722.EAK	Layanan Pengawasan Internal	10.856.000
Jumlah			4.009.055.000

Refinement Kontrak Kinerja

Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada tahun 2021 terdapat penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Perubahan Ruang Lingkup dan Target IKU

1. IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb
IKU dimaksud mengalami penyesuaian nama IKU yang sebelumnya Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil menjadi Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb. Dalam rangka meningkatkan kepuasan Satker terhadap layanan Kanwil, target IKU meningkat menjadi 4.64 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 4.55 dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 4.58)
2. IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
Target IKU meningkat menjadi 87.5 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 87 dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 95.55)
3. IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN
IKU dimaksud mengalami penyesuaian nama IKU yang sebelumnya Rata-rata Nilai Kinerja KPPN sebagaimana Hasil Pembinaan dan Supervisi Kanwil menjadi Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN. IKU dimaksud juga mengalami perubahan skala penilaian. Target IKU dimaksud pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 8.5.
4. IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas
Target IKU meningkat menjadi 82% dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 80% dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 98.71)
5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
Target IKU meningkat menjadi 89 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 88 dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 97.53)
6. IKU Rata-rata Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN
Target IKU meningkat menjadi 90 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 80 dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 99.11)
7. IKU Nilai Kualiatas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah
Target IKU meningkat menjadi 79 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 78 dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 4.58)
8. IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis *Strategy Focused Organization*
Target IKU meningkat menjadi 84 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 83 dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 90.81)
9. IKU Rata-rata *Hard Competency* Pegawai
Target IKU meningkat menjadi 78 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 77 dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 89.62)
10. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb



IKU dimaksud mengalami perubahan formula mendasar dalam penghitungan capaian, dimana terdapat perubahan bobot pada komponen pengukurannya. Target IKU juga mengalami peningkatan menjadi 95.5 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 95 dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 98.16)

11. IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

IKU dimaksud mengalami perubahan formula mendasar dalam penghitungan capaian, dimana terdapat penambahan komponen penghitungan yang semula hanya 4 (empat) komponen menjadi 7 (tujuh) komponen. IKU dimaksud juga mengalami penyesuaian nama IKU yang semula Persentase Pengelolaan BMN yang Optimal menjadi Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN. Target IKU juga mengalami peningkatan menjadi 100% dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 92% dengan mempertimbangkan ketercapaian IKU tersebut pada tahun 2020 (realisasi 98.41)

B. Penetapan IKU Baru

1. IKU Rata-rata Nilai Kualitas Output Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

IKU dimaksud merupakan gabungan dari IKU Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil dan IKU Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil, dimana penghitungannya berdasarkan rata-rata nilai Laporan Kajian Fiskal Regional dan nilai Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran pada semester I dan semester 2 tahun berkenaan. Target IKU dimaksud pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 91.

2. IKU Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA secara Tepat Waktu dan Andal

IKU dimaksud merupakan IKU yang sebelumnya ada pada Kontrak Kinerja Tahun 2019 namun dihapuskan pada tahun 2020. Target IKU dimaksud pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 98.1%.

3. IKU Nilai Kualitas LK Tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb

IKU dimaksud merupakan IKU baru pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil. IKU dimaksud pada tahun 2020 sudah ada pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* Kanwil dengan jenis IKU *Non-Cascading*. Pada tahun 2021 IKU dimaksud menjadi IKU *Cascading* Peta. Target IKU dimaksud pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 82.

C. Penghapusan IKU

IKU "Nilai Rata-rata Kualitas Pelaksanaan Literasi Perbendaharaan" pada tahun 2021 dihapus.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Kinerja Lainnya



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

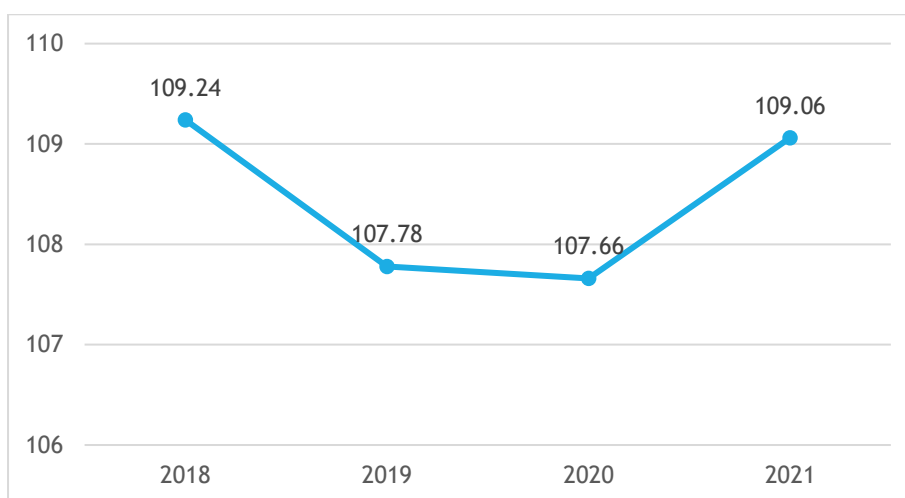
Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah sebesar **109,06**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 2021 Berdasarkan Perspektif

PERSPECTIVE	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	25%	110.13
CUSTOMER	15%	101.62
INTERNAL PROCESS	30%	108.12
LEARNING AND GROWTH	30%	112.84
NILAI KINERJA ORGANISASI		109.06

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada *Internal Process Perspective*. Nilai Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 secara keseluruhan sebesar 109.06, nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 (107.66). Nilai kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat ditunjukkan pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Perkembangan NKO Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik 3.1. NKO Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat cenderung mengalami penurunan. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya peningkatan target IKU setiap tahunnya sedangkan realisasi IKU tersebut cenderung stagnan. Namun, pada tahun 2021 Nilai Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dan dari 20 IKU Kanwil seluruhnya telah berstatus hijau (memenuhi target). Adapun rincian capaian masing-masing IKU sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2
 Capaian IKU Kemenkeu-Two (NKO)
 Kanwil DJPb Prov. Kalbar Tahun 2021

No	Kode IKU	Uraian IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					110.13
1	Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif				110.13
	1a-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94	99.44	105.79
	1b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82	100	120.00
	1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91	95.23	104.64
<i>Customer Perspective</i>					101.62
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien				101.62
	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,64 (skala 5)	4.72	101.62
<i>Internal Process Perspective</i>					108.12
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel				100.00
	3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100.00
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan				107.25
	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.5	96.36	110.12
	4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervise Kanwil DJPb terhadap KPPN	8.5	9.49	111.65
	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100.00
5	Pengelolaan kas yang optimal				120.00
	5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%	100%	120.00
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien				107.75
	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	94.19	105.83
	6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	99.32	110.35
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu				105.59
	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%	100%	101.94
	7b-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79	86.29	109.23
<i>Learning & Growth Perspective</i>					112.84
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi				112.12
	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84	94.42	112.40
	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	89.15	107.41
	8c-N	Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	78	90.94	116.59
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel				106.40
	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95.5%	97.54%	102.14
	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82	88.79	108.28
	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	108.82%	108.82
10	Sistem informasi dan teknologi yang andal				120.00
	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	100%	120.00

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat (20 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia.

Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien. Sasaran Strategis ini terdiri atas 3 IKU dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis 1

SS1: Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94	99.44	105.79
1b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82	100	120
1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91	95.23	104.65

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1a-N
Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb

Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan LK UAKBUN-Daerah seluruh KPPN di wilayah kerjanya.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tersebut secara periodik disampaikan kepada Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK *unaudited* berkontribusi sebesar 70% dan *audited* sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2021, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tahun 2020.

Cara Ukur/ Formula IKU

Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut:

- (1) Akurasi data (70%);
- (2) Ketepatan waktu (2%);
- (3) Kelengkapan dokumen (3%);
- (4) Tingkat Partisipasi (25%).

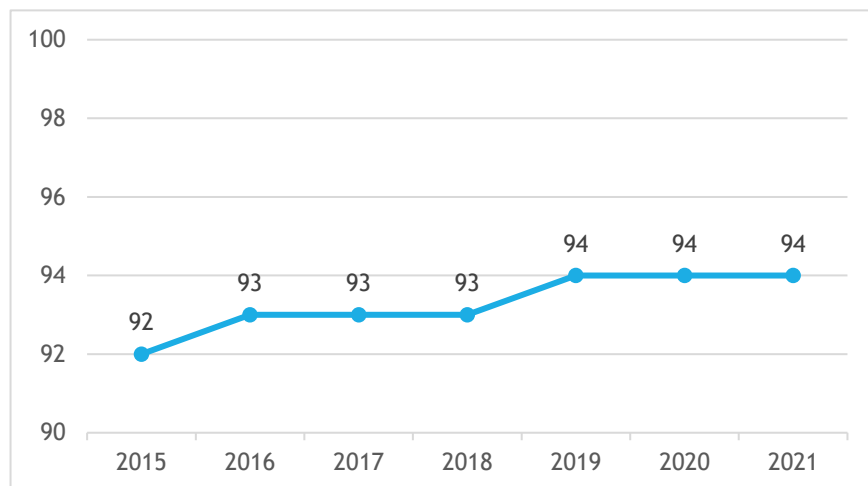
Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:

- Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)
- Level 3 = 80-94 (Baik)
- Level 2 = 65-79 (Cukup)
- Level 1 = 0-64 (Kurang)

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 94, sama dengan target pada tahun 2020. Adapun perkembangan target dari tahun ke tahun dapat terlihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2. Perkembangan target IKU Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb



**Realisasi IKU
Tahun 2021**

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 99.94. Nilai tersebut diperoleh dari nilai akhir sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-285/PB/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hasil Penilaian LKBUN Kanwil DJPb Tahun 2020. Adapun hasil penilaian pada masing-masing kriteria sesuai tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Hasil Penilaian LK BUN tingkat wilayah

Akurasi Data	Ketepatan Waktu	Kelengkapan Dokumen	Partisipasi	Nilai
(70%)	(2%)	(3%)	(25%)	
99.567	100	100	98.961	99.437

**Perbandingan
Realisasi dan Target
IKU Tahun 2021**

Perbandingan realisasi dan target IKU tersebut Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

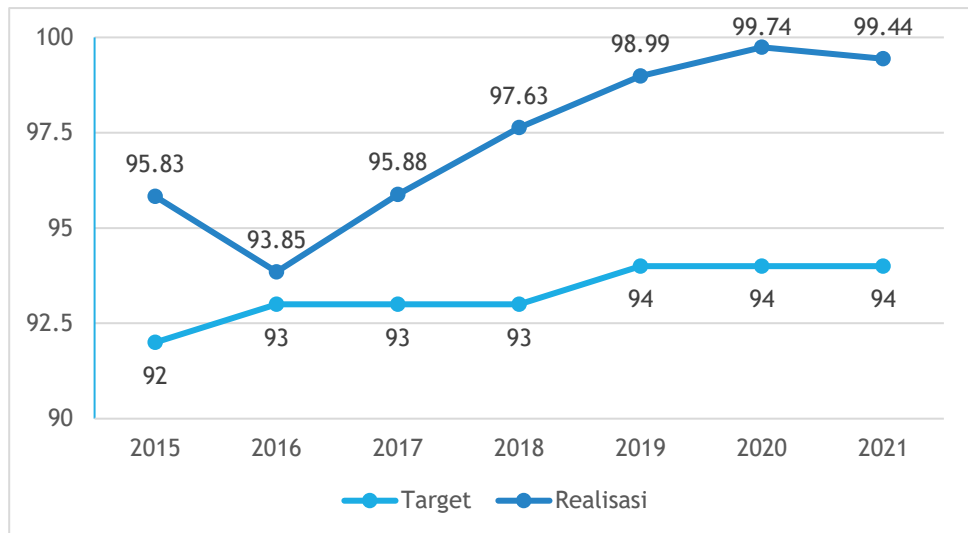
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	94	94	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	99.44	99.44	
Capaian	-	-	-	-	-	105.79	105.79	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 99.44 melampaui target yang ditetapkan sebesar 94, dengan capaian sebesar 105.79.

**Perbandingan
realisasi tahun 2021
dengan tahun-
tahun sebelumnya**

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.3 berikut:

Grafik 3.3. Perbandingan target dan realisasi tahun 2015-2021



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, realisasi IKU tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan dengan perolehan realisasi sebesar 93.85, yang merupakan terendah selama 7 tahun kebelakang. Pada tahun 2017 mulai mengalami peningkatan lagi dimana realisasi IKU mencapai 95.88. Tren peningkatan ini dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 97.63 di tahun 2018, 98.99 di tahun 2019 dan 99.74 di tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi IKU ini mengalami penurunan sebesar 0.3.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja s.d. tahun 2021 dengan Renstra Kanwil 2015-2019 dan Renstra DJPb 2020-2024

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 sebagaimana Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi s.d. tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019.

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	99.44	105.79	-		94
2020	99.74	106.10			94
2019	98.99	105.31		4	94
2018	97.63	104.98		6	93
2017	95.88	103.10		8	93
2016	93.85	100.91		10	93
2015	95.83	104.16		15	92

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024, namun untuk mendukung Target Kinerja DJPb Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN yang mempunyai target 4 (skala 4). Sementara itu dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat target kinerja yang tercantum adalah **Peringkat LKPP Kanwil**. IKU ini kemudian dilakukan refinement pada tahun-tahun berikutnya menjadi **Nilai Kualitas LK BUN** yang lebih mencerminkan ukuran kualitas LK BUN tingkat Kanwil.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja s.d. tahun 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Perbandingan realisasi s.d. tahun 2021 dengan RPJMN.

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	99.44	105.79	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	99.74	106.10	-	
2019	98.99	105.31	-	
2018	97.63	104.98	-	
2017	95.88	103.10	-	
2016	93.85	100.91	-	
2015	95.83	104.16	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam satu regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi IKU	Keterangan
1	Kalimantan Barat	99.44	Apabila dibandingkan dengan Kanwil lain dalam regional realisasi dan capaian IKU ini tertinggi ketiga setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.
2	Kalimantan Selatan	99.50	
3	Kalimantan Tengah	99.21	
4	Kalimantan Timur	99.44	
5	Kalimantan Utara	99.52	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Capaian IKU "Nilai Kualitas LK BUN tingkat wilayah yang berkualitas" telah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian nilai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada akurasi data. Terdapat kriteria penilaian yang berada di luar kontrol Kanwil dan KPPN yaitu partisipasi, yang unsur penilaiannya berasal dari kualitas LK UAKPA satker mitra kerja Kanwil dan KPPN. Unsur penilaian tersebut antara lain Adanya Pagu Minus, Saldo Tidak Normal, dan Aset Belum Diregister.

Adapun **tindakan** yang telah dilakukan adalah:

1. Melaksanakan FGD Penyusunan dan Penilaian LK UAKBUN-D dan Kanwil Tahun 2020 Unaudited.
2. Mengundang KPPN (Seksi Vera) untuk mengikuti FGD yang dilaksanakan baik oleh kantor pusat maupun Kanwil DJPb terkait penyusunan laporan keuangan.
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIANTAN dalam penyusunan LK BUN tingkat Kanwil.
4. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja agar menatausahakan dokumen sumber atas seluruh transaksi tahun 2021
5. Melaksanakan pembinaan UAKBUN-D di KPPN Ketapang.
6. Menjadi narasumber dalam acara "Sosialisasi Rekonsiliasi dan Penyusunan LKLL Semester I Tahun 2021" yang diselenggarakan oleh KPPN Ketapang.
7. Melaksanakan kegiatan FGD Refreshment Aplikasi SiANTAN LK UAKBUN-D.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan UAPPAW
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIANTAN dalam penyusunan LK BUN tingkat Kanwil
3. Melakukan pembinaan UAKBUN-D KPPN

1b -N Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

Definisi

Kantor Wilayah DJPb selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb dimaksudkan untuk menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Untuk mengukur efektifitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.

Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan dan monitoring yang berupa :

- Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman
- Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat early warning system (EWS) yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah.

Penilaian IKU bersifat *historical report*, yaitu untuk Nilai IKU Semester I Tahun 2021 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester II Tahun 2020, dan Nilai IKU Semester II Tahun 2021 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester I Tahun 2021.

Cara Ukur/ Formula IKU

Realisasi IKU ini diperoleh dari hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh Kantor Pusat Ditjen DJPb. Adapun mekanisme penilaian oleh Kantor Pusat DJPb adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \left\{ \left(\sum \text{Kualitas Pembinaan} \times 80\% \right) + \left(\text{Ketepatan Waktu} \times 20\% \right) \right\}$$

$$\text{Kualitas Pembinaan} = \{ (A1 \times 10\%) + (A2 \times 15\%) + (A3 \times 5\%) + (A4 \times 65\%) + (A5 \times 5\%) \}$$

Keterangan:

A1 = Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

- 100 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai dan tepat waktu dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017
- 75 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai tetapi tidak tepat waktu dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017
- 50 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program tidak dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017

A2 = Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

- 100 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 50 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 0 = Tidak dilakukan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

A3 = Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu

Tepat waktu adalah debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli untuk Semester I dan akhir Januari tahun berikutnya untuk Semester II, atau mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Andal adalah

rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data. Komponen penghitungan IKU ini berdasarkan jumlah pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan berdasarkan jumlah debitur, mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari satu.

$$\left(\frac{\sum \text{Pinjaman yang direkonsiliasi secara tepat waktu dan andal}}{\sum \text{Pinjaman yang seharusnya direkonsiliasi}} \right) \times 100\%$$

A4 = Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

- 100 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 50 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 0 = tidak dilakukan monitoring

A5 = Kelengkapan dan Kesesuaian Format

- 100 = Laporan lengkap dan sesuai dengan PER-19/PB/2017
- 75 = Laporan lengkap tetapi tidak sesuai dengan PER-19/PB/2017 atau Laporan Tidak Lengkap tetapi sesuai dengan PER-19/PB/2017
- 25 = Laporan Tidak Lengkap dan tidak sesuai dengan PER-19/PB/2017

Ketepatan Waktu =

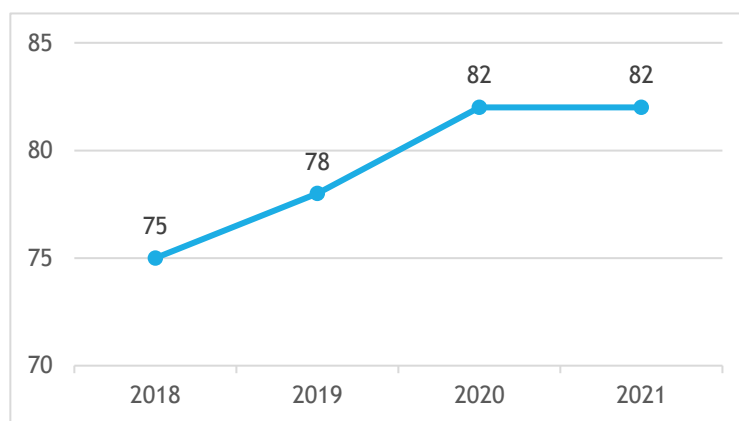
Ketepatan waktu penyampaian laporan dihitung berdasarkan ketentuan dalam PER-19/PB/2017

- 1 hari sd 5 hari sesudah semester berakhir	100
- 6 hari sd 10 hari sesudah semester berakhir	80
- 11 hari sd 15 hari sesudah semester berakhir	50
- 16 hari sd 20 hari sesudah semester berakhir	25
- Diatas 20 hari	0

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar 82, sama dengan target tahun 2020. Adapun target IKU dari tahun 2018-2021 sebagaimana grafik 3.4 berikut:

Grafik 3.4. Target IKU Tahun 2018-2021



Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut tahun 2021 sebesar 100. Realisasi ini merupakan rata-rata realisasi pada semester I dan semester II masing-masing sebesar 100 dan 100. Realisasi semester I berdasarkan nota dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi nomor ND-640/PB.4/2021 tanggal 2 Juli 2021 hal Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan

Monitoring Pinjaman dan Kredit Program pada Kantor Wilayah DJPb Semester I Tahun 2021. Realisasi semester II sebesar 100 berdasarkan nota dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi nomor ND-1450/PB.4/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Penyampaian Nilai Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program Semester II Tahun 2020.

Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tahun 2021

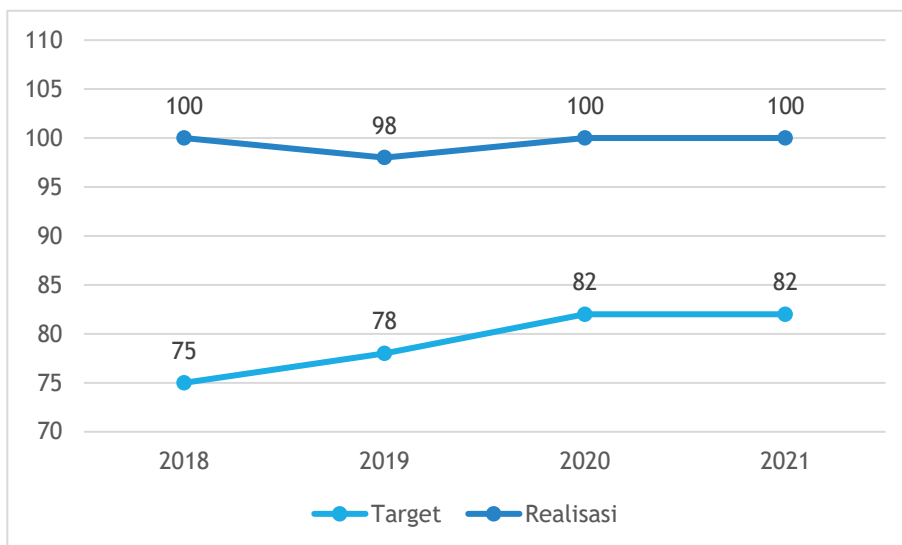
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	82	82	-	82	82	82	Max/ Average
Realisasi	-	100	100	-	100	100	100	
Capaian	-	120	120	-	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 100 melampaui target yang ditetapkan sebesar 82, dengan capaian sebesar 120.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik Grafik 3.5 berikut:

Grafik 3.5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2018-2021



Perbandingan realisasi dan capaian kinerja s.d. tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	100	120	-		82
2020	100	120			82
2019	98	120			78
2018	100	120			75

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019. IKU ini baru tercantum pada IKU Kemenkeu-Two Kanwil mulai tahun 2018-2021.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja s.d. tahun 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	100	120	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024
2020	100	120		
2019	98	120		
2018	100	120		

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi IKU	Keterangan
1	Kalimantan Barat	100	Semua Kanwil dalam regional ini mendapatkan realisasi dan capaian IKU sama, yaitu 100.
2	Kalimantan Selatan	100	
3	Kalimantan Tengah	100	
4	Kalimantan Timur	100	
5	Kalimantan Utara	100	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Secara umum, realisasi IKU tersebut diatas target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Data yang tersedia di SIKP tidak *update*, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan monev.
2. Daftar sampel debitur yang dapat dicetak dari aplikasi SIKP terbatas dan tidak banyak mengalami perubahan dari tahun lalu.
3. Informasi Relaksasi/Restrukturisasi dan tambahan subsidi bunga kurang tersampaikan kepada debitur

Sehingga memberi implikasi pada Pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal serta program relaksasi/restrukturisasi dan tambahan subsidi bunga Pinjaman KUR, manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh debitur.

Permasalahan yang dihadapi yaitu Pemda belum mengerti manfaat kredit program kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta para debitur tidak memanfaatkan restrukturisasi pinjaman maupun penundaan pembayaran cicilan angsuran.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

1. Koordinasi dan komunikasi Pemda serta Bank/Lembaga Penyalur Lingkup Provinsi Kalimantan Barat diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kordinasi Penyaluran KUR dan UMi;
2. Melakukan monitoring kepada Debitur KUR lingkup Prov. Kalimantan Barat;
3. Monitoring dan koordinasi dengan Bank Penyalur Kredit Program;
4. Monev Debitur KUR.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah melakukan evaluasi atas variabel/indikator yang belum optimal, menyusun rencana kerja untuk melakukan perbaikan monitoring/evaluasi, dan monev Debitur KUR.

1c
-
N
Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

Definisi

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 bahwasanya Kanwil DJPb berkewajiban menyusun Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Kajian Fiskal Regional (KFR). Penyusunan RPA bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L, menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator lain yang mewakili kinerja atau kualitas. Sedangkan dalam rangka menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai pengelola fiskal, Kanwil DJPb diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional).

Sesuai ketentuan SE- 28/PB/2015, laporan RPA tingkat wilayah disusun oleh Kanwil DJPb secara periodik (semesteran) dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil DJPb, Kantor Pusat DJPb memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil DJPb dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA; Alur pikir/flow; kualitas analisis dan inovasi; ketajaman rekomendasi; analisis aspek khusus; format review/sistematika; penyajian dashboard; ketepatan waktu; dan desain/layout.

Sedangkan sesuai ketentuan SE- 61/PB/2017, setiap Kanwil DJPb menyusun Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kantor Pusat DJPb. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian Fiskal Regional pada Kanwil DJPb, Kantor Pusat DJPb memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Tingkat Wilayah. Penilaian KFR dilakukan secara Semesteran. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian KFR, meliputi: ketepatan waktu penyampaian laporan; kesesuaian dengan petunjuk dan contoh penyajian sebagaimana diatur dalam SE; kelengkapan, relevansi dan kualitas data; kualitas analisis; teknik penyajian dan estetika, serta kemanfaatan laporan.

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2021 merupakan hasil penilaian Laporan RPA semester II tahun 2020 dan Laporan KFR tahunan 2020, sedangkan untuk realisasi IKU semester II tahun 2021 merupakan hasil penilaian Laporan RPA semester I tahun 2021 dan Laporan KFR semester I tahun 2021.

Cara Ukur/ Formula IKU

Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran = $\frac{\text{Nilai RPA} + \text{Nilai KFR}}{2}$



Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb adalah sebagai berikut:

- Level 5 = 91-100 (Excellent)
- Level 4 = 75-90 (Good)
- Level 3 = 61-74 (Fair)
- Level 2 = 41-60 (Poor)
- Level 1 = 0-40 (Unqualified)

Target IKU Tahun 2021 IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target tahun sebelumnya.

Realisasi IKU Tahun 2021 Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 95.23. Realisasi tersebut merupakan rata-rata realisasi semester I dan semester II masing-masing sebesar 95.70 dan 94.75. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3/PB/PB.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II Tahun 2020 Tingkat Wilayah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai **96.15** dan berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-4/PB/PB.2/2021 tanggal 25 Juni 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2020 Tingkat Wilayah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai **95.25**, sehingga realisasi IKU untuk Semester I yaitu **95.70**. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-11/PB/PB.2/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I Tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai **94.36** dan berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-10/PB/PB.2/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai **95.14**, sehingga realisasi IKU untuk Semester II yaitu **94.75**.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	91	91	-	91	91	91	Max/ Average
Realisasi	-	95.70	95.70	-	95.70	94.75	95.23	
Capaian	-	105.16	105.16	-	105.16	104.12	104.65	

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya IKU tersebut merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.14, sebagai berikut:



Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb Tahun 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	95.23	104.65	-	-	91

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019. Pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 yang tercantum adalah "Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil" dan "Peringkat Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Spending Review." IKU ini mengalami refinement pada tahun 2021, dimana IKU ini merupakan gabungan dari IKU Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil dan IKU Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	95.23	104.65	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi IKU	Keterangan
1	Kalimantan Barat	95.23	
2	Kalimantan Selatan		
3	Kalimantan Tengah		
4	Kalimantan Timur		
5	Kalimantan Utara		

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Secara umum, realisasi IKU tersebut diatas target yang ditetapkan. Terkait RPA, dari 9 Unsur penilaian hanya unsur penilaian ketepatan waktu yang memperoleh nilai maksimal untuk itu masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh nilai maksimal pada unsur-unsur penilaian yang lain. Lalu terkait KFR juga masih ada ruang peningkatan

terutama terkait pemenuhan kelengkapan data dan optimalisasi ruang peningkatan kualitas dalam analisis yang dilakukan, serta aspek kemanfaatan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

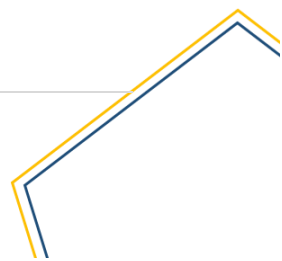
1. kurangnya kelengkapan data APBD, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan analisa, serta pemanfaatan atas rekomendasi KFR oleh Pemerintah Daerah yang belum optimal.
2. Inventarisasi permasalahan pelaksanaan anggaran yang dihadapi satker belum komprehensif, kemampuan penyusunan analisis pelaksanaan anggaran secara lebih mendalam dan terukur perlu ditingkatkan, dan desain grafis masih perlu ditingkatkan.

Tindakan yang telah dilakukan yaitu:

1. Penyusunan Laporan RPA
 - a. Melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran melalui kuisisioner EPA bulan Januari sd September 2021
 - b. Melakukan penyebaran kuisisioner data permasalahan satuan kerja dengan indikator-indikator IKPA, sebagai langkah persiapan dalam penyusunan Laporan RPA Semester I Tahun 2021
 - c. Melakukan kompilasi permasalahan satker sebagai bahan penyusunan RPA semester I TA 2021.
 - d. Menyampaikan *flash report* permasalahan satker sebagai bagian dari tahap penyusunan RPA Semester I TA 2021.
 - e. Melakukan ekspose terkait dengan hasil penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021
2. Penyusunan KFR
 - a. Mellibatkan institusi yang berkompeten dalam penyajian data terkait laporan KFR (BI, OJK, BPS, Perpajakan, dan Bea Cukai);
 - b. Penyusunan dan pengiriman laporan KFR secara tepat waktu;
 - c. Meningkatkan inovasi desain grafis dan layout KFR;
 - d. Kordinasi dengan Pemda Mempawah untuk melaksanakan Desiminasi KFR di Kabupaten Mempawah
 - e. Menyusun KFR Triwulan III tahun 2021 dengan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan aturan penyajian KFR Triwulan III 2021, misalnya dengan menyederhanakan visualisasi data dan mempertajam analisis data.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja yaitu:

1. Penyusunan Laporan RPA
 - a. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan evaluasi nilai IKPA dengan satker K/L terpilih secara bulanan melalui kuisisioner dan *one on one meeting* guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satker K/L;
 - b. Melaksanakan GKM internal dan sharing session yang melibatkan para penyusun Laporan RPA secara bulanan;
 - c. Menggali lebih dalam dari hasil identifikasi permasalahan melali kuisisioner kepada satker terkait.
3. Penyusunan KFR:
 - a. Berkolaborasi dengan Pemda setempat dalam penyusunan laporan KFR;
 - b. Melibatkan pihak ketiga dalam pembuatan design laporan KFR;
 - c. Melaksanakan FGD dengan akademisi dari Universitas Tanjungpura untuk menentukan alat analisis yang tepat.



Sasaran Strategis 2:

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sebagaimana undang-undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Sasaran Strategis ini terdiri atas satu IKU yaitu indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Strategis 2

SS2: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb	4,64 (skala 5)	4,72	101,62

2a-N
Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil DJPb serta penyediaan sarpras Kanwil DJPb.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing Kanwil DJPb dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I.

Definisi

Cara Ukur/ Formula IKU

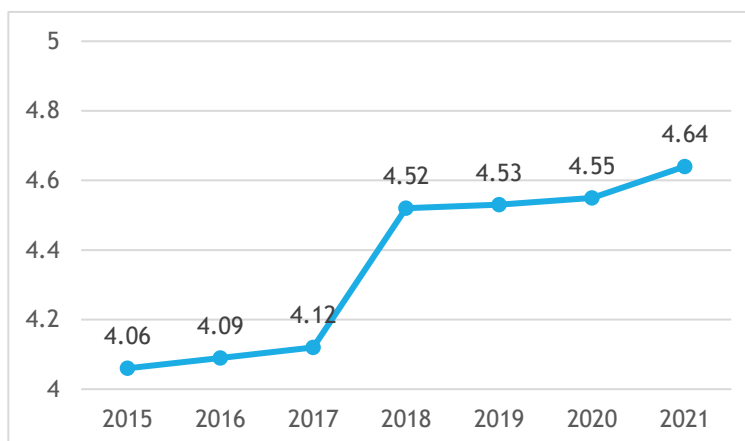
Realisasi IKU ini diperoleh dari hasil survei kepuasan satker. Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

- 5 = Sangat Puas
- 4 = Puas
- 3 = Cukup Puas
- 2 = Kurang Puas
- 1 = Tidak Puas

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut di tahun 2021 sebesar 4.64, naik sebesar 0.09 dari target tahun 2020 sebesar 4.55. Adapun perkembangan target dari tahun 2015-2020 tersaji pada grafik 3.18.

Grafik 3.6. Perkembangan Target tahun 2015-2021



Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi IKU Tahun 2021 sebesar 4,72. Hasil ini didapatkan dari survey yang dilakukan secara online kepada satker berdasarkan surat Kepala Kanwil Nomor S-564/WPB.17/2021 tanggal 3 Juni 2021. Hasil dari Survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan satker/mitra kerja atas layanan Revisi Dokumen Anggaran 4,71 dan Kepuasan atas sarana dan prasarana 4,72 sehingga secara keseluruhan tingkat kepuasan satker terhadap layanan Kanwil pada indeks 4,72. Realisasi pada tahun 2021 sudah melebihi target yaitu 4,64 dan mengalami peningkatan sebesar 0,14 dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

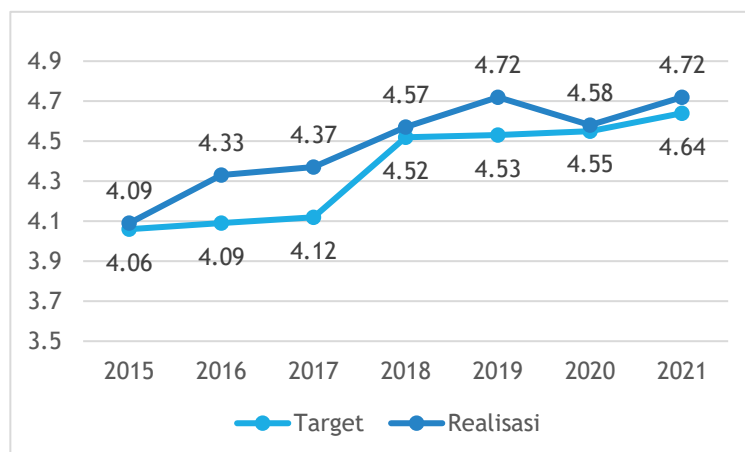
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	4.64	4.64	-	4.64	-	4.64	Max/ TLK
Realisasi	-	4.72	4.72	-	4.72	-	4.72	
Capaian	-	101.62	101.62	-	101.62	-	101.62	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 4.72 melampaui target yang ditetapkan sebesar 4.64, dengan capaian sebesar 101,62.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.7 berikut:

Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi dan Target tahun 2015-2021



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 4,72 mengalami peningkatan sebesar 0,14 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4.58. Apabila dilihat tren realisasi IKU pada grafik 3.7, pada tiap tahun dari 2015 hingga 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari capaian tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya keterbatasan komunikasi antara petugas layanan dengan petugas satker dalam pemberian layanan online.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	4.72	101.62	4.05		4.58
2020	4.58	100.66	4.00		4.55
2019	4.72	104.20		-	4.53
2018	4.57	101.11		-	4.52
2017	4.37	106.07		-	4.12
2016	4.33	105.87		-	4.09
2015	4.09	100.74		-	4.06

Pada tahun 2021 IKU ini tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagai "Indeks kepuasan pengguna layanan" dengan target 4.05 (skala 5). IKU ini tidak tercantum pada Renstra Kanwil tahun 2015-2019 namun berdasarkan Refinement Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil IKU ini ada di tahun 2015-2019.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	4.72	101.62	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	4.58	100.66	-	
2019	4.72	104.20	-	
2018	4.57	101.11	-	
2017	4.37	106.07	-	
2016	4.33	105.87	-	
2015	4.09	100.74	-	

**Perbandingan
Capaian IKU dengan
Kanwil DJPb lain**

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi IKU	Keterangan
1	Kalimantan Barat	4.72	Tidak terdapat informasi mengenai capaian IKU pada Kanwil lain dalam regional pulau Kalimantan.
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

**Isu, Permasalahan,
Tindakan, dan
Action Plan**

Isu utama IKU ini adalah perubahan pola layanan yang sebelumnya bersifat langsung menjadi online. sehingga pada masa transisi ini layanan menjadi lebih lama. Dengan pelayanan yang bersifat online, komunikasi antara petugas FO dan satker kadang terhambat dan tidak berjalan dengan optimal. Ditambah adanya kendala pada jaringan.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

1. Mencantumkan kegiatan survey kepuasan pengguna layanan pada Rencana Kerja Tahunan Bidang PPA I
2. Melakukan penyebaran kuesioner kepuasan pengguna layanan Kepada satker-satker mitra kerja wilayah kerja Kanwil DJPb Kalimantan Barat melalui Surat Kepala Kanwil Nomor S-564/WPB.17/2021 tanggal 3 Juni 2021 dan melakukan perhitungan data atas hasil kuesioner, serta membuat Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ aktivitas pelayanan dengan merujuk pada hasil perolehan indeks kepuasan pengguna layanan yang diterima kanwil DJPb Kalimantan Barat.

Sasaran Strategis 3:

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 IKU yaitu Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktusebagai berikut:

Tabel 3.22
Capaian Sasaran Strategis 3

SS3: Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100

3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu
-------------	---

Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.

Berdasarkan PMK 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2021 pasal 27, untuk usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah DJPb menetapkan surat pengesahan revisi anggaran, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap, serta notifikasi dari sistem tercetak.

Definisi

Cara Ukur/ Formula IKU

Capaian = $(\sum \text{revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu} / \sum \text{Usulan pengesahan revisi DIPA yang diterima dari satker}) \times 100\%$

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut di Tahun 2021 sebesar 100%. Target ini tidak berubah dari tahun 2015 hingga tahun 2021 mengingat target 100% merupakan target maksimal.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 sebesar 100%. Berdasarkan data pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat jumlah dokumen revisi yang diterima dari satker sejumlah 1.748 dokumen. Seluruh dokumen revisi dapat diselesaikan secara tepat waktu (1 hari kerja) sesuai dengan ketentuan.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.23 berikut:

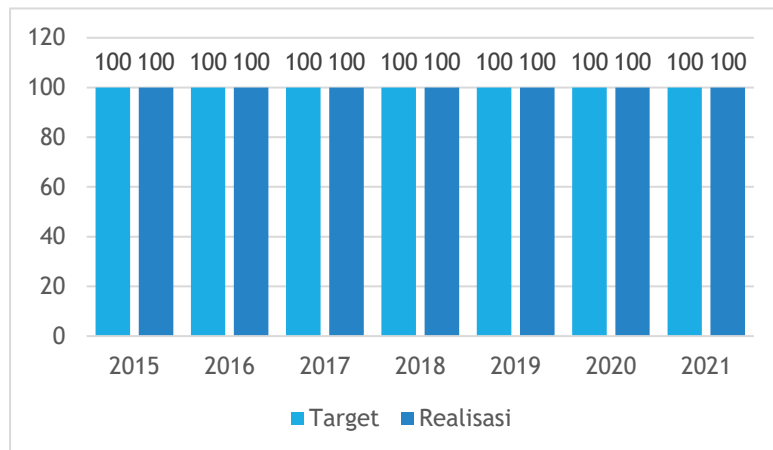
Tabel 3.23. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 sebesar 100%, dan merupakan realisasi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat realisasi tersebut sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.8 berikut:

Grafik 3.8. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2015-2021



Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	100%	100	-		100%
2020	100%	100			100%
2019	100%	100		-	100%
2018	100%	100		-	100%
2017	100%	100		-	100%
2016	100%	100		-	100%
2015	100%	100		-	100%

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada tahun sebelumnya IKU ini juga tidak tercantum dalam Renstra Kanwil tahun 2015-2019 namun berdasarkan Refinement Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil IKU ini ada di tahun 2015-2020 dengan target penyelesaian revisi secara tepat waktu sebesar 100%.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	100%	100	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	100%	100	-	
2019	100%	100	-	
2018	100%	100	-	
2017	100%	100	-	
2016	100%	100	-	
2015	100%	100	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi IKU	Keterangan
1	Kalimantan Barat	100%	Tidak terdapat informasi mengenai capaian IKU pada Kanwil lain dalam regional pulau Kalimantan.
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu utama IKU ini adalah terbitnya PMK Nomor 208/PMK,05/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021 dan Perdirjen Perbendahaharaan Nomor Per-2/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan DJPb pada Tahun Anggaran 2021 membawa beberapa perubahan yang mendasar terkait dengan kebijakan revisi yang dilakukan pada tahun 2021, khususnya terkait dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Sehingga bidang PPA I harus melakukan internalisasi ketentuan revisi yang baru supaya semua satker memahami tata cara revisi anggaran TA 2021.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

1. Menyelesaikan seluruh berkas usulan revisi dari satker selama tahun 2021
2. Melakukan sosialisasi kepada satker terkait tata cara revisi anggaran tahun 2021 yang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d. 4 Maret 2021 diikuti oleh 238 Satker mitra kerja
3. Dalam upaya meningkatkan layanan ke Satker K/L, telah dibuat sarana informasi penyelesaian revisi anggaran dan hibah ke satker K/L melalui WA dengan nama WA-INSPIRASI (Informasi Penyelesaian Hibah dan Revisi)

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:

1. Melakukan bimbingan kepada satker baik melalui CSO/FO maupun via Grup WA Bidang PPA I.
2. Melakukan GKM Internal secara berkelanjutan guna mengevaluasi dan menindaklanjuti penyelesaian kendala/permasalahan proses revisi anggaran satker K/L.

3. Penyelesaian usulan revisi satker secara tepat waktu.
4. Melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi WA-INSPHIRASI dalam melakukan tugas dan fungsi revisi DIPA.

Sasaran Strategis 4:

Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang Berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 3 (tiga) IKU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.27
Capaian Sasaran Strategis 4

SS4: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.5	96.36	110.12
4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8.5	9.49	111.65
4c-CP	Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100

4a
-N
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Tingkat pemahaman *stakeholders* merupakan tingkat daya tangkap peserta (*stakeholders*) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb.

Definisi

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Cara Ukur/ Formula IKU

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui 2 (dua) cara yaitu Bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka

total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

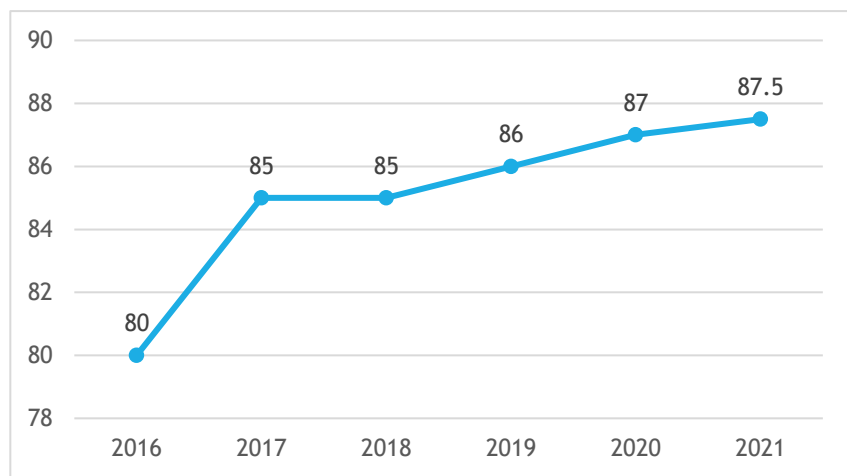
Rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

- $0 < x \leq 20$ = sangat tidak efektif
- $20 < x \leq 40$ = tidak efektif
- $40 < x \leq 60$ = kurang efektif
- $60 < x \leq 80$ = efektif
- $80 < x \leq 100$ = sangat efektif

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 87,5, naik sebesar 0,05 dari tahun 2020 sebesar 87. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2015-2021 sebagaimana grafik 3.9.

Grafik 3.9. Perbandingan target IKU tahun 2015-2021



Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut di tahun 2021 sebesar 96,35. Realisasi ini merupakan rata-rata dari realisasi pada semester I dan semester II. IKU ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Bidang PAPK, dan Bidang SKKI. Adapun rincian realisasi masing-masing Bidang tersaji pada tabel 3.28.

Tabel 3.28. Realisasi IKU Tahun 2021

No	Bidang	Semester I	Semester II	Realisasi
1	Bidang PPA I	96.79	96.80	96.35
2	Bidang PAPK	97.80	97.79	
3	Bidang SKKI	92.39	96.55	
	Realisasi	95.66	97.05	

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.29 berikut:

Tabel 3.29. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

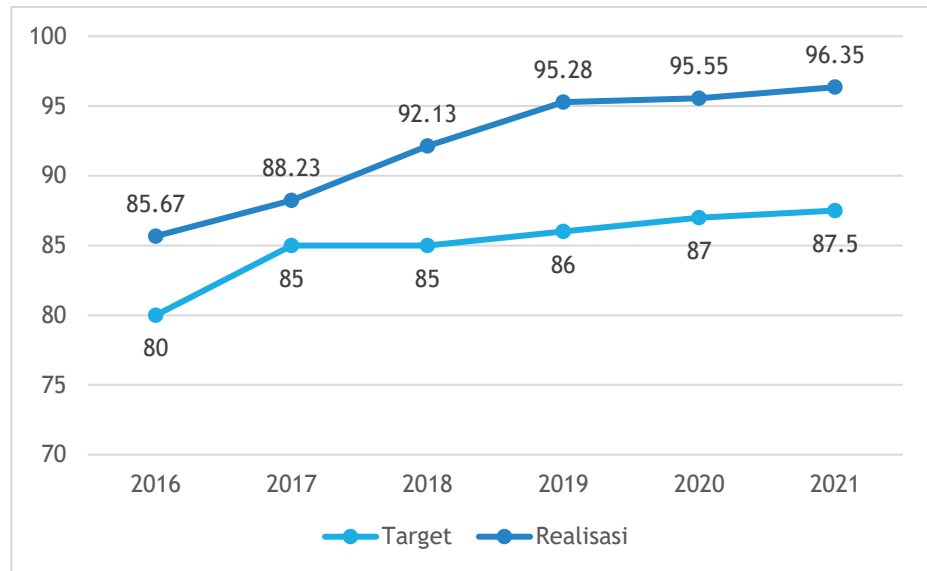
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	87,5	87,5	-	87,5	87,5	87,5	Max/ Average
Realisasi	-	95,66	95,66	-	95,66	97,05	96,35	
Capaian	-	109,33	109,33	-	109,33	110,91	110,11	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 96.35 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 87.5, dengan capaian sebesar 110.11.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.10 berikut:

Grafik 3.10. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2016-2021



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, realisasi IKU tersebut mengalami tren positif (mengalami kenaikan dari tahun ke tahun). Realisasi IKU tahun 2021 sebesar 96.35 mengalami kenaikan sebesar 0.8 dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 95.55

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	96.35	110.11	-		87.5
2020	95.55	109.83			87
2019	95.28	110.8		90	86
2018	92.13	108.39		85	85
2017	88.23	103.8		85	85
2016	85.67	107.09		80	80

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat nama IKU yang tercantum adalah "Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan APBN", namun demikian dilakukan refinement Kontrak Kinerja tahun 2015-2019 dengan mengubah wording nama IKU terakhir menjadi "Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi" di tahun 2019, dan "Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi" di tahun 2020.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	96.35	110.11	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	95.55	109.83	-	
2019	95.28	110.8	-	
2018	92.13	108.39	-	
2017	88.23	103.8	-	
2016	85.67	107.09	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32. Perbandingan realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	96.35	Tidak terdapat informasi mengenai capaian IKU pada Kanwil lain dalam regional pulau Kalimantan.
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Capaian IKU Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian masih perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan. Adapun **isu utama** sebagai berikut:

Merebaknya wabah COVID-19 membuat kegiatan dalam rangka meningkatkan komunikasi dan edukasi lainnya menjadi beragam baik itu secara daring maupun tatap muka (dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat). Selain itu adanya wabah COVID-19 juga menyebabkan banyaknya aturan yang muncul dalam rangka penanganan wabah dimaksud. Hal ini mengharuskan Kanwil untuk terus menjalin komunikasi dengan satker agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dapat terinformasikan kepada satker. Implikasi atas permasalahan diatas adalah adanya kemungkinan pelaksanaan kegiatan-kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan secara daring maupun secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat terhambat.

Tindakan yang telah dilaksanakan yaitu:

Bidang PPA I, PAPP, dan SKKI telah melaksanakan sosialisasi/bimtek sebagai dasar perhitungan IKU, antara lain: Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, FGD terkait peningkatan kualitas penyajian LKPD dan LK UAKBUN Tahun 2020, FGD dan

Sosialisasi terkait peningkatan kualitas penyajian LKPD dan LK Kementerian/Lembaga tahun 2021, Pemberian Dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Meraih Opini WTP atas LKPD Tahun 2021, *Review* Laporan Keuangan UAPPA/B-W Politeknik Negeri Pontianak Triwulan III Tahun 2021, dan *open class* "Jabatan Fungsional Bagi Pengelola Keuangan APBN" secara daring.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:

1. Melakukan evaluasi atas metode penyampaian sosialisasi/bimtek dan apabila memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.
2. Melakukan evaluasi dan pemetaan masalah terkait dengan hasil pengisian kuesioner edukom yang dilakukan oleh satuan kerja.

4b
-N
Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN di lingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap komponen berikut:

1. Efektivitas & Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
3. Representasi Kementerian Keuangan Di Daerah
4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
5. Tata Kelola Internal
6. Inovasi Dan Prestasi

Selanjutnya, paling lambat 31 Juli tahun berkenaan dan 31 Januari tahun berikutnya, Kepala Kanwil DJPb menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan laporan tersebut, Sekretariat DJPb melakukan penilaian atas Laporan Kinerja KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb.

Pengisian realisasi IKU bersifat *historical report*. Artinya, untuk data realisasi IKU semester I tahun 2021 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2020. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2021 merupakan rata-rata hasil pembinaan semester I tahun 2021.

Definisi

Cara Ukur/ Formula IKU

$((\text{Nilai LHPS Kanwil dari Kantor Pusat DJPb}) * 50\%) + ((\text{Rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil}) * 50\%)$

Rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil dihitung dengan formulasi berikut: Jumlah nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil dibagi Jumlah KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 8.5. Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan skala penilaian sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut di tahun 2021 sebesar 9.49. Nilai tersebut merupakan rata-rata atas realisasi pada semester I dan semester II. Adapun perolehan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel 3.33.

Tabel.3.33. Realisasi IKU Tahun 2021

No	Keterangan	Semester I	Semester II	Realisasi
1	Nilai LHPS Kanwil Kantor Pusat	9.32	9.28	9.49
2	Nilai kinerja KPPN Pontianak	9.44	9.45	
3	Nilai kinerja KPPN Singkawang	9.45	9.45	
4	Nilai kinerja KPPN Ketapang	9.75	9.75	
5	Nilai kinerja KPPN Sanggau	9.69	9.69	
6	Nilai kinerja KPPN Sintang	9.50	9.50	
7	Nilai kinerja KPPN Putussibau	9.58	9.58	
	Realisasi	9.56	9.42	

**Perbandingan
realisasi dan target
IKU Tahun 2021**

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.34 berikut:

Tabel 3.34. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	8.5	8.5	--	8.5	8.5	8.5	Max/ Average
Realisasi	-	9.56	9.56	-	9.56	9.42	9.49	
Capaian	-	112.47	112.47	-	112.47	110.82	111.65	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 9.49 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 8.5, dengan capaian 111.65.

**Perbandingan
realisasi tahun 2021
dan tahun-tahun
sebelumnya**

Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan skala penilaian sehingga tidak dapat diperbandingkan.

**Perbandingan
realisasi dan
capaian s.d. 2020
dengan Renstra
DJPb 2020-2024 dan
Renstra Kanwil
2015-2019**

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	9.49	111.65	-	-	8.5
2020	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana pada renstra Kanwil 2015-2019. Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan skala penilaian sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	9.49	111.65	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	-	-	-	
2019	-	-	-	
2018	-	-	-	
2017	-	-	-	
2016	-	-	-	
2015	-	-	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.37 berikut:

Tabel 3.37. Perbandingan Nilai Hasil LHPs dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Semester I	Semester II	Keterangan
1	Kalimantan Barat	9.32	9.28	Tidak terdapat informasi mengenai capaian IKU pada Kanwil lain dalam regional pulau Kalimantan, kecuali unsur penilaian LHPs dari Kantor Pusat
2	Kalimantan Selatan	9.32	9.22	
3	Kalimantan Tengah	9.35	9.10	
4	Kalimantan Timur	9.39	9.21	
5	Kalimantan Utara	9.38	9.27	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Realisasi IKU ini telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berhasil melakukan perbaikan kinerja layanannya, baik dalam pelaksanaan tugas Kuasa BUN, Pelayanan Perbendaharaan serta Kinerja dan Tata Kelola. Di sisi lain, penilaian atas Laporan Hasil Pembinaan dari Kantor Pusat cukup optimal dengan memperoleh nilai 9.32 pada semester I dan 9.28 pada semester II. Namun demikian, masih ada ruang optimalisasi yaitu melalui peningkatan nilai dari Kantor Pusat.

Akar permasalahan yang berhasil diidentifikasi, yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan tahun 2021 dilaksanakan beriringan dengan pandemi Covid-19 sehingga sifat pembinaan sangat dinamis.
2. Implementasi peraturan yang baru yaitu Per-24/2019 sehingga perlu penyesuaian dalam pembinaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPPN lingkup Provinsi Kalimantan Barat guna melaksanakan implementasi atas unsur-unsur pembinaan melalui *one on one meeting*, memperdalam analisis laporan, dan meningkatkan kualitas design grafis laporan.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan komunikasi dengan KPPN lingkup Kalimantan Barat dan Koordinasi melalui *one on one meeting*.
2. Koordinasi dan diskusi tematik sinergi dengan seluruh Bidang/Bagian pada kanwil melalui pengisian form ringkasan konsultasi dan fasilitasi
3. Melakukan FGD internal untuk menambah pemahaman atas peraturan-peraturan terbaru.
4. Meningkatkan kualitas desain LHPS

4C
-
CP

Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2021 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2021, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut:

Definisi

- a. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2021 secara tepat waktu (sesuai target dalam Tabel A), dan;
- b. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2021 secara nasional (sesuai target dalam Tabel B).

Tabel A. Tahapan Kegiatan Implementasi SAKTI Tahun 2021

Periode	No	Kegiatan Utama	Target Waktu Pelaksanaan			Bobot (% Tertimbang)
			Mulai	Selesai	Durasi (hari)	
	A	B	C	D	E	F
Semester I	Tahap 1	Penunjukan Trainer SAKTI Modul Penganggaran (mandatory) dan modul lainnya (optional)	01-Jan-21	31-Mar-21	89	3%
	Tahap 2	Penetapan Kelompok Kerja Daerah (Gugus Tugas) persiapan rollout SAKTI	01-Jan-21	31-Mar-21	89	6%
	Tahap 3	Monitoring dan Koordinasi pendampingan transaksi awal dan Migrasi Saldo Awal SAKTI Satker Piloting tahap V	01-Jan-21	30-Jun-21	180	6%
	Tahap 4	Monitoring dan Koordinasi Pendaftaran pengguna SAKTI Satker non piloting	01-Mar-21	30-Jun-21	121	12%
	Tahap 5	Monitoring dan Koordinasi FGD SAKTI KL dengan Kategori Mega (Kemenag, MA, Polri, Kemenkumham) dan DK/TP	01-Apr-21	30-Jun-21	90	8%
	Tahap 6	Publikasi tahap 1 SAKTI	01-Apr-21	30-Jun-21	90	5%
	Tahap 7	Monitoring dan Koordinasi Fasilitasi <i>Change Readiness Survey</i> Satker Non Piloting	01-Apr-21	31-Oct-21	213	7%
Semester II	Tahap 8	FGD atas laporan hasil Monev Implementasi SAKTI Satker Piloting SAKTI Tahap I s.d. V di wilayah kerjanya	01-Jul-21	30-Sep-21	91	5%
	Tahap 9	Workshop/Rakor SAKTI manajerial (Unit wilayah K/L non piloting)	01-Jul-21	30-Sep-21	91	6%
	Tahap 10	Monitoring dan koordinasi EUT SAKTI Satker Non Piloting	01-Jul-21	31-Oct-21	122	20%
	Tahap 11	Publikasi tahap 2 SAKTI	01-Oct-21	31-Dec-21	91	5%
	Tahap 12	Monitoring dan Koordinasi Pemutakhiran data pengguna SAKTI Satker <i>rollout</i>	01-Oct-21	31-Dec-21	91	7%
	Tahap 13	Monitoring dan Koordinasi Pendampingan Pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022	01-Dec-21	31-Dec-21	30	10%
Total					1,388	100%

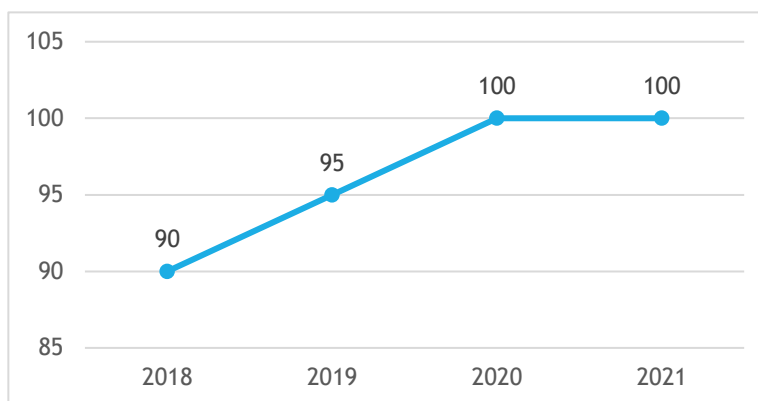
Tabel B. Jumlah satker Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan SAKTI Tahun 2021

No.	Satker	Keterangan
1	Satker Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan PMK Implementasi SAKTI tahun 2021 (di luar satker lingkup Kemenkeu, PPATK, Kemensetneg, KPK, Kemenpan RB, Bappenas, LKPP, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan LPSK)	Untuk implementasi seluruh modul SAKTI

Cara Ukur/ Formula IKU Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2021 dibagi Total Jumlah satker yang ditetapkan mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2021 dikali proporsi tahapan dikali 100%

Target IKU Tahun 2021 Target IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 100, sama dengan target di tahun 2020. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2018-2021 sebagaimana grafik 3.11

Grafik 3.11. Perkembangan Target IKU Tahun 2018-2021



Realisasi IKU Tahun 2021 Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 yaitu 100%. Realisasi ini merupakan penyelesaian seluruh tahapan implementasi SAKTI.

Tabel 3.38. Realisasi Capaian IKU Tahun 2021

No	Proporsi Tahap	Realisasi
1	Tahap 1	3%
2	Tahap 2	6%
3	Tahap 3	6%
4	Tahap 4	12%
5	Tahap 5	8%
6	Tahap 6	5%
7	Tahap 7	7%
8	Tahap 8	5%
9	Tahap 9	6%
10	Tahap 10	20%
11	Tahap 11	5%
12	Tahap 12	7%
13	Tahap 13	10%
Realisasi		100%

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.39 berikut:

Tabel 3.39. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

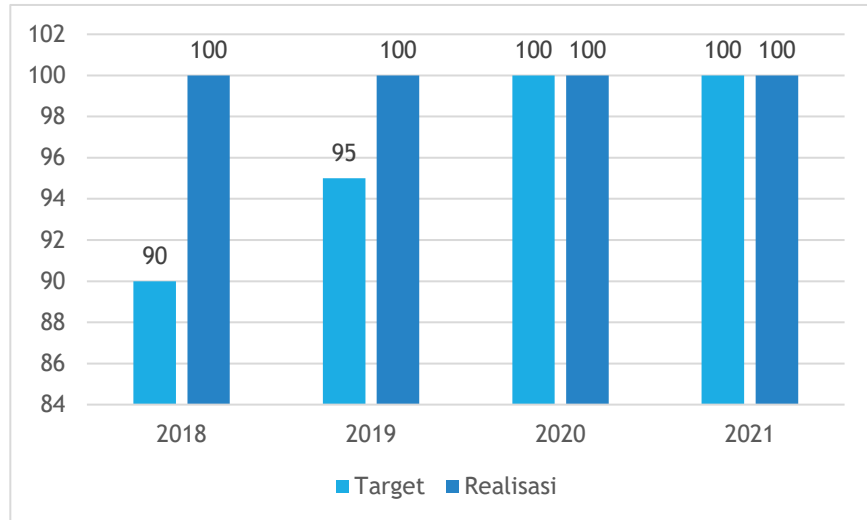
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	13%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	15%	38,65%	38,65%	73,96%	73,96%	100%	100%	
Capaian	115	96,63	96,63	105,66	105,66	100	100	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan capaian sebesar 100.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.12 berikut:

Grafik 3.12. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2018-2020



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, realisasi IKU tahun 2021 sebesar 100% sama dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada 2020 sebesar 100%, 2019 sebesar 100%, dan 2018 sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan capaian memang sudah maksimal.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	100%	100	-		100%
2020	100%	100			100%
2019	100%	105.26		100%	95%
2018	100%	111.11		100%	90%
2017				86%	
2016				75%	
2015				0%	

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat nama IKU yang tercantum adalah "Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI", namun demikian berdasarkan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil tidak tercantum IKU tersebut. Pada tahun 2018 IKU tersebut muncul pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two dengan nama "Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI".

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	100%	100	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	100%	100	-	
2019	100%	105.26	-	
2018	100%	111.11	-	
2017			-	
2016			-	
2015			-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	100%	Tidak terdapat informasi mengenai capaian IKU pada Kanwil lain dalam regional pulau Kalimantan.
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu Utama IKU tersebut adalah Pelaksanaan implementasi SAKTI membutuhkan *Trainer* di semua modul SAKTI sehingga diperlukan Sosialisasi dan transfer *knowledge* bagi petugas Satker baik dari Kanwil maupun dari KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah melakukan publikasi SAKTI Tahap II, monitoring dan koordinasi pemutakhiran data pengguna, dan monitoring dan koordinasi pendampingan pembuatan SPM gaji induk januari tahun 2022.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah berkoordinasi dengan Dit. SITP dan KPPN lingkup provinsi Kalimantan Barat terkait monev tahap-tahapan yang telah dilaksanakan.

Sasaran Strategis 5:

Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah.

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Sasaran strategis ini terdiri atas IKU Persentase Akurasi perencanaan kas sebagai berikut:

Tabel 3.43
Capaian Sasaran Strategis 5

SS5: Pengelolaan Kas yang Optimal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-N	Persentase Akurasi perencanaan kas	82%	100%	120

5a-N

Persentase akurasi perencanaan kas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Definisi

Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi Rencana Penarikan Dana Satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan sebagai penarikan dana yang akurat dalam formulasi akurasi RPD Satker.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Akurasi Perencanaan Kas Kanwil DJPb merupakan rata-rata akurasi perencanaan kas KPPN di wilayah kerjanya.

Cara Ukur/ Formula

100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian per periode)

IKU

Keterangan:

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

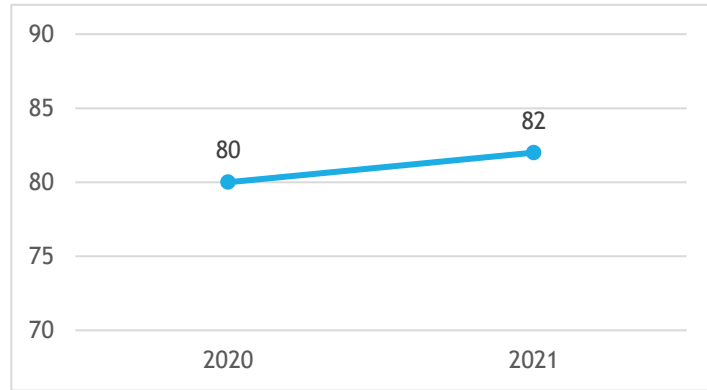
- Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM

- f) Sepanjang belum ada update aplikasi terkait RPD Harian (a.l. SAKTI / SAS / Konversi), deviasi atas pengajuan SPM dengan nilai 1 miliar rupiah sampai dengan 4,9 miliar rupiah dihitung 0%.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 82%. Target tahun 2021 naik sebesar 2% dari target 2020 sebesar 80%. Adapun target IKU dari tahun 2020-2021 sebagaimana grafik 3.13. berikut:

Grafik 3.13. Perkembangan target IKU tahun 2020-2021



Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi ini merupakan rata-rata realisasi pada setiap triwulan dengan realisasi masing-masing 100%.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.44 berikut:

Tabel 3.44. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

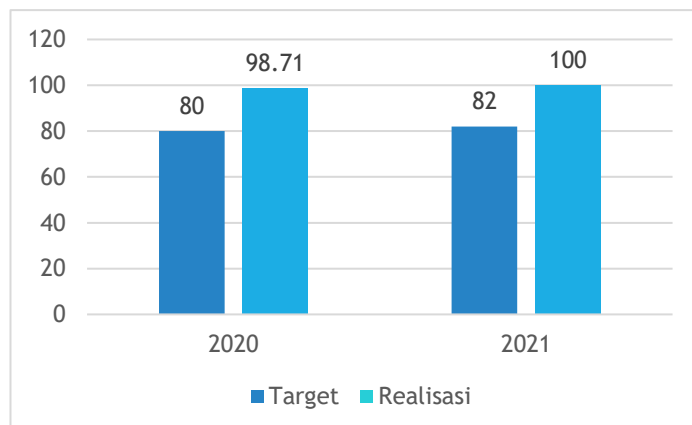
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max/ average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan sebesar 82%, dengan capaian sebesar 120.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.14 berikut:

Grafik 3.14. Realisasi IKU Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2020-2021.



Sebagaimana ditunjukkan pada garfik diatas, Realisasi IKU tahun 2021 mencapai 100% naik 1,29% dari capaian tahun sebelumnya di tahun 2020 sebesar 98.71%.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	100%	120	-		82%
2020	98.71%	120			80%

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	100%	120	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024
2020	98.71%	120		

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	100%	Tidak terdapat informasi mengenai capaian IKU pada Kanwil lain dalam regional pulau Kalimantan.
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Berdasarkan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-147/PB.3/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, maka terkait dengan transaksi yang membutuhkan perencanaan kas berubah dari transaksi 1 Miliar menjadi 5 Miliar, lalu aplikasi disesuaikan tanggal 20 Maret 2021 dimana deviasi dari SPM dibawah 5 miliar diabaikan seperti yang disebutkan dalam ND tersebut bahwa:

- a. KPPN agar tetap memproses SPM bernilai 1 Miliar s.d 4,99 Miliar melalui mekanisme dispensasi dengan cara melakukan input surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-23/PB/2021 tanggal 27 Januari 2021 sebagai dasar dispensasi.
- b. Norma Waktu pengajuan dan update/perubahan masih menggunakan norma waktu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah Melakukan monitoring perencanaan kas setiap KPPN melalui aplikasi OMSPAN dan melakukan koordinasi, konfirmasi, dan pembinaan kepada KPPN serta satker yang terindikasi sering tidak tepat dalam perencanaan penarikan dananya.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah terus melakukan monitoring perencanaan kas pada aplikasi OMSPAN dan melakukan konfirmasi kepada KPPN yang masih terdapat deviasi renkasnya, serta mempertahankan kinerja akurasi perencanaan kas semua KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran Strategis 6:

Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran. Sasaran Strategis ini terdiri atas 2 IKU dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut:

Tabel 3.48.

Capaian Sasaran Strategis 6

SS6: Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	89	94.19	105.83
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	99.32	110.35

6a - CP Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

Definisi

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi

Setiap aspek memiliki beberapa variabel yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan satker K/L.

Jumlah dan rincian variabel untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Cara Ukur/ Formula IKU

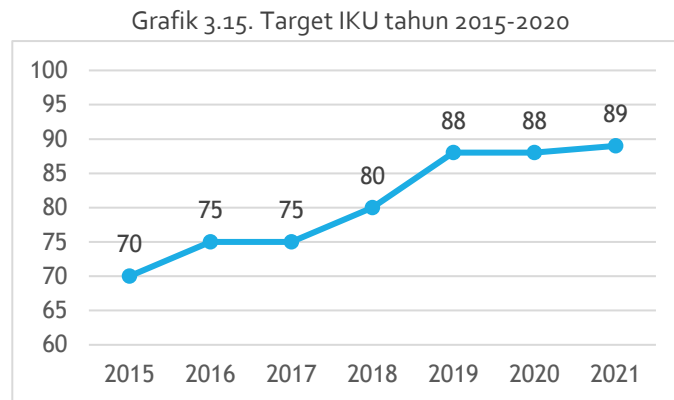
Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OM-SPAN.
Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:
IKPA = $\sum (\text{Bobot} \times \text{Nilai Variabel}) \times 100$

Keterangan:

1. IKPA adalah Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L.
2. Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 89, naik sebesar 1 poin dari target tahun 2020 sebesar 88. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2015-2021 sebagaimana grafik 3.15.



Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 94.19. Realisasi tersebut merupakan rata-rata realisasi dari setiap triwulan. Nilai realisasi IKU diperoleh dari hasil penilaian IKPA pada menu Monev PA Sub menu indikator pelaksanaan anggaran di aplikasi OMSPAN. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I Tahun Anggaran 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output.

Tabel 3.49 Realisasi Kinerja IKU Nilai kinerja pelaksanaan Anggaran K/L masing-masing indikator penilaian

No	Indikator	Realisasi			
		Q I	Q II	Q III	Q IV
1	Revisi DIPA	100	100	99.27	99.95
2	Deviasi Halaman III DIPA	N/A	85.59	83.55	85.55
3	Pagu Minus	100	99.78	100	100
4	Penyerapan Anggaran	100	99.58	100	100
5	Penyelesaian Tagihan	99.94	98.64	99.38	99.24
6	Capaian Output	N/A	64.86	83.44	93.34
7	Retur SP2D	99.58	99.59	99.61	99.64
8	Renkas	100	100	100	100
9	Kesalahan SPM	80	85	85	85
10	Data Kontrak	94	94.72	85	88
11	Pengelolaan UP dan TUP	98	97.27	95	96
12	LPJ Bendahara	99.92	78.24	99.91	99.93
13	Dispensasi SPM	100	100	100	80
Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L		97.64	90.76	93.59	94.78

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.50 berikut:

Tabel 3.50. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	89	89	89	89	89	89	89	Max/ average
Realisasi	97.64	90.76	94.2	93.59	94.00	94.78	94.19	
Capaian	109.71	101.98	105.85	105.16	105.62	106.49	105.83	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 94.19 melampaui target yang ditetapkan sebesar 89, dengan capaian sebesar 105,83. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.51 berikut:

Tabel 3.51. Perbandingan realisasi tahun 2015-20120

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	89	94.19	105.83	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
2020	88	97.53	110.83	
2019	88	94.91	107.85	
2018	80	90.75	113.44	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (K/L)
2017	75	99.47	120	
2016	75	94.47	120	
2015	70	72.31	103	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi IKU tersebut meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, namun mengalami penurunan di tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami kenaikan. Realisasi IKU tersebut di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Ditunjukkan juga bahwa realisasi IKU tersebut dari tahun 2015 sampai dengan 2020 selalu melebihi targetnya, dimana target tersebut terus meningkat meskipun di tahun 2017 sama dengan tahun 2016 dan tahun 2020 sama dengan tahun 2019.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	94.19	105.83	89		89
2020	97.53	110.83	88		88
2019	94.91	107.85		80	88
2018	90.75	113.44		80	80
2017	99.47	120		75	75
2016	94.47	120		75	75
2015	72.31	103		0	70

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas , realisasi dari tahun 2015 s.d. tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	94.19	105.83	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	94.71	105.23	-	
2019	94.40	106.07	-	
2018	93.12	107.03	-	
2017	92.18	108.45	-	
2016	90	112.5	-	
2015	84.35	112.47	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

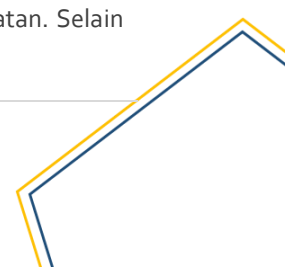
Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.54. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	94.19	Informasi capaian masing-masing Kanwil DJPb di wilayah pulau Kalimantan tidak dapat diperoleh
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Peraturan terkait dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) mengakibatkan perubahan bobot (reformulasi) penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021. Sehingga Triwulan I merupakan periode transisi perubahan penghitungan IKPA, dimana perlu dilakukan penyesuaian bobot indikator kinerja IKPA pada tahun 2021. Selain itu masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal dan dapat ditingkatkan lagi pada tahun anggaran selanjutnya. Adapun indikator yang belum optimal tersebut, yaitu indikator Data Kontrak dan Kesalahan SPM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman satker mengenai batas penyampaian data kontrak ke KPPN sehingga menimbulkan keterlambatan. Selain itu tingkat kesalahan SPM yang diajukan satker juga masih relatif tinggi.



Adapun **tindakan** yang telah dilakukan Kanwil yaitu:

1. Mensosialisasikan formulasi perhitungan IKPA tahun 2021 ke satker mitra kerja.
2. Melakukan monitoring perkembangan nilai IKPA pada aplikasi OM SPAN
3. Melakukan evaluasi dan pembahasan EPA dan IKPA dengan satker terpilih yang masih belum optimal capaian IKPA nya.
4. Bersama Kepala Kanwil melakukan koordinasi (*high level meeting*) ke Pimpinan Satker dan atau pimpinan Koordinator Satker untuk ikut mendorong satker di wilayah kerjanya meningkatkan nilai IKPA

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah melakukan monitoring perkembangan IKPA pada aplikasi OM SPAN dan melakukan evaluasi dan pembahasan EPA dan IKPA dengan satker terpilih yang masih belum optimal capaian IKPA nya setiap bulan.

6b
-N
Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda (SYARAT).
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Definisi

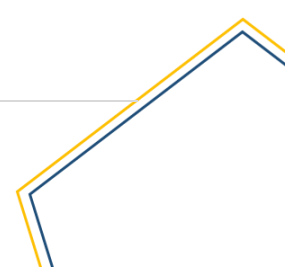
Cara Ukur/ Formula IKU

$$\bar{x} \text{ NKP DDD} = \Sigma [\text{NKP DDD di KPPN}] / \text{Jumlah KPPN}$$

$$\text{NKP DDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + 0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,20 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

Keterangan:

- \bar{x} NKP DDD** adalah rata-rata Nilai Kualitas Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa.
- NKP DDD** adalah Nilai Kualitas Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa.
- SYARAT** adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dih. pengunggahan/upload melalui aplikasi OM-SPAN) dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik oleh pemda per bidang/subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan. Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang per tahap penyaluran (Nilai Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan DAK Fisik) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 2 bulan (60 hr kalender) sebelum batas waktu yang ditentukan.
 95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 bulan (30 hr kalender) sebelum batas waktu yang ditentukan.



90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 1 bulan (30 hari) sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = $\frac{\sum \text{NIKWPDP DAK F}}{\text{Jumlah penyaluran DAK Fisik per bidang per tahap penyaluran yang siap disalurkan}}$.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

PROYEKSI

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PasalKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

% Akurasi = $100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAKDD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

$$\text{Deviasi} = \frac{[(\text{RPD Bulanan} - \text{Realisasi Penyaluran})/(\text{RPD Bulanan})] \times 100\%}{100\%}$$

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode 0%;

90 = deviasi per periode 1 % sd 15%

80 = deviasi per periode 16% sd 30%

0,00 = deviasi per periode di atas 30%.

Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA pada alamat <http://10.242.231.124> dalam bentuk softfile (pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

SSPSPM

adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa dengan lengkap dan benar (bobot: 0,8)
- b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (bobot: 0,2)

$SPPSPM = ((\text{Jumlah tagihan DAKDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tagihan DAKDD yang diproses KPPN}) \times 0,8) + ((\text{Jumlah retur yang diselesaikan tepat waktu} / \text{jumlah total retur}) \times 0,2)$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SPPSPM" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

MONEV

adalah nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan tembusan Koordinator KPA Penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Kantor Pusat. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan portal <http://10.242.231.124> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Kantor Pusat.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis

periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

LK-UAKPA

adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 83/PMK.05/2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

- LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.
- LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
- LK Triwulan III disampaikan pada bulan 15 Oktober TA berjalan
- LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya.
- LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

LK-UAKPA = {(nilai ketepatan waktu x 0,1) + (nilai kelengkapan laporan x 0,9)}

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas (dapat ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK)

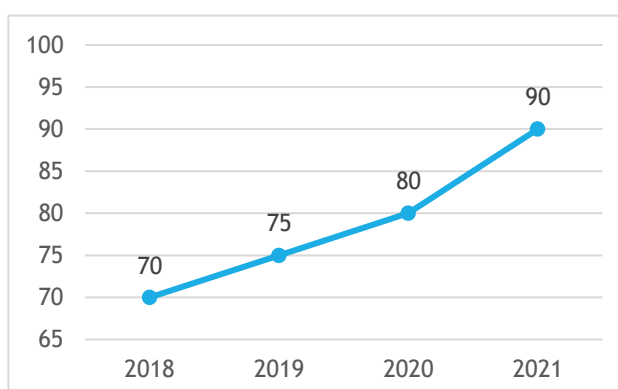
Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 90. Target ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, dimana target tahun 2020 sebesar 80. Adapun target IKU dari tahun 2018-2020 sebagaimana dalam grafik 3.16.

Grafik 3.16. Target IKU Tahun 2018-2020



Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 99.32. Realisasi tersebut merupakan rata-rata hasil penilaian kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

- o Pada triwulan I realisasi sebesar 99.81 berdasarkan Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-271/PB.2/2021 tanggal 5 April 2021 hal Penyampaian Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Triwulan I Tahun 2021.
- o Pada triwulan II realisasi sebesar 99.35 berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-597/PB.2/2021 tanggal 2 Juli 2021 hal Penyampaian Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Triwulan II dan Nilai Kualitas Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK dan Desa Semester I Tahun 2021.
- o Pada triwulan III realisasi sebesar 99.17 berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-869/PB.2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 hal Penyampaian Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Triwulan III Tahun 2021.
- o Pada triwulan IV realisasi sebesar 98.94 berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-4/PB.2/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Penyampaian Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Triwulan IV dan Nilai Kualitas Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK dan Desa Semester II Tahun 2021.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.55 berikut:

Tabel 3.55. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

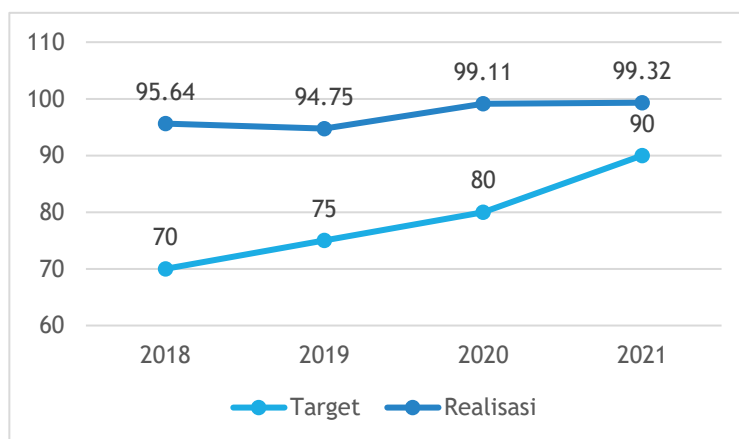
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max/ average
Realisasi	99.81	99.35	99.58	99.17	99.44	98.94	99.32	
Capaian	110.90	110.38	110.64	110.18	110.48	109.93	110.35	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, realisasi tahun 2021 sebesar 99.32 melampaui target yang ditetapkan sebesar 90, dengan capaian sebesar 110.35. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.17 berikut

Grafik 3.17. Realisasi IKU Tahun 2018-2021



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, realisasi IKU tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Ditunjukkan juga bahwa realisasi IKU tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selalu melebihi targetnya, dimana target tersebut terus meningkat setiap tahunnya.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.56 berikut.

Tabel 3.56. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	99.32	110.35	-		90
2020	99.11	120			80
2019	94.75	120		-	75
2018	95.64	120		-	70
2017				-	
2016				-	
2015				-	

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 juga tidak tercantum mengingat IKU ini baru ada di tahun 2018.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	99.32	110.35	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	99.11	120	-	
2019	94.75	120	-	
2018	95.64	120	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	99.32	Apabila diperbandingkan dengan Kanwil DJPb lain di regional pulau Kalimantan maka realisasi IKU pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat terbaik kedua dibawah Kalimantan Utara.
2	Kalimantan Selatan	99.29	
3	Kalimantan Tengah	99.18	
4	Kalimantan Timur	99.31	
5	Kalimantan Utara	99.49	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu utama IKU ini adalah penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan program yang menjadi perhatian nasional, untuk itu perlu koordinasi dan komunikasi dengan KPPN dan Pemda Lingkup Provinsi Kalimantan Barat agar dapat tercapai target penyaluran dan pemenuhan dokumen persyaratan tepat waktu.

Permasalahan yang dapat menghambat kelancaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yaitu masih terdapat desa yang belum siap persyaratan syarat salur pada periode yang ditentukan.

Tindakan yang telah dilakukan Kanwil yaitu:

1. Pelaksanaan FGD secara periodik melibatkan Pemda (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa);
2. Monitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara periodik;
3. Memberikan update informasi terkait peraturan pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa.
4. Melaksanakan *One on One Meeting* dengan Pemda yang masih rendah dalam penyaluran DAK Fisik di Lingkup Prov. Kalbar

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah koordinasi dan komunikasi aktif dengan KPPN dan monitoring penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021.

Sasaran Strategis 7:

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini. Sasaran Strategis ini terdiri atas 2 IKU dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut:

Tabel 3.59
Capaian Sasaran Strategis 7

SS7: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dan Andal	98.1%	100%	102
7b-N	Nilai Kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) Tingkat Wilayah	79	86.29	109.23

7a-N Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dan Andal

Definisi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan. Selanjutnya, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN Bulan Januari s.d. Mei 2016, Kanwil DJPb tidak lagi melakukan rekonsiliasi antara UAPPA-W, namun diwajibkan untuk memantau pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%)

Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja dan Kas di BP (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

- Triwulan I 2021 = Desember 2020 - Februari 2021
- Triwulan II 2021 = Maret - Mei 2021
- Triwulan III 2021 = Juni - Agustus 2021
- Triwulan IV 2021 = September - November 2021

Realisasi IKU pada Kanwil DJPb diukur berdasarkan pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA seluruh satker yang menjadi mitra kerja seluruh KPPN di wilayahnya.

Cara Ukur/ Formula IKU

Capaian IKU:

$$50\% (a/c) + 50\% (b/c)$$

Keterangan:

- a: Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
- b: Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas
- c: Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 100%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target tahun sebelumnya.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi ini merupakan realisasi pada triwulan I, triwulan III, dan triwulan IV tahun 2021, mengingat di triwulan II proses rekon belum dapat dilaksanakan sehingga realisasi N/A.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.60 berikut:

Tabel 3.60. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%	Max/ average
Realisasi	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	102	N/A	102	102	102	102	102	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, realisasi tahun 2021 sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan sebesar 98.1%, dengan capaian sebesar 102. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

IKU tersebut merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	100%	102	-		98.1%

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.62.

Tabel 3.62. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	100%	102	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.63.



Tabel 3.63. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	100%	Tidak terdapat informasi mengenai capaian IKU pada Kanwil lain dalam regional pulau Kalimantan.
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Secara umum realisasi IKU tersebut diatas target yang ditetapkan, namun terdapat kendala yaitu satuan kerja kurang responsif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rekonsiliasi, seperti pagu minus, Transaksi Dalam Konfirmasi, saldo tidak normal, dan lain-lain yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu adanya aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA keluaran terbaru (versi 21.0.0) sehingga satuan kerja mengalami kendala perbedaan data antara aplikasi lama dan aplikasi baru.

Tindakan yang telah dilakukan Kanwil yaitu:

1. Mengundang KPPN (Seksi Vera) untuk mengikuti FGD yang dilaksanakan baik oleh kantor pusat maupun Kanwil DJPb terkait penyusunan laporan.
2. Menjadi narasumber terkait penyusunan laporan keuangan pada Polda Kalbar.
3. Melaksanakan pembinaan UAKBUN D pada KPPN Ketapang.
4. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja agar menatausahakan dokumen sumber atas seluruh transaksi tahun 2021 dalam rangka penyusunan LK Kuasa BUN KPPN lingkup Kanwil tahun 2021.
5. Menjadi narasumber dalam acara "Sosialisasi Rekonsiliasi dan Penyusunan LKKL Semester I Tahun 2021" yang diselenggarakan oleh KPPN Ketapang.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja yaitu melakukan monitoring e-rekon LK dan hasilnya dikomunikasikan dengan KPPN untuk ditidakanjuti dan melakukan pembinaan ke seluruh KPPN dan UAPPA-W khususnya yang mengalami permasalahan pada saat rekonsiliasi.

7b -N
 Nilai Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah

Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil DJPb mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS regional). Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan penilaian.

Definisi

Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 90-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 60-89 (Baik)

Level 2 = 40-59 (Cukup)

Level 1 = <39 (Kurang)

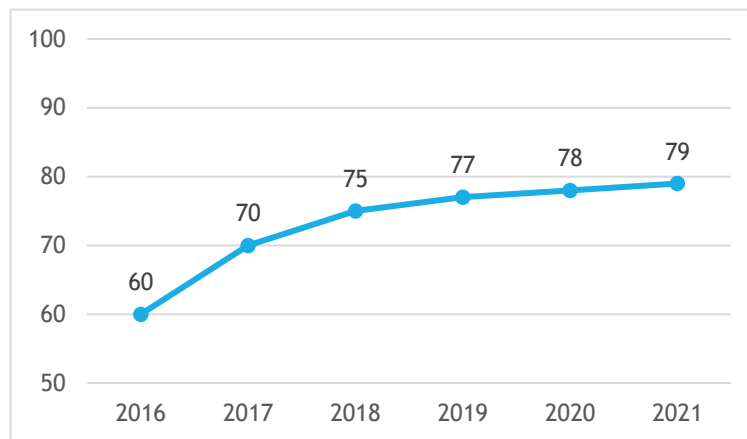
Cara Ukur/ Formula IKU

Hasil penilaian Laporan Government Finance Statistics (GFS) tingkat wilayah oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 79. Target ini mengalami kenaikan 1 poin dari tahun 2020 sebesar 78. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2016-2021 sebagaimana grafik 3.18.

Grafik 3.18. Target IKU Tahun 2016-2020



Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 86.29. Nilai tersebut diperoleh dari nilai akhir sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-286/PB/2021 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Pelaporan 2020. Adapun rincian perolehan nilai dari masing-masing indikator, sebagaimana tabel 3.64 berikut.

Tabel 3.64. Penilaian Laporan GFS

Kualitas Laporan	Ketepatan Waktu	Estetika Penyajian	Partisipasi	Total Nilai
(80%)	(8%)	(2%)	(10%)	86.29
70.29	8.00	1.75	6.25	

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.65 berikut:

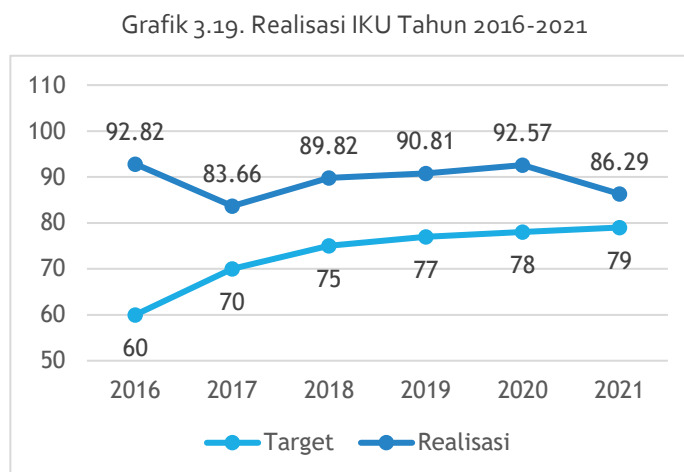
Tabel 3.65. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	79	79	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	86.29	86.29	
Capaian	-	-	-	-	-	109.23	109.23	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, realisasi tahun 2021 sebesar 86.29 melampaui target yang ditetapkan sebesar 79, dengan capaian sebesar 109.23.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.19.



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 86.29. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi tahun 2020 sebesar 92.57. Ditunjukkan juga bahwa realisasi IKU dari tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan tren positif dimana pada tiap tahunnya mengalami peningkatan realisasi, setelah mengalami penurunan pada tahun 2017.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.66.

Tabel 3.66. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	86.29	109.23	-		79
2020	92.57	118.68			78
2019	90.81	117.94		10	77
2018	89.82	119.76		12	75
2017	83.66	119.51		15	70
2016	92.82	120		18	60
2015	4*	120		20	3*

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 tercantum "Peringkat Laporan Government Financial Statistics (GFS)", namun demikian pada Kontrak Kinerja tahun 2015 dilakukan refinement IKU menjadi "Indeks ketepatan waktu Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah", dan selanjutnya dilakukan refinement IKU mulai tahun 2016 menggunakan nama IKU "Nilai Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah". Hal ini dilakukan dalam rangka lebih menggambarkan kualitas IKU.

Perbandingan realisasi dan

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.67.

capaian s.d. 2021
dengan RPJMN

Tabel 3.67. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	86.29	109.23	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	92.57	118.68	-	
2019	90.81	117.94	-	
2018	89.82	119.76	-	
2017	83.66	119.51	-	
2016	92.82	120	-	
2015	4*	120	-	

Perbandingan
Capaian IKU dengan
Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.68.

Tabel 3.68. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	86.29	Apabila diperbandingkan dengan Kanwil DJPb lain di regional pulau Kalimantan maka realisasi IKU pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan realisasi terendah.
2	Kalimantan Selatan	96.21	
3	Kalimantan Tengah	93.12	
4	Kalimantan Timur	96.28	
5	Kalimantan Utara	93.51	

Isu, Permasalahan,
Tindakan, dan
Action Plan

Capaian IKU "Nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas" telah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian nilai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada keakuratan data dan kecepatan waktu penerimaan data. Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas dapat melampaui target berkat adanya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah perihal pertukaran data Laporan Keuangan serta sinergi yang baik dengan seluruh UAPPAAW lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Tingkat partisipasi sebagai salah satu kriteria penilaian Laporan GFS masih rendah sehingga hasil penilaian tidak maksimal. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu periodisasi penyusunan LKPD berbeda dengan periodisasi penyusunan GFS dan Bagan Akun Standar (BAS) Pemda dan Format LKPD berbeda dengan yang berlaku di Pemerintah Pusat sehingga data GFS berisiko tidak akurat. Permasalahan lain yaitu aplikasi keuangan di Pemda belum semuanya terintegrasi.

Tindakan yang telah dilakukan Kanwil yaitu:

1. FGD *One on One Meeting* Strategi Penyusunan LKPD Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan akurasi data LKPD sebagai bahan penyusunan GFS.
2. Membuat forum informasi dan komunikasi melalui whatsapp dengan BKD/BKAD/BPKAD terkait sinergi untuk kecepatan penyampaian data LKPD.
3. Melakukan koordinasi LKPD dengan BPKAD Kabupaten Ketapang.
4. FGD Bersama Tingkatkan Kinerja dalam Meraih dan Mempertahankan Opini WTP.

5. Kegiatan Pemberian Dukungan kepada Pemda Kabupaten Bengkayang dalam Meraih Opini WTP atas LKPD Tahun 2021.
6. Kegiatan Pemberian Dukungan kepada Pemkab Kayong Utara dalam Meraih Opini WTP atas LKPD Tahun 2021.
7. Melaksanakan FGD Penyusunan Laporan *Government Finance Statistics*.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah berkoordinasi dengan seluruh Pemda lingkup Kalimantan Barat agar dapat menyampaikan LKPD secara tepat waktu, ,enginput data LKPD sesuai dengan template Kertas Kerja yang diberikan oleh Dit. APK dan mencermati kesesuaian formula dalam kertas kerja, serta meningkatkan *cross check* data pada saat penyusunan GFS untuk meningkatkan akurasi data

Sasaran Strategis 8:

Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Sasaran Strategis ini terdiri atas 3 IKU dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut:

Tabel 3.69
Capaian Sasaran Strategis 8

SS8: Organisasi dan SDM yang optimal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84	94.42	112.4
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	89.15	107.41
8c-N	Nilai Rata-rata <i>Hard Competency</i> Pegawai	78	90.94	116.58

8a-N
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2021 (70%).
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2020 (30%).

Definisi

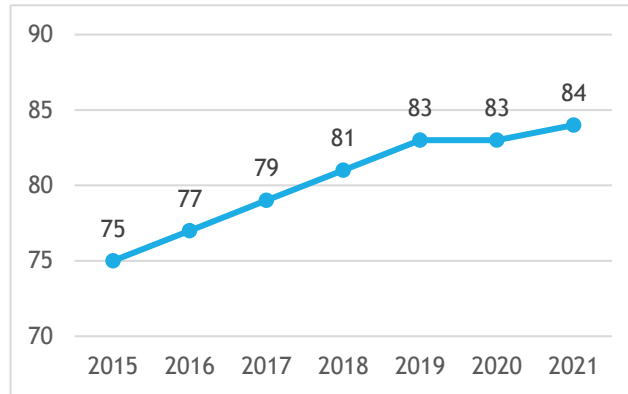
Cara Ukur/ Formula IKU

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 84. Target ini sama dengan target di tahun 2019 dan 2018. Adapun target IKU dari tahun 2016-2020 sebagaimana dalam grafik 3.20.

Grafik 3.20. Target IKU Tahun 2015-2021



Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 94.42. Nilai tersebut diperoleh dari nilai akhir sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-330/PB/2021 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.70 berikut:

Tabel 3.70. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2021

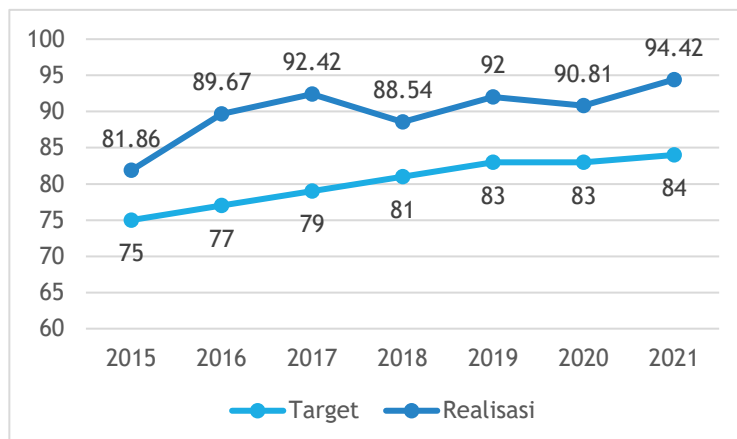
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	84	84	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	94.42	94.42	
Capaian	-	-	-	-	-	112.4	112.4	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 94.42 melampaui target yang ditetapkan sebesar 84, dengan capaian sebesar 112.4.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.21.

Grafik 3.21. Realisasi IKU Tahun 2016-2020



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, realisasi IKU tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan, namun angkanya fluktuatif dari tahun ke tahun.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.71.

Tabel 3.71. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	94.42	112.4	-		84
2020	90.81	109.41			83
2019	92.00	110.84		-	83
2018	88.54	109.31		-	81
2017	92.42	116.99		-	79
2016	89.67	116.45		-	77
2015	81.86	109.15		-	75

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana pada renstra Kanwil 2015-2019. Namun demikian pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil tahun 2015 tercantum nama IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja. Setelah proses refinement nama IKU berubah menjadi "Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis *Strategy Focused Organization*" mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	94.42	112.4	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	90.81	109.41	-	
2019	92.00	110.84	-	
2018	88.54	109.31	-	
2017	92.42	116.99	-	
2016	89.67	116.45	-	
2015	81.86	109.15	-	

**Perbandingan
Capaian IKU dengan
Kanwil DJPb lain**

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.73.

Tabel 3.73. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	94.42	Apabila dibandingkan dengan realisasi IKU pada Kanwil DJPb lain di regional pulau Kalimantan maka realisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat adalah yang tertinggi.
2	Kalimantan Selatan	86.92	
3	Kalimantan Tengah	84.19	
4	Kalimantan Timur	89.52	
5	Kalimantan Utara	94.24	

**Isu, Permasalahan,
Tindakan, dan
Action Plan**

Isu utama yang menjadi tantangan pencapaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*, antara lain ketertiban administrasi pengelolaan kinerja menjadi bagian penting dalam penilaian pengelolaan kinerja dari Kantor Pusat, dan pembinaan kepada KPPN terkait penyusunan, cara penyajian, dan kelengkapan dokumen pada laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Akar permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu adanya mutasi beberapa pejabat/pegawai pengelola kinerja pada lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

Tindakan yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil.
2. Pengelola Kinerja Kanwil dan KPPN mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja se-wilayah Kalimantan dengan narasumber dari Kantor Pusat.
3. Pelaksanaan Bincang Santai Pengelolaan Kinerja dengan nama kegiatan Ngopi LOK (Ngobrol Pinggiran Pengelolaan Kinerja)
4. Pembinaan pengelolaan kinerja KPPN melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja yaitu:

1. Melaksanakan seluruh *action plan* yang tercantum dalam matriks langkah-langkah peningkatan pengelolaan kinerja dari Kantor Pusat dan mendokumentasikannya secara baik.
2. Meningkatkan kualitas Laporan Capaian Kinerja melalui penyusunan format IIAA yang berkualitas

**8b-
N
Nilai Hasil
Evaluasi
Pelaksanaan
Tugas
Kepatuhan
Internal**

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal .

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Definisi

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

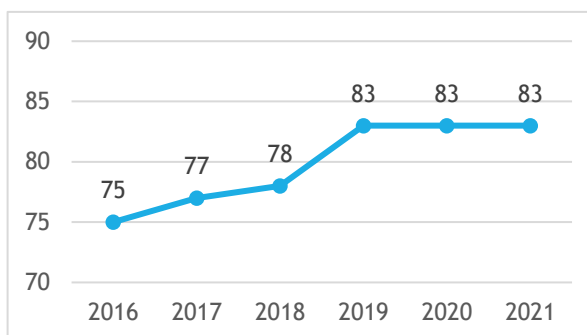
1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)

- Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Cara Ukur/ Formula IKU Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan.

Target IKU Tahun 2021 Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 83. Target ini sama dengan target di tahun 2020. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2016-2021 sebagaimana grafik 3.22.

Grafik 3.22. Target IKU Tahun 2016-2020



Realisasi IKU Tahun 2021 Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 89.15. Nilai tersebut diperoleh dari nilai akhir sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbandaharaan Nomor KEP-324/PB/2021 tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbandaharaan Tahun 2021.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.74 berikut:

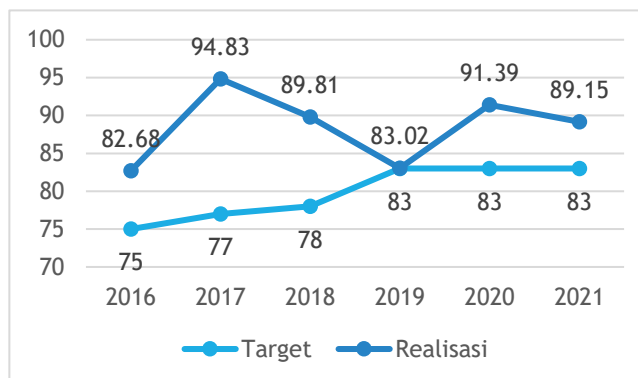
Tabel 3.74. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	83	83	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89.15	89.15	
Capaian	-	-	-	-	-	107.41	107.41	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, realisasi tahun 2021 sebesar 89.15 melampaui target yang ditetapkan sebesar 83, dengan capaian sebesar 107.41.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.23.

Grafik 3.23. Realisasi IKU Tahun 2016-2020



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, realisasi IKU tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2017 mengalami peningkatan, lalu di tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan dan di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan, namun realisasi di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ditunjukkan juga bahwa realisasi IKU tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 selalu melebihi targetnya, dimana target tersebut terus meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan target yang sama.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.75.

Tabel 3.75. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	89.15	107.41	-		83
2020	91.39	110.11			83
2019	83.02	100.02		80	83
2018	89.81	115.14		80	78
2017	94.83	120		80	77
2016	82.68	110.24		80	75
2015	-	-		80	-

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada renstra Kanwil 2015-2019 nama IKU yang tercantum adalah "Nilai rata-rata hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern". Sedangkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil tahun 2015 nama IKU yang tercantum adalah "Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern". Namun demikian pada tahun 2016 dan seterusnya, setelah refinement nama IKU menjadi Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.76.



Tabel 3.76. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	89.15	107.41	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	91.39	110.11	-	
2019	83.02	100.02	-	
2018	89.81	115.14	-	
2017	94.83	120	-	
2016	82.68	110.24	-	
2015	-	-	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.77.

Tabel 3.77. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	89.15	Apabila dibandingkan dengan realisasi IKU pada Kanwil DJPb lain di regional pulau Kalimantan maka realisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan yang terendah.
2	Kalimantan Selatan	94.02	
3	Kalimantan Tengah	90.68	
4	Kalimantan Timur	94.69	
5	Kalimantan Utara	94.49	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu utama IKU ini adalah nilai hasil penerapan manajemen risiko yang masih rendah.

Akar permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Formalitas tahapan dalam pemantauan yang tidak lengkap seperti: Kertas kerja pemantauan yang tidak lengkap dicetak dan dilampirkan dalam laporan;
2. Terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan seperti rapat membahas isu risiko di luar rapat DKO.
3. Belum dilaksanakan pengujian kepatuhan diluar pemantauan pengendalian intern dan pemantauan Kode Etik.
4. Publikasi pelaksanaan tugas KI yang kurang

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi penyampaian laporan ke Kantor Pusat
2. Berkoordinasi dengan Kantor Pusat selaku UKI E-1 maupun KPPN selaku UKI-P

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja yaitu meningkatkan kualitas dan efektivitas tugas KI serta peningkatan komunikasi dengan Kantor Pusat dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan KPPN termasuk pengamanan persepsi laporan dan pelaksanaan tugas KI.

Definisi

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil DJPb terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai.

8c-
N

Nilai Rata-
Rata *Hard
Competency*
Pegawai

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes *hard competency* namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (*Not Available*). Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

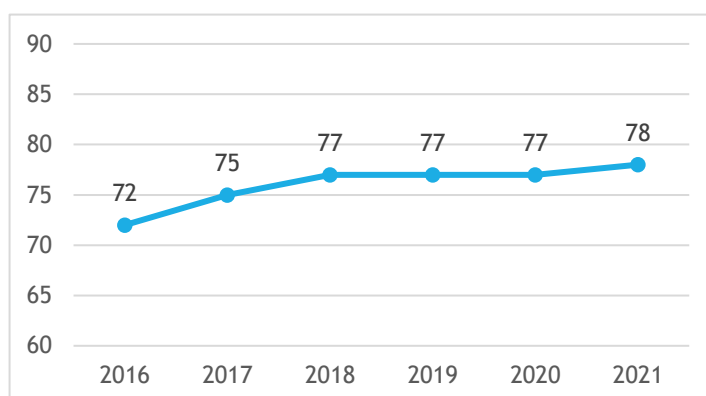
**Cara Ukur/ Formula
IKU**

Jumlah nilai *hard competency* pegawai kanwil dibagi Jumlah pegawai kanwil yang mengikuti tes *hard competency*.

**Target IKU Tahun
2021**

Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 78. Target ini naik 1 poin dari target 2020 sebesar 78. Adapun target IKU dari tahun 2016-2021 sebagaimana dalam grafik 3.24.

Grafik 3.24. Target IKU Tahun 2016-2021



**Realisasi IKU Tahun
2021**

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 90.94. Adapun hasil ini berasal dari rata-rata nilai pegawai yang mengikuti tes *hard competency* sebanyak 17 pegawai dengan total nilai 1.546.

**Perbandingan
realisasi dan target
IKU Tahun 2021**

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.78 berikut:

Tabel 3.78. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

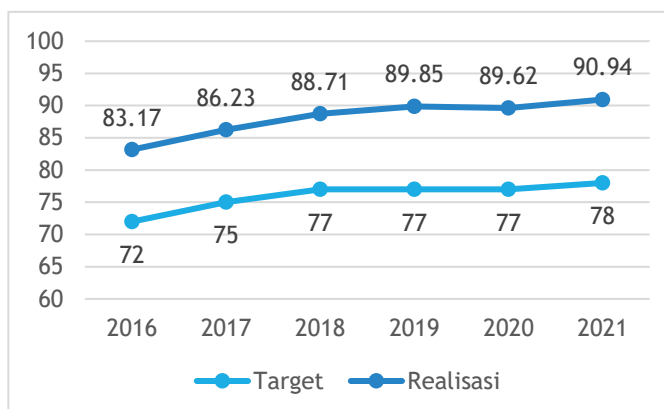
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	78	78	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	90.94	90.94	
Capaian	-	-	-	-	-	116.58	116.58	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, realisasi tahun 2021 sebesar 90.94 melampaui target yang ditetapkan sebesar 78, dengan capaian sebesar 116.58.

**Perbandingan
realisasi tahun 2021
dan tahun-tahun
sebelumnya**

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.25.

Grafik 3.25. Realisasi IKU Tahun 2016-2021



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik, realisasi IKU tersebut menunjukkan tren positif, dimana realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2020 realisasi IKU ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Ditunjukkan juga bahwa realisasi IKU tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu melebihi targetnya.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.79.

Tabel 3.79. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	90.94	116.58	-		78
2020	89.62	116.39			77
2019	89.85	116.69		-	77
2018	88.71	115.21		-	77
2017	86.23	114.97		-	75
2016	83.17	115.51		-	72

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Demikian halnya pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019, karena IKU ini baru tercantum pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil mulai tahun 2016.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.80.

Tabel 3.80. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	90.94	116.58	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	89.62	116.39	-	
2019	89.85	116.69	-	
2018	88.71	115.21	-	
2017	86.23	114.97	-	
2016	83.17	115.51	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.81.

Tabel 3.81. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	90.94	Informasi realisasi IKU pada Kanwil DJPb lain di regional pulau Kalimantan tidak dapat diperoleh.
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Secara umum realisasi IKU tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, namun masih dapat dioptimalkan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu pegawai kurang mendapat arahan dan bimbingan dari atasan langsungnya dan pegawai belum memahami secara menyeluruh tugasnya serta keengganan/ kurang minatnya dan tidak ada/kurang waktu dari masing-masing pegawai untuk belajar tuisi/materi teknis dari unit kerja lain.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan GKM internal, *knowledge sharing*, serta *coaching* dan *counseling* terkait tuisi masing-masing.
2. Mengusulkan diklat agar dapat meningkatkan *hard competency* pegawai.
3. Mendorong pelaksana untuk selalu mempelajari peraturan terkait tugas dan fungsi masing-masing.
4. Menugaskan para atasan langsung untuk memberikan bimbingan kepada masing-masing bawahan.
5. Mendistribusikan bank soal yang diperoleh dari soal HC dan sumbangan soal-soal dari masing-masing bagian/bidang

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:

1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui sharing pengetahuan dengan sarana GKM secara rutin.
2. Memberikan penawaran peningkatan kompetensi melalui *open access*-Diklat KLC kepada seluruh pegawai

Sasaran Strategis 9:

Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi. Sasaran Strategis ini terdiri atas 3 IKU dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut:

Tabel 3.82

Capaian Sasaran Strategis 9

SS9: Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel.				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil	95.5%	97.54%	102.14
9b-N	Nilai Kualitas LK Tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82	88.79	108.28
9c-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN	100%	108.82%	108.82

9a-CP

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Definisi

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Cara Ukur/ Formula IKU

Perhitungan realisasi IKU:

Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September

Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 95.5%. Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula penghitungan yang mendasar sehingga tidak dapat diperbandingkan

Realisasi IKU Tahun 2021 Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 97,54% yang merupakan rata-rata realisasi setiap triwulan.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.83 berikut:

Tabel 3.83. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	Max/ TLK
Realisasi	100%	99.72%	99.72%	99.06%	99.59%	97.54%	97.54%	
Capaian	104.71	104.42	104.42	103.73	104.29	102.14	102.14	

Sebagaimana tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 97,54% melampaui target yang ditetapkan sebesar 95,5%, dengan capaian sebesar 102,41.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula penghitungan yang mendasar sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.84.

Tabel 3.84. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	97.54%	102.41	-	-	95.5%
2020	98.16%	103.33	-	-	95%
2019	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana pada renstra Kanwil 2015-2019. Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula penghitungan yang mendasar sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.85.

Tabel 3.85. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	97.54%	102.41		Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	98.16%	103.33	-	
2019	-	-	-	
2018	-	-	-	
2017	-	-	-	
2016	-	-	-	
2015	-	-	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.86.

Tabel 3.86. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	97.54%	Informasi realisasi pada Kanwil DJPb lain tidak dapat diperoleh.
2	Kalimantan Selatan	-	
3	Kalimantan Tengah	-	
4	Kalimantan Timur	-	
5	Kalimantan Utara	-	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu Utama IKU ini adalah adanya revisi yang pengajuannya ke DJA sehingga nilai indikator Halaman III DIPA belum maksimal.

Permasalahan yang dihadapi yaitu adanya revisi atas optimalisasi anggaran ABW Kantor.

Tindakan yang telah dilakukan yaitu memaksimalkan nilai indikator-indikator IKPA yang ada dengan cara koordinasi dan evaluasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Bendahara Pengeluaran khususnya agar target bisa dicapai.

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja yaitu:

1. Pada setiap minggu terakhir setiap bulan akan dilakukan monitoring semua komponen IKPA dan apabila masih belum tercapai diperlukan koordinasi antara Bendahara, Pejabat PBJ dan Pejabat Perbendaharaan untuk memenuhi IKPA yang maksimal.
2. Koordinasi dengan Bidang Teknis untuk menjaga target persentase realisasi dan Rencana Penarikan Dana

Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan ke UAPA-E1 dan UAPPB-W menyampaikan laporan kepada UAPB-E1 secara periodik. Berdasarkan laporan yang disampaikan tersebut,

9b-
N

Nilai Kualitas
LK Tingkat
UAPPA-W
dan UAPPB-
W

Sekretariat DJPb selaku UAPA-E1 dan UAPB-E1 melakukan penilaian yang dituangkan dalam Kepdirjen Perbendaharaan tentang Penilaian LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb .

Adapun kriteria penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB meliputi:

- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- keakuratan data laporan keuangan
- kepatuhan pelaksanaan anggaran
- Penyajian Laporan Keuangan
- Beban Kerja
- Partisipasi
- Laporan BMN

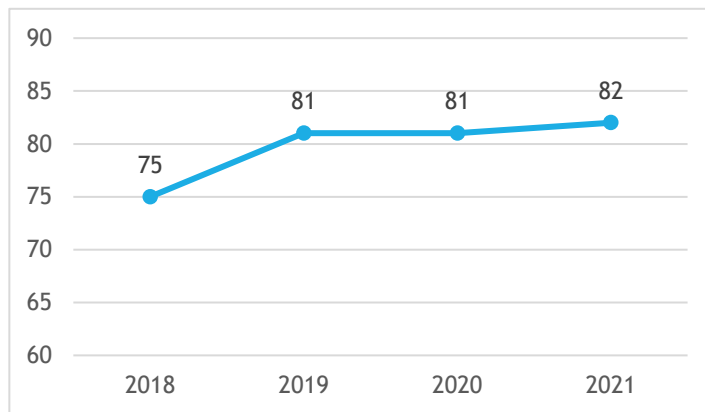
Cara Ukur/ Formula
IKU

Nilai kualitas LK tingkat UAPPAW dan UAPPB-W.

Target IKU Tahun
2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 82. Target ini naik 1 poin dari target 2020 sebesar 81. Adapun target IKU dari tahun 2016-2021 sebagaimana dalam grafik...

Grafik 3.26. Target IKU Tahun 2018-2021



Realisasi IKU Tahun
2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 88.79. Nilai ini diperoleh dari nilai akhir sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-257/PB/2021 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020.

Perbandingan
realisasi dan target
IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.87 berikut:

Tabel 3.87. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

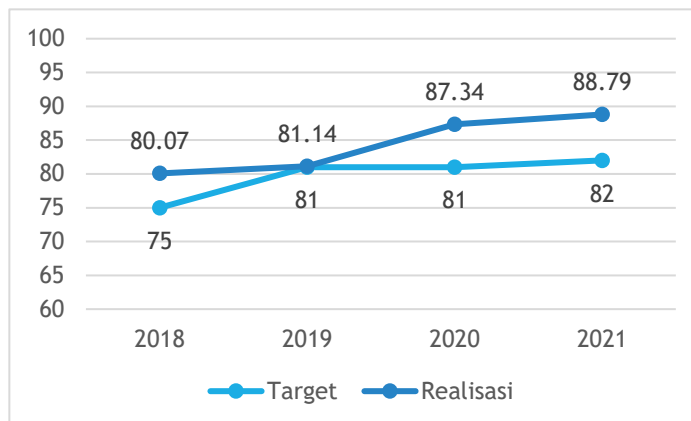
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	82	82	Max/ TLK
Realisasi						88.79	88.79	
Capaian						108.28	108.28	

Sebagaimana tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 88.79 melampaui target yang ditetapkan sebesar 82, dengan capaian sebesar 108.28.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik 3.27.

Grafik 3.27 Realisasi IKU Tahun 2018-2021



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik, realisasi IKU tersebut menunjukkan tren positif, dimana realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditunjukkan juga bahwa realisasi IKU tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu melebihi targetnya, dimana target terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2020 dimana target sama dengan tahun 2019 sebesar 81.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.88.

Tabel 3.88. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	88.79	108.28	-		82
2020	87.34	107.83			81
2019	81.14	100.17		-	81
2018	80.07	106.76		-	75
2017	-	-		-	-
2016	-	-		-	-
2015	-	-		-	-

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana pada renstra Kanwil 2015-2019.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.89.

Tabel 3.89. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	88.79	108.28	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	87.34	107.83	-	
2019	81.14	100.17	-	
2018	80.07	106.76	-	
2017	-	-	-	
2016	-	-	-	
2015	-	-	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.90.

Tabel 3.90. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	88.79	Apabila diperbandingkan dengan Kanwil DJPb lain di regional pulau Kalimantan maka realisasi IKU pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan realisasi terendah.
2	Kalimantan Selatan	93.65	
3	Kalimantan Tengah	90.10	
4	Kalimantan Timur	89.90	
5	Kalimantan Utara	95.50	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu utama IKU ini adalah nilai Kualitas LK Tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb merupakan IKU Tahunan didasarkan pada Penilaian LK Tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2020 yang masih dalam tahap UNAUDITED. Beberapa permasalahan diantaranya adanya pengeluaran terkait penanganan COVID-19 tidak dibebankan pada akun COVID-19 (UAKPA KPPN Sanggau, Singkawang, dan Ketapang), Pagu minus (UAKPA KPPN Singkawang) dan Perbaikan Data Revaluasi Aset (UAKPA Kanwil DJPb Kalbar)

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Masih belum tertibnya satker yang dibawah UAKPA-W dalam meningkatkan status erekon LK menjadi BAR siap download
- Masih belum telitinya operator dalam menginput data keuangan sehingga masih terdapat TDK pada erekon LK
- Masih terdapat satker yang melakukan buka periode GLP pada aplikasi sakti setelah proses rekonsiliasi. Buka priod setelah rekonsiliasi dapat menyebabkan terjadi perbedaan data sakti dan e rekon.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

- UAKPA-W telah meminta satker KPPN (Pontianak, Singkawang, Sintang, Putussibau) untuk menindaklanjuti permasalahan: Meningkatkan status rekon menjadi BAR Siap Download
- UAKPA-W telah meminta KPPN Sanggau untuk melakukan koreksi kode satker untuk pendapatan pajak dan telah dikoreksi

3. Kanwil dan KPPN tidak akan melakukan buka GLP pada aplikasi sakti setelah rekonsiliasi kecuali atas ijin kantor pusat
4. Pelaksanaan movev dan pembinaan pengelolaan keuangan dan BMN pada KPPN Singkawang dan Sintang

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pergerakan data LK UAKPA dan LK BMN pada aplikasi e-rekon&LK tahun 2021;
2. Penyelenggaraan rakor penyusunan LK UAKPA/UAPPA-W lingkup Kanwil Kalimantan Barat.

9c-
N

Tingkat
Kualitas
Pengelolaan
BMN

Definisi

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2021 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, Penertiban administrasi rumah negara dan digitalisasi pengelolaan BMN. IKU ini diukur melalui beberapa komponen yakni:

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan, persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan, persentase pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan, dan Persentase pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan. Realisasi pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan diukur ketika penyampaian usulan pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan dari satuan kerja kepada Unit Eselon I yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Realisasi penggunaan dan pemanfaatan diukur ketika satuan kerja mengajukan usulan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kepada Unit Eselon I atau Pengelola Barang yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Rencana penggunaan yang diukur selain rencana Penggunaan BMN untuk digunakan sendiri sesuai tugas dan fungsi.

2. Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN

Penyusunan RP4 BMN dilaksanakan untuk mewujudkan Perencanaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang terarah. RP4 BMN meliputi Rencana Penggunaan, Rencana Pemanfaatan, Rencana Pemindahtanganan, dan Rencana Penghapusan. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan BMN diperlukan agar tersedianya waktu yang cukup dan optimal dalam penelitian dan reviu atas usulan Perencanaan BMN untuk dapat dihasilkan Perencanaan yang efektif dan efisien. Penyampaian RP4 BMN setiap Unit Eselon I kepada Biro Madan. Target waktu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Pengguna Barang sesuai dengan KMK nomor 855/KM.1/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Persentase penyelesaian penertiban rumah negara

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel, serta sejalan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Periode 2020-2024. Penertiban Rumah Negara meliputi tiga aspek yaitu: (1) Aspek Administrasi, (2) Aspek Hukum, dan (3) Aspek Fisik. Implementasi kegiatan tahun 2020 Penertiban Rumah Negara dari Aspek Administrasi ini adalah penyelesaian kelengkapan administrasi yang meliputi Surat Keputusan Penetapan Status Golongan (PSG) Rumah Negara, Penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara.

Realisasi PSG diukur pada saat draft penetapan status golongan rumah negara disampaikan kepada Biro Hukum (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan penetapan oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan).

Realisasi HDNo diukur pada saat Unit Eselon I/Biro Umum maupun pejabat yang ditunjuk mendaftarkan rumah negara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang):

- a. Direktur Bina Penataan Bangunan untuk rumah negara yang terletak di wilayah JABODETABEK;
- b. Direktur Bina Penataan Bangunan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara di provinsi untuk rumah negara yang terletak di luar wilayah

4. Persentase Completeness Master Aset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting perannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring.

Profil BMN yang yang perlu dilengkapi untuk Rumah Negara yaitu:

- a. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan),
- b. foto,
- c. dokumen berupa SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada)
- d. batas dan GPS,
- e. fasilitas, dan
- f. konstruksi.

5. Persentase jumlah tindak lanjut terhadap BMN Dihentikan Penggunaannya

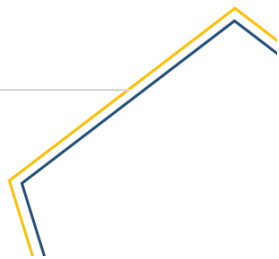
Biro Manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan selaku Pengguna Barang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu Barang Milik Negara dijual, maka Barang Milik Negara tersebut akan diserahkan kepada pembeli Barang Milik Negara setelah pembeli menyetorkan harga Barang Milik Negara yang bersangkutan tersebut ke Kas Negara. Penghapusan merupakan tindakan administratif dari Barang Milik Negara yaitu mengeluarkan data Barang Milik Negara dari catatan yang dibuat. Sehingga tidak terlihat lagi di dalam neraca. IKU diukur dari data BMN yang dihentikan penggunaannya berdasarkan Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited.

6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan

Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam rangka melaksanakan optimalisasi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor ND-325/PB.1/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Rekomendasi pelaksanaan Optimalisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle. Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan dikeluarkannya produk pengelolaan bmn berupa usulan/persetujuan yang menjadi kewenangan pengguna barang.

7. Indeks Kepatuhan Pengisian RUP



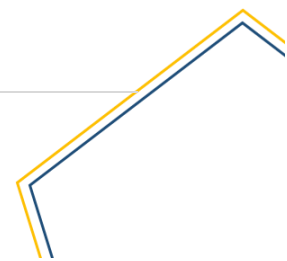
Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Salah satu informasi yang terdapat pada RUP adalah rencana pelaksanaan pengadaan. Informasi rencana pelaksanaan pengadaan akan membantu rencana penganggaran Kementerian. Oleh karena itu, satuan kerja wajib untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikembangkan oleh LKPP sebelum dilakukan pelaksanaan pengadaannya. Bagian Perencanaan melakukan pemantauan terhadap pengumuman RUP yang dilakukan satuan kerja. Standar ketentuan pengisian RUP dari LKPP yakni paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Sehingga fokus pemantauan yang dilakukan yaitu kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki belanja modal dan belanja barang tahun anggaran 2022. Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang menjadi target pengisian RUP berdasarkan pada Nota Dinas dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan setelah penetapan pagu alokasi anggaran Tahun 2022.

Cara Ukur/ Formula
IKU

Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN diukur dari beberapa komponen yakni:

1. Kesesuaian pelaksanaan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan	
a. Persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan (target: 100%)	
Realisasi a =	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan sewa BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana pemanfaatan}} \times 100\%$
b. Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan (target: 100%)	
Realisasi b =	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penggunaan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana penggunaan}} \times 100\%$
c. Persentase Pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan (target: 100%)	
Realisasi c =	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan pemindahtanganan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana pemindahtanganan}} \times 100\%$
d. Persentase Pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan (target: 70%)	
Realisasi d =	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penghapusan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana penghapusan}} \times 100\%$
Realisasi 1 =	$\frac{\text{Realisasi a} + \text{Realisasi b} + \text{Realisasi c} + (\text{Realisasi d} / 70\%)}{4^*} \times 100\%$
*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki rencana penghapusan maka realisasi 1 diukur dengan formula (realisasi a+realisasi b)/2 x 100%	

2. Persentase ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN (target 100%)	
Tabel indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN Tahun 2022 s.d 2024	
Waktu Penyampaian	Indeks realisasi
Lebih cepat dua hari dan seterusnya	120%
Lebih cepat sehari	110%
Tepat waktu	100%
Terlambat satu hari	90%
Terlambat dua hari dan seterusnya	80%
3. Persentase Penyelesaian Penertiban Rumah Negara (target 65%)	
Realisasi PSG =	$\frac{\text{Jumlah Pengajuan PSG}}{\text{Jumlah Rumah Negara}} \times 70\%$
Realisasi HDNo=	$\frac{\text{Jumlah Pengajuan HDNo}}{\text{Jumlah Rumah Negara}} \times 30\%$
Realisasi 3 =	$\frac{\text{Realisasi PSG} + \text{Realisasi HDNo}}{65\%}$
4. Persentase <i>Completeness</i> Master Aset (target : 100%)	
Persentase profil yang telah diisi lengkap =	$\frac{\text{Jumlah Profil Master Aset Rumah Negara yang diisi lengkap}}{\text{Jumlah Profil Master Aset Rumah Negara}} \times 100\%$
5. Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya (target 100%)	
Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya =	$\frac{\text{jumlah nilai perolehan BMN yang dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited yang ditindaklanjuti dengan usulan pemindahtanganan / penghapusan}}{\text{jumlah nilai perolehan BMN dihentikan penggunaan yang tercantum pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited}} \times 100\%$
6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi <i>Idle</i> Kementerian Keuangan (target 100%)	
Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan =	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle}} \times 100\%$
7. Persentase Kepatuhan Pengisian RUP (target: 100%)	
Persentase kepatuhan Pengisian RUP=	$\frac{\text{Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang Menjadi Target}} \times 100\%$



Realisasi IKU :	
Semester I =	Realisasi 1 + Realisasi 3 + Realisasi 4 + Realisasi 5 + Realisasi 6
	5**
Semester II =	Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3 + Realisasi 4 + Realisasi 5 + Realisasi 6 + Realisasi 7
	7**
**: disesuaikan dengan jumlah komponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu komponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah komponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki target PNBPN maka realisasi IKU diukur dengan formula (realisasi 1+ realisasi 3 + realisasi 4)/3 x 100%	
Catatan : Realisasi maksimal setiap komponen adalah 120%	

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula penghitungan yang mendasar sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 108.82%. Nilai ini diperoleh dari nilai akhir sesuai Nota Dinas Nomor ND-104/PB.1/2022 tanggal 7 Januari 2022 hal Penyampaian Nilai Capaian IKU "Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN" Tahun 2021 Satker Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.91 berikut:

Tabel 3.91. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/ KP
Target	-	30%	30%	-	30%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	-	48.58%	48.58%	-	48.58%	108.82%	108.82%	
Capaian	-	120	120	-	120	108.82	108.82	

Sebagaimana tabel diatas, realisasi tahun 2021 sebesar 108.82% melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan capaian sebesar 108.82.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula penghitungan yang mendasar sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.92.

Tabel 3.92. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	108.82%	108.82	-		100%
2020	98.41%	106.97	-		92%
2019	-	-		-	-
2018	-	-		-	-
2017	-	-		-	-
2016	-	-		-	-
2015	-	-		-	-

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana pada renstra Kanwil 2015-2019. Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula penghitungan yang mendasar sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2020 dengan RPJMN

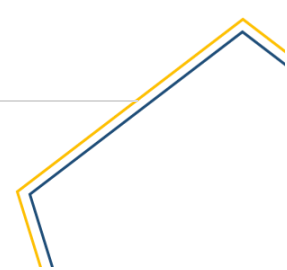
Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.93.

Tabel 3.93. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	108.82%	108.82		Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024 dan 2015-2019
2020	98.41%	106.97	-	
2019	-	-	-	
2018	-	-	-	
2017	-	-	-	
2016	-	-	-	
2015	-	-	-	

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.94.



Tabel 3.94. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	108.82%	Apabila dibandingkan dengan realisasi IKU pada Kanwil DJPb lain maka realisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan tertinggi kedua setelah Kalimantan Selatan.
2	Kalimantan Selatan	109.05%	
3	Kalimantan Tengah	108.45%	
4	Kalimantan Timur	104.29%	
5	Kalimantan Utara	106.67%	

Isu, Permasalahan, Tindakan, dan Action Plan

Isu utama IKU ini adalah penyelesaian tujuh indikator dalam penilaian IKU tingkat kualitas pengelolaan BMN membutuhkan proses yang variatif.

Permasalahan yang dihadapi yaitu perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan RP4 (terkait penyesuaian perencanaan dan penyelesaian) antara lain pengalihan status mess dari gedung kantor menjadi mess dan penyelesaian penghapusan mobil dan motor dan terdapat permasalahan dalam migrasi permasalahan dalam migrasi interkoneksi antara SIMAN dan SAKTI sehingga perlu koordinasi dengan kantor pusat.

Tindakan yang telah dilakukan yaitu:

1. Telah dilakukan penyesuaian atas RP4 terkait dengan perkembangan kebutuhan perencanaan BMN di Tahun Anggaran 2021.
2. Koordinasi dengan Kantor Pusat terkait permasalahan interkoneksi antara SIMAN dan SAKTI

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah penyelesaian penghapusan Motor dan Mobil.

Sasaran Strategis 10:

Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal

Sistem informasi dan teknologi yang andal adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (resources) keuangan menjadi hasil keluaran (output) real time data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sasaran Strategis ini terdiri atas satu IKU dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut:

Tabel 3.95
Capaian Sasaran Strategis 9

SS9: Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal.				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	100%	120

10a-N

Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.

IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi mengukur tingkat penerapan keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tentang Kebijakan SMKI di lingkungan DJPb.

Definisi

Pengukuran dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan checklist kegiatan Rencana SMKI di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN yang didukung dengan dokumentasi sebagai bukti dukung telah dilaksanakannya kegiatan keamanan informasi di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN. Summary Checklist Rencana SMKI sebagaimana dalam tabel berikut ini :

No	Komponen Pengendalian	Jumlah Checklist	UIC
1	Pengendalian Kebijakan Keamanan Informasi	1	Bidang SKKI
2	Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi	1	Bidang SKKI
3	Pengendalian Keamanan Sumber Daya Manusia	1	Bagian Umum
4	Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi	1	Bagian Umum dan Bidang SKKI
5	Pengendalian Akses	1	Bidang SKKI
6	Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan	2	Bagian Umum
7	Pengendalian Keamanan Komunikasi	1	Bidang SKKI
8	Pengendalian Hubungan Dengan Pihak Ketiga/ Pemasok	1	Bagian Umum
Total		9	

Cara Ukur/ Formula IKU

$$X = \left(\frac{\sum \text{Checklist Rencana SMKI lingkup Kanwil DJPb yang selesai dilaksanakan}}{\sum \text{Target Checklist Rencana SMKI lingkup Kanwil}} \right) \times 100\%$$

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 80%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target tahun sebelumnya.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU tersebut tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi ini merupakan penyelesaian seluruh checklist rencana SMKI tahun 2021. Realisasi Semester I diperoleh berdasarkan hasil capaian sesuai Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-858/PB.8/2021 tanggal 5 Juli 2021 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Semester I Tahun 2021 realisasi semester II diperoleh berdasarkan hasil capaian sesuai Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-48/PB.8/2022 tanggal 6 Januari 2022 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Periode Semester II Tahun 2021.

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.96 berikut:

Tabel 3.96. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	30%	30%	-	30%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi		55.56%	55.56%		55.56%	100%	100%	
Capaian		120	120		120	120	120	

Sebagaimana tabel diatas, Realisasi tahun 2021 sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%, dengan capaian sebesar 120.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya

IKU tersebut merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2021 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.97.

Tabel 3.97. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Renstra DJPb 2020-2024	Renstra Kanwil 2015-2019	Kontrak Kinerja
2021	100%	120	-		80%

Pada tahun 2021 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024.

Perbandingan realisasi dan capaian s.d. 2021 dengan RPJMN

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2021 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.98.

Tabel 3.98. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Capaian	Target RPJMN	Keterangan
2021	100%	120	-	Tidak terdapat IKU dan Target pada RPJMN 2020-2024

Perbandingan Capaian IKU dengan Kanwil DJPb lain

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.99.

Tabel 3.99. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain

No	Kanwil	Realisasi	Keterangan
1	Kalimantan Barat	100%	Seluruh Kanwil DJPb Regional Kalimantan memperoleh capaian maksimal.
2	Kalimantan Selatan	100%	
3	Kalimantan Tengah	100%	
4	Kalimantan Timur	100%	
5	Kalimantan Utara	100%	

**Isu, Permasalahan,
Tindakan, dan
Action Plan**

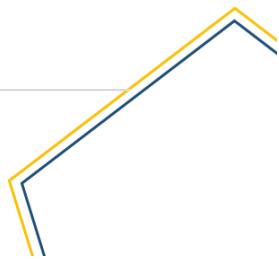
Isu Utama IKU ini adalah banyaknya risiko keamanan informasi yang disebabkan oleh serangan virus, trojan, *chrom* dan *phising* yang dapat berakibat pada terjadinya kerusakan perangkat sarana prasarana IT seperti Komputer, aplikasi, email dan web.

Permasalahan yang dihadapi yaitu kesadaran para pegawai terkait keamanan sistem informasi masih rendah.

Tindakan yang telah dilakukan yaitu:

1. Menampilkan himbauan keamanan informasi di tampilan desktop computer
2. Melakukan monitoring akses pengguna SPAN dan *Custom Web* secara berkala
3. Monitoring Join Domain seluruh PC Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
4. Membuat laporan join domain Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
5. Melakukan inventarisasi asset informasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

Action Plan Kanwil dalam rangka meningkat kinerja yaitu melakukan pendataan proses join domain komputer seluruh pegawai, melakukan inventarisasi asset informasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan checklist SMKI.



REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2021 Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapat anggaran (pagu awal) sebesar Rp4.009.055.000 (empat milyar sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor DIPA-015.08.2.528057/2021 tanggal 16 November 2020, dan dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kali revisi anggaran dan terdapat pengurangan Pagu menjadi sebesar Rp. 3.849.725.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja

Seluruh kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2021, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 582.112.000 (99.83% dari pagu sebesar Rp 583.088.000), belanja barang mencapai sebesar Rp 2.158.553.946 (99.30% dari pagu sebesar Rp 2.173.724.000), dan belanja modal mencapai sebesar Rp 1.079.611.596 (98.78% dari pagu sebesar Rp 1.092.913.000).

Tabel 3.100

Pagu dan Realisasi per jenis belanja Tahun 2021

NO	URAIAN OUTPUT	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	708.384.000	583.088.000	582.112.000	99.83
2	Belanja Barang	3.025.671.000	2.173.724.000	2.158.553.946	99.30
3	Belanja Modal	275.000.000	1.092.913.000	1.079.611.596	98.78
Jumlah		4.009.055.000	3.849.725.000	3.820.277.542	99.25

Tabel 3.101

Realisasi per jenis belanja Tahun 2016-2021

NO	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Pegawai	4.915.764.598	2.973.319.375	789.143.000	676.045.000	678.033.000	582.112.000
2	Belanja Barang	2.855.869.981	2.906.509.039	3.349.802.133	3.178.865.000	2.351.109.211	2.158.553.946
3	Belanja Modal	429.431.000	98.380.000	1.074.581.200	10.425.000	414.089.000	1.079.611.596
Jumlah		8.201.065.579	8.201.065.579	5.213.526.333	3.864.580.035	3.443.231.211	3.820.277.542

2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan/Output

Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat digunakan untuk membiayai Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (Kode CD) dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 10 (sepuluh) output belanja dan Program Dukungan Manajemen (Kode WA) dengan 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) output belanja dengan masing-masing alokasi sebagai berikut:

Tabel 3.102
Anggaran dan Output Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN OUTPUT	ANGGARAN	VOLUME OUTPUT	%
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					
4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					
1	4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	21.525.000	1 Laporan	
4804 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara					
2	4804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4.376.000	1 Laporan	
6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi					
3	6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	46.580.000	1 Orang	
4	6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	63.880.000	4 Laporan	
5	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	177.176.000	6 Dokumen	
6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					
6	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.920.000	22 Orang	
7	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	155.740.000	2 Dokumen	
6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara					
8	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	4.830.000	1 Dokumen	
6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara					
9	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	81.912.000	2 Laporan	
6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif					
10	6216.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	15.800.000	1 Laporan	
Program Dukungan Manajemen					
4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum					
1	4715.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12.500.000	1 Layanan	
2	4715.EAC	Layanan Umum	1.208.481.000	2 Layanan	
3	4715.EAD	Layanan Sarana Internal	596.080.000	3 Unit	
4	4715.EAE	Layanan Prasarana Internal	374.542.000	9.480 Unit	
5	4715.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	96.016.000	2 Dokumen	
4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi public					
6	4718.BMB	Komunikasi Publik	68.000.000	1 Layanan	
4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM					
7	4719.EAF	Layanan SDM	821.590.000	114 Orang	
8	4719.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	247.224.000	3 Layanan	
4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal					
9	4722.EAK	Layanan Pengawasan Internal	10.856.000	1 Laporan	
Jumlah			4.009.055.000		

Tabel 3.103
Pagu dan Realisasi per Output Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN OUTPUT	AWAL	AKHIR	REALISASI	%
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko						
4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko						
1	4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	21.525.000	10.154.000	9.981.000	98.296
4804 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara						
2	4804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4.376.000	40.000	30.000	75
6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi						
3	6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	46.580.000	10.956.000	10.731.500	97.951
4	6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	63.880.000	5.356.000	4.822.900	90.047
5	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	177.176.000	87.644.000	86.888.912	99.136
6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko						
6	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.920.000	120.000	0	0
7	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	155.740.000	105.690.000	98.619.750	93.31
6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara						
8	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	4.830.000	100.000	90.000	90
6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara						
9	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	81.912.000	35.455.000	35.105.840	99.015
6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif						
10	6216.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	15.800.000	2.800.000	0	0
Program Dukungan Manajemen						
4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum						
1	4715.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12.500.000	3.804.000	3.803.372	99.983
2	4715.EAC	Layanan Umum	1.208.481.000	1.144.495.000	1.143.820.380	99.941
3	4715.EAD	Layanan Sarana Internal	596.080.000	638.401.000	637.214.691	99.814
4	4715.EAE	Layanan Prasarana Internal	374.542.000	1.074.595.000	1.062.110.817	98.838
5	4715.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	96.016.000	20.656.000	20.303.400	98.293
4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi public						
6	4718.BMB	Komunikasi Publik	68.000.000	43.000.000	42.696.411	99.294
4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM						
7	4719.EAF	Layanan SDM	821.590.000	592.138.000	590.618.669	99.862
8	4719.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	247.224.000	73.849.000	73.441.900	99.449
4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal						
9	4722.EAK	Layanan Pengawasan Internal	10.856.000	472.000	0	0
Jumlah			4.009.055.000	3.849.725.000	3.820.277.542	99.25

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efisiensi berdasarkan formulasi pada aplikasi SMARTDJA dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran RO dengan capaian RO dan realisasi anggaran RO dengan penjumlahan (Σ) dari alokasi anggaran RO.

Rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{RO} : Efisiensi RO
- $AARO_i$: alokasi anggaran RO_i
- $RARO_i$: realisasi anggaran RO_i
- CRO_i : capaian RO_i
- Efisiensi dihitung otomatis *by system*, nilai maksimal 20 dan minimal -20.

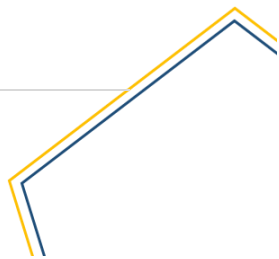
Hasil perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dituangkan dalam rumus Nilai Efisiensi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 * 50)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Indikator Efisiensi
- E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan tersebut melalui Aplikasi SMARTDJA (data diunduh pada tanggal 24 Januari 2022), hasil Nilai Indikator Efisiensi pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2021 adalah **80.21%**.



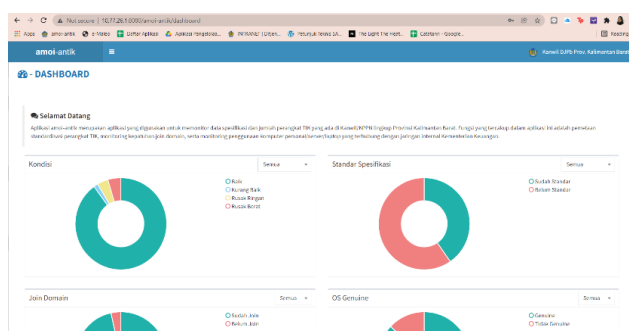
KINERJA LAIN-LAIN

Selain 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, Kanwil juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2021 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Kanwil, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. INOVASI MANAJEMEN/PELAYANAN

a. AMOI-ANTIK

Sebagai upaya penatausahaan dan pengelolaan perangkat TIK yang baik dan terstruktur, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat membuat suatu database yang menyediakan data perangkat TIK pada KPPN dan Kanwil dengan detail spesifikasi yang memadai



dan akurat sesuai kondisi yang ada. Aplikasi berbasis web hasil inovasi dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat ini digunakan dalam proses Monitoring Infrastruktur dan Pengelolaan TIK KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Aplikasi ini menjadi aplikasi yang dijadikan alat dalam melakukan montik secara online. Dalam aplikasi ini ditampilkan data-data KPPN yang berkaitan dengan TIK seperti daftar BMN TIK, kegiatan GKM yang berkaitan dengan TIK, dan lain-lain. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kualitas BMN yang ada di KPPN apakah sudah memenuhi spesifikasi minimum yang diharuskan.

b. Dashboard E-DIH (Elektronik Data Informasi Harian)

Pemantauan/monitoring terhadap data realisasi APBN semestinya dilakukan secara rutin agar dapat mengontrol pelaksanaan APBN sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga bisa tercapai tujuan



Elektronik Data Informasi Harian
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat

bersama yaitu pelaksanaan APBN yang sukses yang mendukung pemulihan ekonomi. Data-data terkait APBN tersebar dibanyak aplikasi dan apabila dibutuhkan beberapa data maka harus melakukan pengambilan data pada banyak aplikasi sesuai kebutuhan jenis data. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat membuat inovasi berupa

suatu *dashboard* yang menampilkan berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan APBN dalam satu halaman saja sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring terhadap realisasi APBN.

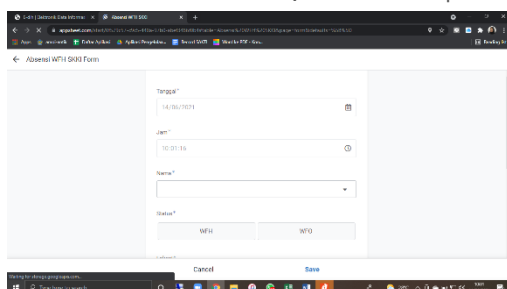
c. Helpdesk Layanan Prima

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat selalu berusaha untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder. Selain memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, Kanwil berusaha untuk selalu responsif terhadap setiap keluhan/permasalahan yang dialami oleh satker. Berkaitan dengan hal tersebut Kanwil menciptakan suatu inovasi berupa layanan helpdesk berbasis website yang menjadi wadah bagi satker untuk bertanya/berkonsultasi terkait permasalahan pekerjaan yang dihadapinya. Selain kepada satker, layanan helpdesk ini juga diberikan kepada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan para pegawai internal kanwil.



d. Aplikasi AFH (Absensi From Home)

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-26/PB/PB.1/2021 hal Pola Kerja Pegawai dan Langkah Tanggap Darurat COVID-19, sebagian besar pegawai melaksanakan pekerjaan sehari-hari melalui rumah, untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat menjamin terbentuknya



lingkungan pengendalian yang sesuai dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan memastikan pegawai bekerja melalui tempat yang ditentukan sesuai *Activity Based Working* (ABW). Inovasi ini sebagai bentuk pengendalian untuk memastikan pegawai benar-benar melakukan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. AFH memberikan kemudahan untuk melakukan pemantauan terhadap pegawai yang sedang melakukan penugasan WFH, dengan melakukan absensi dengan menggunakan AFH maka akan bisa diketahui keberadaan pegawai saat WFH sehingga AFH menjadi sebuah sistem yang dapat menjamin tercapainya produktifitas dan profesionalisme seorang pegawai yang mendukung terciptanya pelaksanaan ABW yang bertujuan menekan biaya dan meningkatkan kinerja individu, tim serta organisasi secara keseluruhan.

e. Aplikasi SIANTAN

Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang disusun oleh setiap unit akuntansi Tingkat UAKKBUN (Kanwil) dan UAKBUN-D (KPPN) harus dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan atas pengelolaan kas yang menjadi



tanggung jawabnya. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif yang diatur dalam PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah agar suatu laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka menjaga keandalan data yang tersaji serta pengungkapan informasi secara menyeluruh pada laporan keuangan, Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menginisiasi inovasi Aplikasi Siantan. Aplikasi Siantan memiliki keunggulan antara lain:

1. Mempermudah dan mempercepat proses penyusunan LK Kuasa BUN Daerah KPPN.
2. Menyajikan pengungkapan detil pada LK Kuasa BUN Daerah KPPN

2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI

a. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang bersih dan bebas korupsi terus diupayakan sebagai komitmen dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam meraih predikat Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2021. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.



b. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada KPPN

Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya pada level Kanwil namun juga merupakan komitmen dari seluruh KPPN di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan hingga tahun 2021 seluruh KPPN di wilayah Kalimantan Barat telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan empat dari enam KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Adapun tahun perolehan predikat masing-masing KPPN sebagai berikut:

Daftar Perolehan WBK/WBBM

KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

No	KPPN	WBK	WBBM
1.	KPPN Pontianak	2018	2019
2.	KPPN Singkawang	2018	-
3.	KPPN Sanggau	2020	-
4.	KPPN Ketapang	2019	2021
5.	KPPN Sintang	2019	-
6.	KPPN Putussibau	2020	-

3. PENGHARGAAN

a. Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 dengan Kategori Kanwil Besar



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan gabungan antara Laporan Keuangan Kuasa BUN (LK BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (LKKL). Kedua laporan keuangan tersebut disusun secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN Daerah tingkat wilayah bertugas menyusun Laporan

Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Wilayah (LK BUN Tingkat Wilayah), yang merupakan gabungan laporan keuangan kuasa BUN Tingkat Daerah (KPPN). LK BUN Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 mendapatkan penghargaan peringkat kedua dalam kategori Kanwil Besar. Hal ini menandakan bahwa LK BUN yang disajikan telah berkualitas, akuntabel, dan informative.

b. Peringkat Pertama atas Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2020 dan Peringkat ketiga Penilaian Laporan RPA Semester I Tahun 2020 kategori Kanwil Sedang.

Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Sesuai ketentuan SE-

28/PB/2015, laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara periodik (semesteran) dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Laporan

KOMPONEN PENILAIAN REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN (RPA) SEMESTER II TAHUN 2020 KATEGORI KANWIL SEDANG

No.	Kanwil DJPb Provinsi	Kesesuaian Tujuan		Akurasi	Ketajaman Rekomendasi		Kualitas Analisis & Inovasi		Sistematika	Penyajian Dashboard		Ketepatan Waktu	Desain/ Layout	Total Nilai
		10%	10%		15%	20%	5%	5%		5%	100%			
1.	Kalimantan Barat	95,00	96,50	94,50	95,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	100,00	96,00	96,15	
2.	Sulawesi Tengah	95,00	96,00	94,00	96,00	95,50	96,50	96,50	96,50	96,50	100,00	95,50	95,69	
3.	Riau	95,00	93,50	94,50	95,50	96,50	97,00	96,00	96,00	96,00	100,00	95,00	95,69	
4.	Maluku	93,00	92,50	94,50	96,00	95,50	97,00	95,00	95,00	100,00	96,00	96,00	95,23	
5.	Kalimantan Timur	94,50	95,00	94,00	94,00	96,00	96,50	96,50	96,50	100,00	95,00	95,00	95,10	
6.	Sulawesi Utara	94,00	94,00	93,00	94,50	95,50	96,50	94,00	94,00	100,00	96,00	94,80	94,80	
7.	Jambi	93,50	94,00	92,00	94,50	94,50	95,00	94,50	94,50	100,00	95,00	94,20	94,20	
8.	Lampung	93,50	93,50	92,50	94,50	94,50	95,50	91,50	91,50	100,00	93,50	93,13	93,13	
9.	Kalimantan Tengah	93,50	91,50	92,50	93,50	95,00	95,50	94,50	94,50	100,00	94,00	93,85	93,85	
10.	Sulawesi Tenggara	92,50	92,00	93,00	92,00	95,50	96,00	94,00	94,00	100,00	95,50	93,78	93,78	
11.	Kalimantan Selatan	94,00	91,00	91,50	91,50	95,00	95,50	95,00	95,00	100,00	92,00	93,19	93,19	
	Rata-rata	93,95	93,69	93,27	94,36	95,45	96,14	94,64	94,64	100,00	94,86	94,71	94,71	

No.	Kanwil DJPb	Kesesuaian Tujuan	Akurasi	Ketajaman Rekomendasi	Kualitas Analisis & Inovasi	Sistematika	Penyajian Dashboard	Ketepatan Waktu	Desain/ Layout	Total Nilai
1.	Kalimantan Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA; Alur pikir/flow; Kualitas analisis dan inovasi; Ketajaman rekomendasi; Analisis aspek khusus; Format review/sistematika; Penyajian dashboard; Ketepatan waktu; dan Desain/layout. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan peringkat pertama atas Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2020 kategori Kanwil Sedang.

c. Peringkat Kedua atas Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 Kategori Kanwil Sedang

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb dan KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb mempunyai visi dan misi yang jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (*input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome*).

Proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja. *Strategy Focused Organization* (SFO) digunakan sebagai alat bantu pemantauan atas kemajuan

capaian kinerja secara periodik, mendeteksi dini adanya kesalahan yang harus diperbaiki secepatnya, dan dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai kinerja/hasil kerja yang lebih baik serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapat peringkat kedua dalam kategori Kanwil sedang. Hal ini menandakan komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

No	Unit	Pemenuhan Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (Bobot 70%)	NKO (Bobot 30%)		Total
			Awal	Konversi 100	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KANWIL DJPB PROVINSI ACEH	99,84	106,69	88,91	96,56
2	KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	96,43	107,66	89,72	94,42
3	KANWIL DJPB PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	95,06	107,86	89,88	93,51

d. Peringkat Ketiga atas Laporan Analisis Penyaluran Pembiayaan UMi Terbaik Tahun 2021

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hadir untuk membantu para pelaku usaha ultra mikro dengan



menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat serta menambah jumlah wirausahawan yang terfasilitasi program pembiayaan pemerintah. Pembiayaan UMi menjadi salah satu tonggak penggerak dalam memajukan perekonomian nasional.

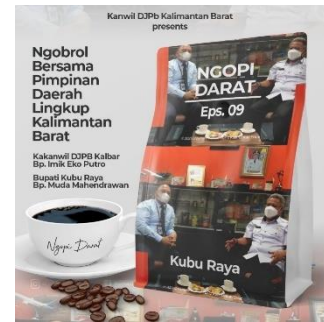
Pada acara Rapat Pimpinan Terbatas DJPb yang diadakan di Surakarta, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memperoleh Penghargaan Terbaik Ketiga Laporan Analisis Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2021. Dengan perolehan penghargaan ini diharapkan dapat semakin memotivasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat untuk ikut serta dalam menyukseskan program Pembiayaan Ultra Mikro di Indonesia.

4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Pimpinan Perbendaharaan meluncurkan konsep "New DJPb in Town". Melalui konsep tersebut Kanwil DJPb dituntut menjalankan peran baru sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam menjalankan peran tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menerjemahkannya melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka men-delivered kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat; memahami, mengidentifikasi, dan menyampaikan konstelasi, tatanan, gambaran kondisi, dan prediksi atas kondisi keuangan daerah di wilayah masing-masing; serta memberikan insight/pandangan dan rekomendasi dari perspektif fungsi perbendaharaan yang memberikan nilai tambah kepada Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. NGOPI DARAT (Ngobrol Bersama Pimpinan Daerah Lingkup Kalimantan Barat)

Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah sekaligus sebagai *Regional Chief Economist* (RCE), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah strategis untuk membangun kerja sama dan sinergi yang baik dengan semua unsur di daerah. Hal ini diwujudkan dengan dibuatnya program Ngopi Darat. Ngopi darat (Ngobrol Bersama Pimpinan Daerah Lingkup Kalimantan Barat) merupakan program diskusi interaktif dengan kepala daerah di



lingkup Kalimantan Barat untuk bisa mendengar dan mengetahui pandangan pimpinan daerah dan bisa menyelaraskannya dengan misi perbendaharaan serta memberikan pandangan dan rekomendasi dari perspektif perbendaharaan lewat komunikasi yang lebih santai, efisien dan efektif. *Record* dipublikasikan untuk bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan informasi bagi stakeholders.

b. Kerja sama Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Pontianak dan Jaringan Televisi Publik TVRI

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah memegang tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan narasi kebijakan pemerintah dalam



menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai upaya mengoptimalkan penyampaian informasi publik terkait kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan, dan menyampaikan konstelasi, tatanan, gambaran kondisi, dan prediksi atas kondisi keuangan daerah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melakukan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Pontianak dalam bidang informasi

dan publikasi. Kerja sama ini diwujudkan melalui sosialisasi atau edukasi dalam program siaran atau dialog interaktif LPP RRI Pontianak. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga berkerja sama dengan TVRI dengan menjadi narasumber dalam program Bincang 56.

c. Pembentukan *Tanjungpura Economist Club*

Sebagai upaya dalam memperkuat langkah pemulihan ekonomi Kalimantan Barat yang terdampak pandemi Covid-19, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (FEB Untan) mengadakan kegiatan Forum Ekonomi Regional dengan membentuk *Tanjungpura Economist Club*. Forum kegiatan ini digunakan sebagai wadah untuk berdiskusi dan menyampaikan konstelasi, tatanan, gambaran kondisi, dan prediksi atas kondisi keuangan daerah Kalimantan Barat dan memberikan *insight*/pandangan dan rekomendasi dari perspektif fungsi perbendaharaan.



BAB IV

PENUTUP

...



PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam tahun anggaran 2021 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

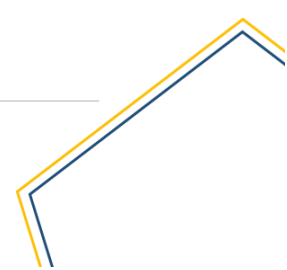
Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 109.06. Dari total 20 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Di samping itu, terdapat pula keberhasilan dan terobosan yang cukup signifikan dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam pelaksanaan peran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:
 - a. Peluncuran Aplikasi AMOI-ANTIK sebagai upaya penatausahaan dan pengelolaan perangkat TIK yang baik dan terstruktur;
 - b. Peluncuran Aplikasi E-DIH (Elektronik Data Informasi Harian) untuk memonitoring data realisasi APBN secara rutin;
 - c. Peluncuran Aplikasi Helpdesk Layanan Prima sebagai upaya pemberian pelayanan prima kepada stakeholder;

- d. Peluncuran Aplikasi AFH (Absensi From Home) sebagai upaya meningkatkan produktifitas dan profesionalisme pegawai;
- e. Peluncuran Aplikasi SIANTAN dalam rangka menjaga keandalan data yang tersaji serta pengungkapan informasi secara menyeluruh pada laporan keuangan;
- f. Meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- g. Meraih Peringkat Pertama atas Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2020 dan Peringkat ketiga Penilaian Laporan RPA Semester I Tahun 2021 Kategori Kanwil Sedang;
- h. Meraih Peringkat Kedua atas Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 Kategori Kanwil Sedang;
- i. Meraih Peringkat Ketiga atas Laporan Analisis Penyaluran Pembiayaan UMi Terbaik Tahun 2021;
- j. Melakukan kerjasama dengan Pimpinan Daerah melalui NGOPI Darat (Ngobrol Bersama Pimpinan Daerah Lingkup Kalimantan Barat);
- k. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Pontianak dan Jaringan Televisi Publik TVRI;
- l. Pembentukan *Tanjungpura Economist Club*.

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), *Spending Review*, *Performance Dialogue*, dan monitoring proyeksi dan realisasi belanja K/L;
2. Meningkatkan kualitas LKBUN dengan menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan akuntansi berkelanjutan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKKL, dan LKBUN;
3. Mendorong Satker K/L mitra kerja KPPN untuk meningkatkan kepatuhan dalam rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan;
4. Meningkatkan efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan melalui updating materi sosialisasi sesuai perkembangan kebijakan standar dan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku;
5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan *updating* langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 2022;
6. Meningkatkan akurasi perencanaan kas pemerintah pusat melalui komunikasi intensif dan pelatihan berkesinambungan bagi operator perencanaan kas;
7. Meningkatkan kinerja pelaksanaan *special mission* dengan mendorong seluruh BLU menyampaikan pengesahan pendapatan kepada KPPN secara akurat dan tepat waktu;
8. Meningkatkan kualitas SDM yang *fit for purpose* melalui *reassessment* dan *updating* soal dan modul pembelajaran *hard competency*;



9. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, survei SFO, dan survei persepsi integritas;
10. Menggiatkan pelaksanaan implementasi SAKTI tahap berikutnya pada seluruh Satker lingkup Kementerian Keuangan dan K/L lainnya;
11. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan rencana penarikan dana.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan untuk seluruh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021





KONTRAK KINERJA NOMOR: 26/PB/2021

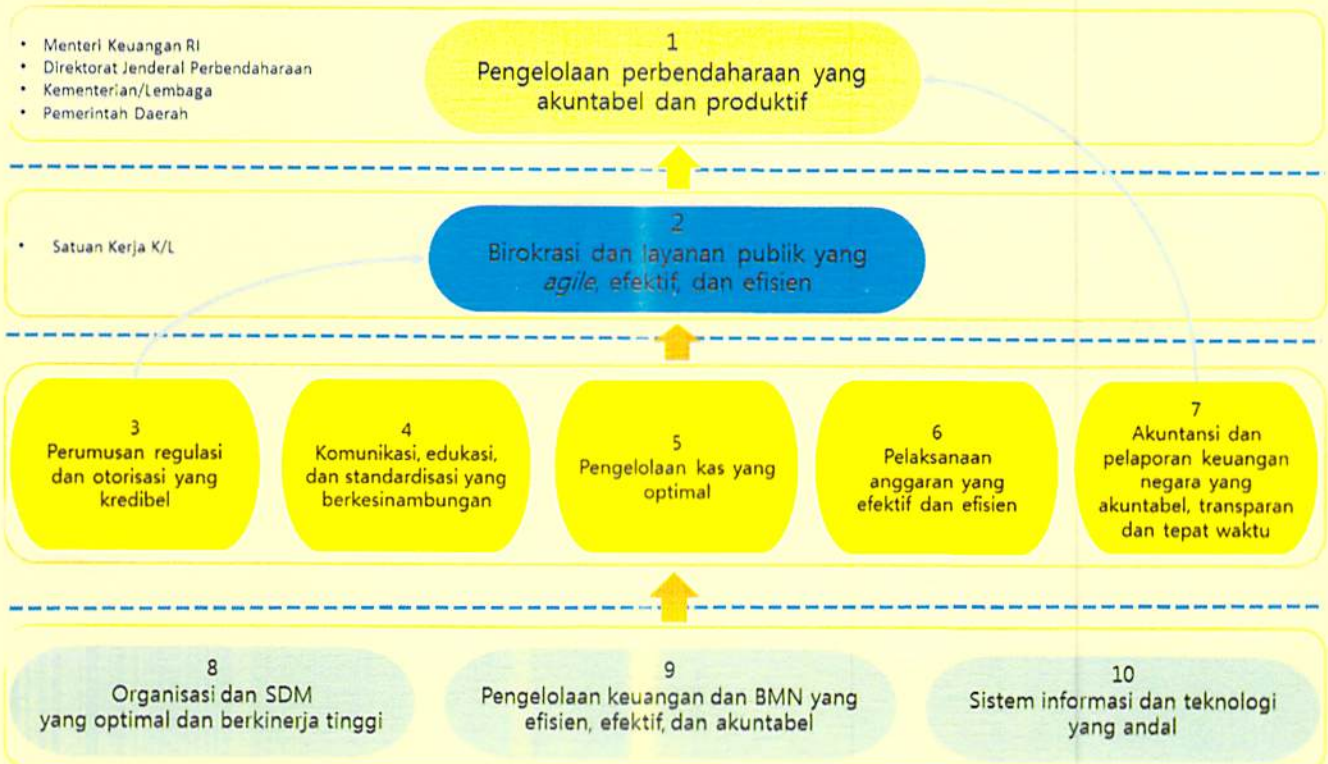
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DJTJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94
		1b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
		1c-N Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5
		4c-CP Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-N Persentase akurasi perencanaan kas	82%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		7b-N Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82
		9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

- Program/Kegiatan**
1. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
 2. Dukungan Manajemen

Anggaran
(573.766.000.-)

(3.435.289.000.-)

Pontianak, 29 Januari 2021

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Andin Hadiyanto
NIP 19650609 199012 1 001

Pimpinan Unit Kerja,



Edih Mulyadi
NIP 19690811 199103 1 001

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic (GFS)</i> tingkat wilayah	-	-	-	-	-	79	79
VIII	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi							
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	84	84
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	83	83
8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	78	78
IX	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	-	-	-	-	-	82	82
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	-	30%	30%	-	30%	100%	100%
X	Sistem informasi dan teknologi yang andal							
10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	30%	30%	-	30%	80%	80%

Pontianak, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Edih Mulyadi
NIP 19640811 199103 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Andin Hadiyanto	1	Nama	Edih Mulyadi
2	NIP	19650609 199012 1 001	2	NIP	19690811 199103 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama (IV/e)	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	Jabatan	Direktur Jenderal Perbendaharaan	4	Jabatan	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
5	Unit Kerja	Direktur Jenderal Perbendaharaan	5	Unit Kerja	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb yang berkualitas	-	94	100	12 bln	-
2	Melaksanakan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program secara berkualitas	-	82	100	12 bln	-
3	Mewujudkan nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	-	91	100	12 bln	-
4	Memenuhi kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	-	4,64 (skala 5)	100	12 bln	-
5	Menyelesaikan revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker secara tepat waktu	-	100%	100	12 bln	-
6	Mewujudkan edukasi dan komunikasi yang efektif	-	87,5	100	12 bln	-
7	Mewujudkan nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	-	8,5	100	12 bln	-
8	Mewujudkan implementasi aplikasi SAKTI	-	100%	100	12 bln	-
9	Mewujudkan perencanaan kas yang akurat	-	82%	100	12 bln	-
10	Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	89	100	12 bln	-
11	Mewujudkan rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	-	90	100	12 bln	-
12	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	12 bln	-
13	Mewujudkan nilai Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas	-	79	100	12 bln	-
14	Memenuhi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	84	100	12 bln	-
15	Memenuhi nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	83	100	12 bln	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
16	Mewujudkan nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai Kanwil DJPb yang baik	-	78	100	12 bln	-
17	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	-	95,5%	100	12 bln	4.009.05.000.-
18	Memenuhi nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	-	82	100	12 bln	-
19	Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN	-	100%	100	12 bln	-
20	Melaksanakan implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	80%	100	12 bln	-

Pontianak, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,



Andin Hadiyanto
NIP 19650609 199012 1 001



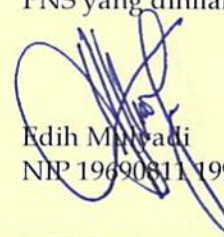
Edih Mulyadi
NIP 19690811 199103 1 001

**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	SS: Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i> Target: Pemenuhan minimal masing-masing indikator <i>self assessment</i> 80%	Q2: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q2: 40%	Januari s.d. Desember 2021	Kepala Kantor Wilayah	
				Q3: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q3: 60%			
				Q4: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q4: 80%			
2.	SS: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien IKU: Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas kinerjanya dalam penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa	Terwujudnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa	Rapat Koordinasi/Rapat/Focus Group Discussion dengan seluruh Pemerintah Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat dan pemberian penghargaan	Laporan Kegiatan	Januari s.d. Juni 2021	Kepala Bidang PPA II	Rp. 4.600.000

Pontianak, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,


Edih Mulyadi
NIP 19690811199103 1 001



KONTRAK KINERJA NOMOR: 26/PB/2021

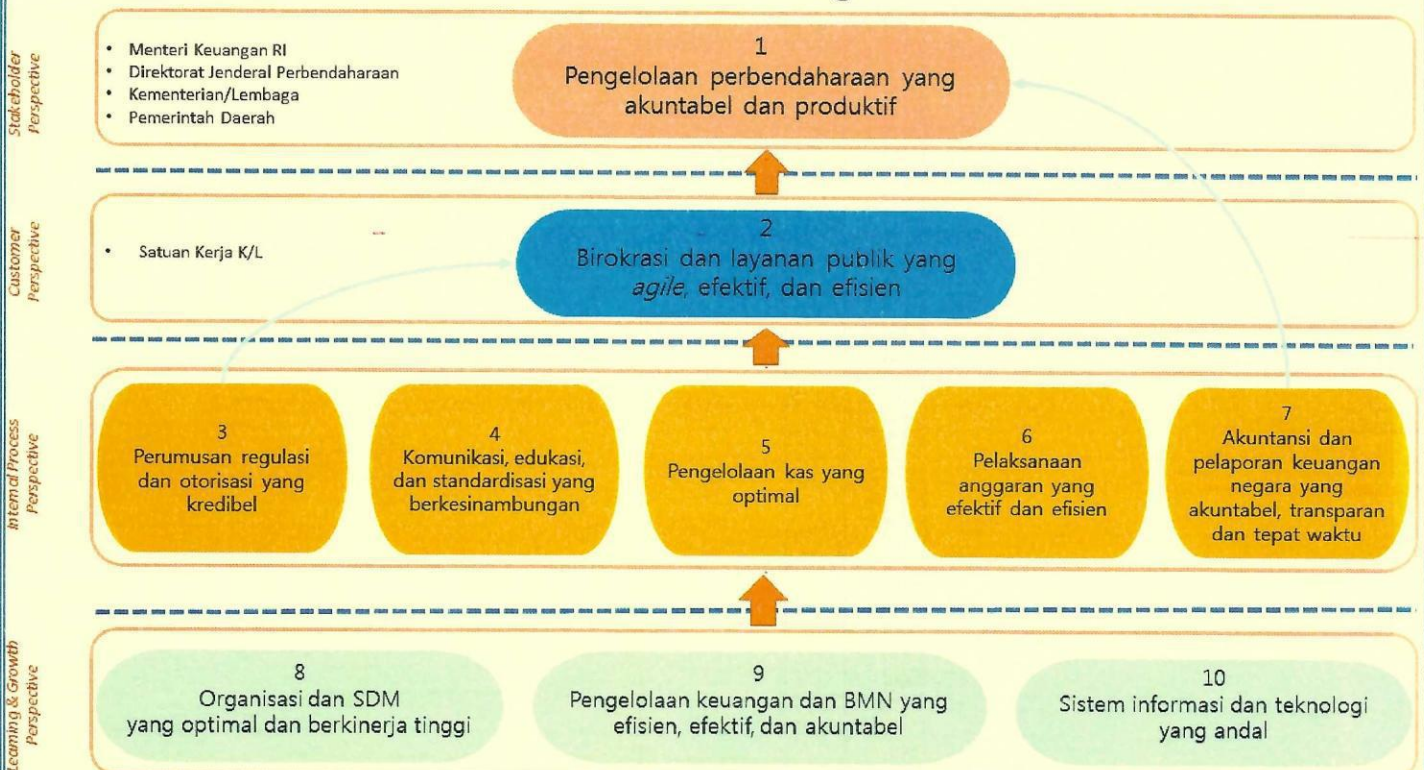
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DJTJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94
		1b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
		1c-N Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5
		4c-CP Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-N Persentase akurasi perencanaan kas	82%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		7b-N Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	82
		9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Program/Kegiatan

1. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

(258.315.000)

(3.591.410.000)

Pontianak, 18 Oktober 2021

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Hadiyanto

NIP 196210101987031006

Pimpinan Unit Kerja,



Imik Eko Putro

NIP 196905081989121001

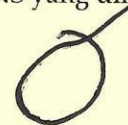
**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif							
1a-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	-	-	-	-	-	94	94
1b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	-	-	-	-	-	82	82
1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	91	91
II	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel							
2a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	-	100%	100%
III	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan							
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	87,5	87,5
3b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	-	-	-	-	-	8,5	8,5
3c-CP	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	-	-	-	-	-	26.04%	26.04%
IV	Pengelolaan kas yang optimal							
4a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	-	-	-	-	-	82%	82%
V	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien							
5a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	-	-	-	-	89	89
5b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	-	-	-	-	-	90	90
VI	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu							
6a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	-	-	-	-	98,1%	98,1%
6b-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	-	-	-	-	-	79	79

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
VII	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi							
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	84	84
7b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	83	83
7c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	78	78
VIII	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel							
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	-	-	-	-	-	95,5%	95,5%
8b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	-	-	-	-	-	82	82
8c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	-	-	-	-	-	70%	70%
IX	Sistem informasi dan teknologi yang andal							
9a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	24,44%	24,44%

Pontianak, 18 Oktober 2021

PNS yang dinilai,



Imik Eko Putro

NIP 196905081989121001

Sasaran Kinerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERIODE PENILAIAN:
5 Oktober s.d. 31 Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KERJA	
NAMA	Imik Eko Putro	NAMA	Hadiyanto
NIP	196905081989121001	NIP	196210101987031006
PANGKAT/RUANG GOL	Pembina Utama Muda (IV/c)	PANGKAT/RUANG GOL	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94
		Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
		Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91
2	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
3	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5
		Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	26,04%
4	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas	82%
5	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90
6	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	79
7	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
8	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%
		Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	82
		Tingkat kualitas pengelolaan BMN	70%

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
9	Sistem informasi dan teknologi yang andal	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	24,44%
B. KINERJA TAMBAHAN			
1.			

Pegawai yang dinilai,



Imik Eko Putro
196905081989121001

Pontianak, 18 Oktober 2021
Pejabat Penilai Kinerja



Hadiyanto
196210101987031006

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021



**Rencana Kegiatan
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021**

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/Pejabat Eselon II)	UIC
1	Januari	11-25 Januari	Pendampingan Penyusunan LK	Bidang PAPP, TMR, Bagian Umum, UAPPAW (petugas penyusun LK)	Kantor UAPPAW	Pendampingan penyusunan dan penyelesaian permasalahan LK UAPPAW dan BLU	-	Bidang PAPP
2	Januari	18 Januari	Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman per 31 Desember 2020	Kanwil, Pemkot Singkawang	Pemkot Singkawang	Indeks Kualitas Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman yang andal dan tepat waktu dapat dicapai apabila koordinasi dan komunikasi antara Kanwil dengan Pemkot Singkawang terjalin secara baik.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)
3	Januari	18 Januari	Kegiatan Kakanwil Menyapa triwulan I	Kepala Kanwil, Kepala Bagian/Bidang, dan KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan diskusi antara Kepala Kanwil dan para Kepala KPPN secara daring	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
4	Januari	26 Januari	Rapat Penyusunan Profil Risiko	PIC MR dan seluruh Kepala Bidang	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan rapat penyusunan profil risiko	-	Bidang SKKI (Seksi KI)
5	Januari	27 Januari	FGD Review Pelaksanaan Anggaran (RPA)	Satker terpilih	KPPN terpilih	Kegiatan untuk identifikasi permasalahan, rekomendasi kebijakan pelaksanaan anggaran, dan menilai kualitas pelaksanaan anggaran per semester	-	Bidang PPA I
6	Januari	29 Januari	Pengambilan Sumpah PNS	CPNS	Kota Pontianak	Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pembinaan PNS sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat yang memiliki tujuan sebagai salah satu usaha agar yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung jawab tidak hanya kepada atasannya tapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	-	Bagian Umum
7	Februari	2-3 Februari	FGD Pembinaan Akuntansi Pemda Semester I Tahun 2021	Bidang PAPP, Pemda Bengkayang dan Kayong Utara	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	FGD Pembinaan Akuntansi Pemda Semester I Tahun 2021	Dit. APK	Bidang PAPP
8	Februari	9 Februari	Rapat Koordinasi DFDD	Kanwil, Pemda dan KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Dalam rangka persamaan persepsi serta update informasi terkait penyaluran DFDD perlu dilakukan kegiatan rapat koordinasi. Peserta rakor mencakup Kanwil, Pemda, dan KPPN.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
9	Februari	10 Februari	Perjalanan Dinas dalam rangka Monev PNB	Satker pengelola PNB fungsional terpilih	Pontianak	Monev ke satker PNB terkait pembayaran/ penyetoran, penatausahaan, pelaporan PNB, dan memberi masukan potensi PNB	-	Bidang PPA I
10	Februari	16 Februari	In House Training (IHT) Analisis Data APBN	Pegawai Kanwil	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Pembahasan teknik analisis dan penyajian data dalam rangka Informasi APBN kepada Stakeholder/publik. Indeks ketepatan waktu penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil (GFS, SR, RPA, KFR)	-	Bidang PPA II/ Bagian Umum
11	Februari	17 Februari	FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)	Satker terpilih	Pontianak	Kegiatan ini untuk Identifikasi masalah spesifik pelaksanaan anggaran yang dihadapi K/L per triwulan	-	Bidang PPA I
12	Februari	22-24 Februari	Monitoring TIK KPPN Sintang	Seksi STA dan KPPN Sintang	KPPN Sintang	Melakukan kegiatan monitoring TIK secara on site	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
13	Februari	24 Februari	Bimtek / Pendampingan aplikasi SIKP, Umi	Kanwil, Pemda dan KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memastikan kualitas input laporan akurat dan tepat waktu. Peserta yang terlibat Kanwil, KPPN, Perbankan dan LKBB / Pegadaian	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/Pejabat Eselon II)	UIC
14	Februari	25 Februari	Sosialisasi peraturan tata cara revisi 2021, Pengelolaan belanja Covid-19/PEN, peraturan hibah.	Seluruh Satker mitra kerja Kanwil DJPb Kalbar	6 KPPN	Melaksanakan Sosialisasi peraturan tata cara revisi 2021, Pengelolaan belanja Covid-19/PEN, peraturan hibah, dan LLSPA TA.2021	-	Bidang PPA I
15	Maret	4 Maret	Focus Group Discussion	Kanwil, Pemda dan KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Pengumpulan Informasi Profil Keuangan Daerah dan Kajian Fiskal Regional mencakup Data APBN, APBD dan data perkembangan ekonomi regional. Sinergi dan koordinasi antara Kanwil, KPPN, serta Pemda	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
16	Maret	1-5 Maret	Perjalanan dinas luar kota	Kanwil, KPPN, Pemda	KPPN dan Pemda	Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Umi/SIKP dalam wilayah kerja KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov kalbar. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dapat tercapai sesuai target. Komunikasi dan koordinasi antara Kanwil, KPPN, dan Pemda yang intensif sangat dibutuhkan untuk pencapaian indeks kualitas yang ditentukan.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)
17	Maret	8-10 Maret	Monitoring TIK KPPN Ketapang	Seksi STA dan KPPN Ketapang	KPPN Ketapang	Melakukan kegiatan monitoring TIK secara on site	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
18	Maret	9 Maret	Focus Group Discussion/Sosialisasi Keuangan Daerah	Kanwil dan Pemda	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan Sosialisasi Keuangan Daerah kepada Pemda wilayah kerja kanwil DJPB Prov Kalbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemda telah sesuai ketentuan SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah). Sinergi dan koordinasi antara Kanwil serta Pemda	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
19	Maret	17 Maret	Seminar KFR Tahunan 2020	Kanwil, KPPN, Regional Ekonomi, Pemda, BPS, BC, Pajak	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan ekspose laporan APBN periode Tahun Anggaran 2020 dan kondisi ekonomi regional kepada stakeholder/publik. Sinergi dan koordinasi instansi yang terlibat adalah Kanwil, KPPN, Regional Ekonomi, Pemda, BPS, BC, Pajak	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)
20	Maret	18 Maret	Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan Satker BLU	Satker BLU di Kalbar (4 satker)	Kota Pontianak	Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	-	Bidang PPA I
21	Maret	17-19 Maret	Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja	Pengelola Kinerja Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan KPPN terkait peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dengan narasumber dari Bagian OTL	-	Bagian Umum
22	Maret	22-24 Maret	Monitoring TIK KPPN Singkawang	Seksi STA dan KPPN Singkawang	KPPN Singkawang	Melakukan kegiatan monitoring TIK secara on site	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
23	Maret	26 Maret	Capacity Building	Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pembangunan karakter SDM yang berkualitas, internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam mewujudkan tujuan Organisasi	-	Bagian Umum
24	Maret	28 Maret	Sosialisasi Pelaksanaan Spending Review	Satker terpilih	Kota Pontianak	Kegiatan untuk melakukan spending review (SR) efektivitas atas pelaksanaan belanja tahun 2020	-	Bidang PPA I
25	April	5-9 April	Pembinaan dan Supervisi KPPN Sintang	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Sintang	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
26	April	5 April	FGD dan rekonsiliasi data dengan BI	Bidang PAPP, Bagian Umum	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan BI terkait penyusunan GFS	-	Bidang PAPP
27	April	5 April	Koordinasi LKPD	Bidang PAPP, Bagian Umum	Pemda Provinsi Kalbar dan Pemkot Pontianak	Melaksanakan pengumpulan data LKPD tahun 2021 triwulan I dan Tahun 2020 unaudited dan LK BLUD ke Pemda Provinsi Kalbar dan Pemkot Pontianak	-	-

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/Pejabat Eselon II)	UIC
28	April	6 April	Bimtek/Sosialisasi Keuangan Daerah	Kanwil, OPD dan SKPD Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak	Pemda Provinsi Kalbar dan Pemkot Pontianak	Kegiatan Sosialisasi Keuangan Daerah kepada Pemda wilayah kerja kanwil DJPB Prov Kalbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemda telah sesuai ketentuan SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah). Sinergi dan koordinasi antara Kanwil serta Pemda	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
29	April	7 April	Koordinasi Pengumpulan Data LKPD	Bidang PAPPK, Bagian Umum	Pemda Ketapang, Putussibau, Mempawah, Kubu Raya, dan Sintang	Melaksanakan pengumpulan data LKPD tahun 2021 dan triwulan I dan Tahun 2020 unaudited dan LK BLUD ke Pemda Ketapang, Putussibau, Mempawah, Kubu Raya, dan Sintang	-	-
30	April	9 April	Koordinasi Inovasi Layanan	Bidang SKKI dan peserta FGD	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan FGD koordinasi inovasi layanan	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
31	April	12 April	Kegiatan Kakanwil Menyapa triwulan II	Kepala Kanwil, Kepala Bagian/Bidang, dan KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan diskusi antara Kepala Kanwil dan para Kepala KPPN secara daring	-	Seksi SPB
32	April	12 April	Rekonsiliasi Outsanding Pinjaman	Kanwil, Pemda, Perbankan, Debitur	Pemda, Perbankan, Debitur	Kegiatan monitoring kredit program (KUR)/SIKP periode semester I tahun 2021. Untuk memenuhi indikator kinerja utama yaitu Indeks kualitas pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Monitoring dilakukan secara langsung kepada para Debitur KUR dengan penyebaran/isian kuesioner. Sedangkan monitoring terkait SIKP dilakukan untuk memantau lembaga penyalur KUR telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Obyek monitoring adalah Debitur wilayah Pemda Kab. Sintang an Kab. Melawi.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)
33	April	13 April	Focus Group Discussion	Kanwil, KPPN, Pemda	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan Sharing Session/FGD sebagai sarana evaluasi penyaluran TKDD Triwulan I TA 2021 dalam rangka memastikan penyaluran dana sesuai ketentuan agar nilai manfaat dari program ini segera dirasakan masyarakat. Di samping itu dengan Sharing Session/FGD dapat digali informasi di lapangan secara langsung dan komprehensif sehingga apabila ada kendala teknis maupun non teknis akan dapat segera dicarikan solusinya. Pihak terlibat meliputi Kanwil, Pemda, DPMD, dan Kepala Desa.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
34	April	14 April	Pendampingan Penyusunan LK	Bidang PAPPK, TMR, Bagian Umum, UAPPAW (petugas penyusun LK)	Kantor UAPPAW	Pendampingan penyusunan dan penyelesaian permasalahan LK UAPPAW dan BLU	-	Bidang PAPPK
35	April	12-16 April	Pembinaan dan Supervisi KPPN Pontianak	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Pontianak	KPPN Pontianak	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on the spot	-	Seksi SPB
36	April	12-15 April	Perjalanan Dalam Kota	Kanwil, Pemda, Perbankan, Debitur	Pemda, Perbankan, Debitur	Kegiatan monitoring kredit program (KUR)/SIKP periode semester I tahun 2021. Untuk memenuhi indikator kinerja utama : Indeks kualitas pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Monitoring dilakukan secara langsung kepada para Debitur KUR dengan penyebaran/isian kuesioner. Sedangkan monitoring terkait SIKP dilakukan untuk memantau lembaga penyalur KUR telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)
37	April	21 April	Sosialisasi/Bimtek Penyusunan LK UAPPAW	Bidang PAPPK, Bagian Umum, operator UAPPAW	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/bimtek penyusunan laporan keuangan UAPPAW (FGD dengan BLU)	Dit. APK	Bidang PAPPK
38	April	26 April	Sosialisasi/Bimtek Penyusunan LK UAPPAW	Bidang PAPPK, Bagian Umum, operator UAPPAW	Kantor UAPPAW/ Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/bimtek penyusunan laporan keuangan UAPPAW (Pembinaan ke satker UAPPAW luar)	-	Bidang PAPPK

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Pejabat Eselon II)	UIC
39	April	26-30 April	Pembinaan dan Supervisi KPPN Singkawang	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Singkawang	KPPN Singkawang	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on the spot	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
40	April	1-30 April	Monitoring TIK KPPN Pontianak, Sanggau, dan Putussibau	Seksi STA dan KPPN Pontianak, Sanggau, Putussibau	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan monitoring TIK secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
41	Mei	19 Mei	FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)	Satker terpilih	Pontianak	Kegiatan ini untuk Identifikasi masalah spesifik pelaksanaan anggaran yang dihadapi K/L per triwulan	-	Bidang PPA I
42	Mei	26-28 Mei	Perjalanan Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer dan Dana Desa	KPPN Sanggau, Pemda (Sanggau dan Sekadau)	Pemda Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer dan Dana Desa dalam wilayah KPPN Sanggau meliputi Kab. Sanggau dan Kab. Melawi. Kegiatan ini untuk mendukung capaian persentase ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer dan Dana Desa TA 2021. Koordinasi pejabat perbendaharaan DFDD serta Pemda sangat berperan terhadap kecepatan dan ketepatan penyaluran DFDD.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
43	Juni	7-11 Juni	Pembinaan dan Supervisi KPPN Ketapang	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Ketapang	KPPN Ketapang	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on the spot	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
44	Juni	9-11 Juni	Internalisasi dan sosialisasi kebijakan TIK	Seksi STA dan KPPN Putussibau	KPPN Putussibau	Sosialisasi kebijakan-kebijakan TIK	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
45	Juni	8 Juni	Focus Group Discussion	Kanwil, KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan FGD dimaksudkan untuk memperoleh update informasi serta menyamakan persepsi dalam penyusunan dan analisis PFK Pegawai. Penyusunan dan pengiriman laporan analisis secara berjenjang dari KPPN ke Kanwil, selanjutnya Kanwil melakukan konsolidasi laporan dari KPPN wilayah kerjanya.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)
46	Juni	9 Juni	Pembinaan SAP pada Pemda	Bidang PAPP, Bagian Umum, PPKD	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melaksanakan sosialisasi SAP se Provinsi Kalbar	Dit APK	Bidang PAPP
47	Juni	14-18 Juni	Pembinaan dan Supervisi KPPN Putussibau	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Putussibau	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
48	Juni	15 Juni	FGD terkait Penyusunan KFR Triwulan II Tahun 2021	Kanwil, KPPN, Ekonom Regional, Pemda, BPS, BC, Pajak	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Frekuensi penyelenggaraan Focus Group Discussion bersama pemda dan stakeholder. Kegiatan FGD untuk wujudkan realisasi Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) tingkat kanwil	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)
49	Juni	17-18 Juni	Rapat Koordinasi Kanwil	Kanwil DJPb dan seluruh KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Rapat koordinasi kanwil semester I 2021	-	Bidang SKKI dan Bagian Umum
50	Juni	21-25 Juni	Pembinaan dan Supervisi KPPN Sanggau	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Sanggau	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
51	Juni	21-23 Juni	Perjalanan dinas luar kota dalam rangka Bimtek Keuangan Daerah	Pemda, KPPN, KPPN Sintang	Kab. Sintang, Kab Melawi, KPPN	Pelaksanaan Bimtek /Pembinaan Keuangan Pemda Kab Sintang dan Kab. Melawi. Kegiatan ini untuk pemenuhan target indikator kinerja utama yaitu Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan keuangan daerah.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
52	Juni	23 Juni	FGD Pemda	Bidang PAPP, Bagian Umum, Dit APK, PPKD, BLUD	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melaksanakan FGD terkait GFS	Dit APK	-
53	Juni	29 Juni	Focus Discussion Group	Kanwil, Pemda, BLUD	Kanwil Perbendaharaan	Kanwil lakukan inisiasi kegiatan FGD dimaksud dalam rangka pencapaian target IKU sesuai batas waktu kinerja . Melibatkan Kanwil, KPP, dan Pemda	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Pejabat Eselon II)	UIC
54	Juni	30 Juni	FGD Pemda	Bidang PAKP, Bagian Umum	-	Penyusunan laporan FGD terkait GFS	-	-
55	Juli	1-2 Juli	Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W	KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	Aula Kanwil DJPb Kalbar	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan	1 orang pejabat Eselon III Bagian Keuangan	Bagian Umum
56	Juli	5 Juli	Koordinasi LKPD	Bidang PAKP, Bagian Umum	Pemda Provinsi Kalbar dan Pemkot Pontianak	Melaksanakan pengumpulan LKPD tahun 2020 audited ke pemda Provinsi Kalbar dan Pemkot Pontianak	-	Bidang PAKP
57	Juli	7 Juli	Koordinasi LKPD	Bidang PAKP, Bagian Umum	Pemda Ketapang, Putussibau, Mempawah, Kubu Raya, dan Sintang	Melaksanakan pengumpulan LKPD tahun 2020 audited ke pemda Ketapang, Putussibau, Mempawah, Kubu Raya, dan Sintang	-	Bidang PAKP
58	Juli	7 Juli	Sosialisasi/Bimtek Penyusunan LK UAPPAW	Bidang PAKP, Bagian Umum, operator UAPPAW	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/bimtek penyusunan laporan keuangan UAPPAW	Dit APK	Bidang PAKP
59	Juli	12 Juli	Rekonsiliasi Outsanding Pinjaman	Kanwil dengan DPKAD Singkawang	Kanwil dengan DPKAD Singkawang	Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman Pemda Singkawang, per 30 Juni 2021. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Persentase Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman yang andal dan tepat waktu.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)
60	Juli	12 Juli	Kegiatan Kakanwil Menyapa triwulan III	Kepala Kanwil, Kepala Bagian/Bidang, dan KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan diskusi antara Kepala Kanwil dan para Kepala KPPN secara daring	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
61	Juli	13 Juli	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran	Satker mitra kerja terpilih sesuai hasil monitoring kinerja pelaksanaan anggaran	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Rakor dalam rangka mengidentifikasi permasalahan utama pelaksanaan anggaran tahun 2021	-	Bidang PPA I
62	Juli	14 Juli	Perjalanan Dinas dalam rangka Monev PNBPN	Satker pengelola PNBPN fungsional terpilih	Pontianak	Monev ke satker PNBPN terkait pembayaran/ penyetoran, penatausahaan, pelaporan PNBPN, dan memberi masukan potensi PNBPN	-	Bidang PPA I
63	Juli	15 Juli	Pemantauan Kode Etik	Bidang SKKI dan pihak yang diuji	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan pemantauan kode etik	-	Bidang SKKI (Seksi KI)
64	Juli	19 Juli	FGD Review Pelaksanaan Anggaran (RPA)	Satker terpilih	KPPN terpilih	Kegiatan untuk identifikasi permasalahan, rekomendasi kebijakan pelaksanaan anggaran, dan menilai kualitas pelaksanaan anggaran per semester	-	Bidang PPA I
65	Juli	21-23 Juli	Perjalanan dinas dalam rangka Bimtek/Sosialisasi Keuangan Daerah	Kanwil, OPD dan SKPD Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak	Pemda Provinsi, Kota Pontianak	Kegiatan Sosialisasi /Bimtek Keuangan Daerah kepada Pemda wilayah kerja kanwil DJPb Prov Kalbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemda telah sesuai ketentuan SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah). Sinergi dan koordinasi antara Kanwil serta Pemda	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
66	Juli	22-24 Juli	Perjalanan dinas Luar kota (Pemkot Singkawang dan Kab. Sambas).	Kanwil, KPPN dan BLUD	BLUD	Kegiatan monitoring dan asistensi Laporan Keuangan BLUD. Realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan kualitas pembinaan keuangan daerah.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)
67	Juli	26-27 Juli	Perjalanan dinas dalam kota (Pontianak)	Kanwil, KPPN dan BLUD	BLUD	Kegiatan monitoring dan asistensi Laporan Keuangan BLUD. Realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan kualitas pembinaan keuangan daerah.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)
68	Juli	26 Juli	FGD Hasil MONTIK semester I	Bidang SKKI dan peserta FGD	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan FGD atas hasil MONTIK secara daring	-	Seksi STA

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Pejabat Eselon II)	UIC
69	Juli	30 Juli	Evaluasi Kepatuhan Internal Tingkat KPPN	Seksi KI dan KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan evaluasi hasil laporan kepatuhan internal semester I	-	Seksi KI
70	Agustus	4 Agustus	Pembinaan SAP pada Pemda	Bidang PAPPK, Bagian Umum, PPKD	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melaksanakan sosialisasi SAP se Provinsi Kalbar	Dit APK	-
71	Agustus	7-9 Agustus	Monitoring TIK KPPN Pontianak	Seksi STA dan KPPN Pontianak	KPPN Pontianak	Melakukan kegiatan monitoring TIK secara on site	-	Seksi STA
72	Agustus	9-11 Agustus	Perjalanan dinas luar kota dalam rangka Monev Kredit Profram (KUR)/Umi/SIKP pada Pemda Putusibau.	Kanwil, KPPN, Pemda	Pemda Putusibau	Kegiatan Monev dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator kinerja Utama Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)
73	Agustus	10 Agustus	Rapat Koordinasi DFDD	Kanwil, KPPN, Pemda	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan rakor DFDD dalam rangka update informasi pengelolaan DFDD anggar Kanwil, KPPN, dan Pemda.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
74	Agustus	12 Agustus	FGD Pemda	Bidang PAPPK, Bagian Umum, Dit APK, PPKD, BLUD	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melaksanakan FGD terkait GFS	Dit APK	-
75	Agustus	12-13 Agustus	Monev ISO	Panitia Kanwil dan KPPN	Kanwil DJPb	Melakukan pembinaan dalam rangka implementasi ISO	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
76	Agustus	18 Agustus	Sosialisasi/Bimtek Penyusunan LK UAPPAW	Bidang PAPPK, Bagian Umum, operator UAPPAW	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/bimtek penyusunan laporan keuangan UAPPAW	Dit APK	-
77	Agustus	18 Agustus	Focus Discussion Group (Sosialisasi Keuangan Daerah)	Kanwil, KPPN, Pemda	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan FGD dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Frekuensi penyelenggaraan FGD dengaa Pemda	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
78	Agustus	20 Agustus	FGD Pemda	Bidang PAPPK, Bagian Umum	-	Penyusunan laporan FGD terkait GFS	-	-
79	Agustus	21 Agustus	FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)	Satker terpilih	Pontianak	Kegiatan ini untuk Identifikasi masalah spesifik pelaksanaan anggaran yang dihadapi K/L per triwulan	-	Bidang PPA I
80	Agustus	23-27 Agustus	Pembinaan dan Supervisi KPPN Sintang	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Sintang	KPPN Sintang	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on the spot	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
81	Agustus	23-27 Agustus	Perjalanan dinas dalam rangka Monev Pengelolaan Kas	KPPN dan satker terpilih	KPPN terpilih	Monev ke KPPN yang satkernya mempunyai kinerja Rencana Penarikan Dana rendah untuk mendalami kendala dan mencari solusi	-	Bidang PPA I
82	Agustus	23-27 Agustus	Perjalanan dinas dalam rangka Monev Pelaksanaan Anggaran	KPPN dan satker terpilih	KPPN terpilih	Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan EPA dalam rangka mengawal capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan capaian output strategis	-	Bidang PPA I
83	Agustus	27 Agustus	Sosialisasi/Bimtek Penyusunan LK UAPPAW	Bidang PAPPK, Bagian Umum	-	Pencetakan laporan sosialisasi dan Bimtek penyusunan LK UAPPAW	-	-
84	Agustus	30 Agustus	Monev Pengembangan Kompetensi KPA. PPK, dan PPSPM	Kanwil DJPb dan seluruh KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Monev Pengembangan Kompetensi untuk KPA, PPK, PPSPM dan BP	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Pejabat Eselon II)	UIC
85	Agustus	1-30 Agustus	Monitoring TIK 5 KPPN	Seksi STA dan 5 KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan monitoring TIK secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
86	September	5 September	Internalisasi dan sosialisasi kebijakan TIK	Seksi STA dan KPPN Pontianak	KPPN Pontianak	Sosialisasi kebijakan-kebijakan TIK	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
87	September	7 September	Seminar KFR Triwulan II tahun 2021	Kanwil, KPPN, Ekonom Regional, Pemda, BPS, BC, Pajak	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan seminar KFR dalam rangka pemenuhan frekuensi FGD dengan Pemda. Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara secara periodik tingkat regional disusun laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) tingkat kanwil dan diinformasikan kepada publik	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)
88	September	8 September	FGD dan rekonsiliasi data dengan BI	Bidang PAPP, Bagian Umum	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan BI terkait penyusunan GFS	-	-
89	September	6-8 September	Perjalanan dinas luar kota dalam rangka Monev Kredit Program (KUR)/UMI/SIKP pada	Kanwil, KPPN, Pemda	Pemkot Singkawang, Pemda Sambas	Kegiatan Monev dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator kinerja Utama Indeks ketepatan waktu penyusunan Profil Keuangan Daerah.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)
90	September	6-10 September	Pembinaan dan Supervisi KPPN Pontianak	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Pontianak	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
91	September	13-Sep-21	Pendampingan Penyusunan LK	Bidang PAPP, TMR, Bagian Umum, UAPPAW (petugas penyusun LK)	Kantor UAPPAW	Pendampingan penyusunan dan penyelesaian permasalahan LK UAPPAW dan BLU	-	-
92	September	20-22 September	Pelaksanaan pembinaan Keu Daerah semester II 2021 (Ketapang dan Kayong Utara)			Kegiatan monitoring dan asistensi Laporan Keuangan BLUD. Realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meujudkan kualitas pembinaan keuangan daerah.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
93	September	20-24 September	Pembinaan dan Supervisi KPPN Singkawang	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Singkawang	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
94	September	26-28 September	Perjalanan dinas dalam rangka asistensi laporan keuangan BLUD	Kanwil, Pemda, BLUD	Pemda, BLUD	Kegiatan monitoring dan asistensi Laporan Keuangan BLUD. Realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meujudkan kualitas pembinaan keuangan daerah.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)
95	September	29 September	Koordinasi penyusunan LK UAKBUN D KPPN	Bidang PAPP, Bagian Umum, KPPN (Seksi Vera	KPPN Terpilih	Rakor dgn 2 KPPN terpilih ttg persiapan penyusunan LK UAKBUN KPPN Triwulan 3 TA 2021 (offline)	-	-
96	Oktober	TBC	Pelantikan Pejabat Pengawas	Pejabat Pengawas yang Mutasi	Kota Pontianak	Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pembinaan PNS sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat yang memiliki tujuan sebagai salah satu usaha agar yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung jawab tidak hanya kepada atasannya tapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	Tidak Ada (mengikuti ketentuan dari Kantor Pusat)	Bagian Umum
97	Oktober	Selama Bulan Oktober	Penyelenggaraan HORI	Seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia dengan menyelenggarakan serangkaian acara untuk menyemarakkan HORI	-	Bagian Umum
98	Oktober	4-8 Oktober	Perjalanan dinas luar kota dalam rangka Monev Kredit Program (KUR)/UMI/SIKP) periode semester II tahun 2021	Kanwil, Pemda, Bank, Debitur	Kota Pontianak	Kegiatan Monev dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator kinerja Utama Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program.	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II C)

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Pejabat Eselon II)	UIC
99	Oktober	4-8 Oktober	Pembinaan dan Supervisi KPPN Ketapang	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Ketapang	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
100	Oktober	7-8 Oktober	Persiapan WBBM KPPN Sintang	Seksi KI dan KPPN Sintang	KPPN Sintang	Persiapan dalam rangka WBBM KPPN Sintang	-	Bidang SKKI (Seksi KI)
101	Oktober	6 Oktober	FGD dan rekonsiliasi data dengan BI	Bidang PAKP, Bagian Umum	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan BI terkait penyusunan GFS	-	-
102	Oktober	11 Oktober	Kegiatan Kakanwil Menyapa triwulan IV	Kepala Kanwil, Kepala Bagian/Bidang, dan KPPN	Kanwil DJPb	Kegiatan diskusi antara Kepala Kanwil dan para Kepala KPPN secara daring	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
103	Oktober	14-15 Oktober	Persiapan WBBM KPPN Putussibau	Seksi KI dan KPPN Putussibau	KPPN Putussibau	Persiapan dalam rangka WBBM KPPN Putussibau	-	Bidang SKKI (Seksi KI)
104	Oktober	18-22 Oktober	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Satker BLU	Satker BLU di Kalbar (4 satker)	Pontianak	Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	-	Bidang PPA I
105	Oktober	21-23 Oktober	Perjalanan Monev Dana Transfer dan dana Desa (Wilayah KPPN Sanggau)	KPPN Sanggau, Pemda (Sanggau dan Landak)	Sanggau	Kegiatan monitoring dan evaluasi DFDD dalam rangka pemenuhan capaian kinerja persentase ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi DFDD	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
106	Oktober	25 Oktober	Perjalanan Monev Dana Transfer dan dana Desa (dalam kota)	KPPN Pontianak, Pemkot Pontianak	Pontianak	Kegiatan monitoring dan evaluasi DFDD dalam rangka pemenuhan capaian kinerja persentase ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi DFDD	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
107	Oktober	25-29 Oktober	Pembinaan dan Supervisi KPPN Putussibau	Tim Pembina Kanwil dan KPPN Putussibau	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on the spot	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
108	Oktober	26 Oktober	Perjalanan Monev Dana Transfer dan dana Desa (dalam kota)	KPPN Pontianak, Pemkot Pontianak	Pontianak	Kegiatan monitoring dan evaluasi DFDD dalam rangka pemenuhan capaian kinerja persentase ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi DFDD	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
109	Oktober	27 Oktober	Focus Group Discussion	KPPN, Pemda Prov Kalbar, Pemkot Pontianak	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Rekapitulasi Informasi Profil Keuangan Daerah dan KFR. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan frekuensi penyelenggaraan FGD dengan Pemda	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II B)
110	Oktober	28-30 Oktober	Perjalanan Monev Dana Transfer dan dana Desa (Wilayah KPPN Singkawang)	KPPN Singkawang, Pemda Bengkayang	Bengkayang	Kegiatan monitoring dan evaluasi DFDD dalam rangka pemenuhan capaian kinerja persentase ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi DFDD	-	Bidang PPA II (Kasi PPA II A)
111	Oktober	1-31 Oktober	Monitoring TIK 5 KPPN	Seksi STA dan 5 KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan kegiatan monitoring TIK secara on desk	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
112	November	3 November	Pendampingan Penyusunan LK	Bidang PAKP, TMR, Bagian Umum, UAPPAW (petugas penyusun LK)	Kantor UAPPAW	Pendampingan penyusunan dan penyelesaian permasalahan LK UAPPAW dan BLU	-	-
113	November	8-12 November	Perjalanan dinas dalam rangka Survei SBM 2023	Penyedia barang/jasa obyek survey	Pontianak, Singkawang, dan Ketapang	Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer SBM terhadap 18 jenis harga-harga barang dan jasa di Kalbar dalam rangka penyusunan PMK tentang SBM	-	Bidang PPA I
114	November	15 November	Pembinaan UAKBUN D KPPN	Bidang PAKP, Bagian umum, KPPN (Seksi Vera)	KPPN Sintang, Putussibau, Ketapang, Singkawang, Sanggau	Pembinaan langsung ke KPPN sintang, Putussibau, ketapang, singkawang, sanggau	-	-

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Deskripsi Singkat Event dan Peserta	Pejabat Lingkup Kantor Pusat yang dilibatkan (Direktur Jenderal Perbendaharaan/Pejabat Eselon II)	UIC
115	November	15 November	Pembinaan UAKBUN D KPPN	Bidang PAPP, Bagian umum, KPPN (Seksi Vera)	KPPN Sintang, Putussibau, Ketapang, Singkawang, Sanggau	Pembinaan langsung ke KPPN sintang, Putussibau, ketapang, singkawang, sanggau	-	-
116	November	17 November	FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)	Satker terpilih	Pontianak	Kegiatan ini untuk Identifikasi masalah spesifik pelaksanaan anggaran yang dihadapi K/L per triwulan	-	Bidang PPA I
117	November	TBC	Penyerahan DIPA	Gubernur, Bupati/Walikota, perwakilan satker	Pontianak	Penyerahan DIPA Petikan dan TKDD TA 2022 oleh Gubernur Kalbar	-	Bidang PPA I
118	November	22 November	Koordinasi penyusunan LK UAKBUN D KPPN	Bidang PAPP, Bagian Umum, KPPN (Seksi Vera)	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Rakor dgn KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov Kalbar ttg Penyusunan LK UAKBUN KPPN Triwulan 3 TA 2021 (online)	-	-
119	November	29 November	Koordinasi penyusunan LK UAKBUN D KPPN	Bidang PAPP, Bagian Umum, KPPN (Seksi Vera)	KPPN Pontianak	Rakor dgn KPPN Pontianak ttg Penyusunan LK UAKBUN KPPN Triwulan 3 TA 2021 (online)	-	-
120	Desember	2-3 Desember	Rapat Koordinasi Kanwil	Kanwil DJPb dan seluruh KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Rapat koordinasi kanwil semester II 2021	-	Bidang SKKI dan Bagian Umum
121	Desember	6 Desember	Koordinasi Akhir Tahun dengan Unit Lain	Kanwil DJPb, DJP, DJBC, dan Bank/Pos	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Rapat koordinasi dengan unit kemenkeu lain dan bank/pos	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
122	Desember	10 Desember	Evaluasi Kepatuhan Internal Tingkat KPPN	Seksi KI dan KPPN	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Kegiatan evaluasi hasil laporan kepatuhan internal semester II	-	Bidang SKKI (Seksi KI)
123	Desember	13 Desember	Rapat Koordinasi Penerimaan Negara dengan Bank/Pos	Kanwil DJPb, KPPN Pontianak, dan Bank/Pos	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Rapat koordinasi penerimaan negara secara daring	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)
124	Desember	20 Desember	FGD Hasil MONTIK semester II	Bidang SKKI dan peserta FGD	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan FGD atas hasil MONTIK secara daring	-	Bidang SKKI (Seksi STA)
125	Desember	30-31 Desember	Monev Kepatuhan Bank/Pos Persepsi	Tim Monev dan Bank/Pos	Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Melakukan uji petik kepatuhan penerimaan negara secara daring	-	Bidang SKKI (Seksi SPB)

LAMPIRAN III

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2021



NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Barat
Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2021

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (25.00)								110.13
Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif								110.13
1a-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	94.00	99.44	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	105.79
1b-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	120.00
1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91.00	95.23	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	104.64
Customer (15.00)								101.62
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								101.62
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4.64	4.72	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	101.62
Internal Process (30.00)								108.12
Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel								100.00
3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	100.00
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan								107.25
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.50	96.36	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	110.12
4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8.50	9.49	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	111.65
4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.00
Pengelolaan kas yang optimal								120.00
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	82.00	100.00	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								107.75
6a-CP	Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	94.19	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	105.83
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90.00	99.32	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	110.35
Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu								105.59
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	101.94
7a-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79.00	86.29	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	109.23
Learning and Growth (30.00)								112.84
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi								112.12
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84.00	94.42	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	112.40
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83.00	89.15	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	107.41
8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78.00	90.94	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	116.59
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel								106.40
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95.50	97.54	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	102.14
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	82.00	88.79	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	108.28
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00	108.82	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	108.82
Sistem informasi dan teknologi yang andal								120.00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
10a - N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								109.06

NIP.

LAMPIRAN IV

RENCANA ANGGARAN SATKER

TAHUN 2021



**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
 SATUAN KERJA : (528057) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PROPINSI : (13) KALIMANTAN BARAT
 LOKASI : (51) KOTA PONTIANAK

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2021			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		258,315,000		258,315,000
01	Sasaran Program : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel Indikator Kinerja Program :				
01.01	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang-DJPb				
01.02	Nilai kinerja anggaran K/L-DJPb				
01.03	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN-DJPb				
	Kecukupan Kas Negara Indikator Output Program Indeks likuiditas kas negara Indeks opini BPK atas LKPP - DJPb Indikator Output Program Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman				
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		10,154,000		10,154,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01 4803.FAE	Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	1.00 Laporan	10,154,000		10,154,000
001	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	10,154,000		10,154,000
01	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah				
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara		40,000		40,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01 4804.FAE	Indeks pengendalian biaya atas SILPA Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	1.00 Laporan	40,000		40,000
002	Rekomendasi Outstanding Pinjaman <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	40,000		40,000
01	Rekomendasi Outstanding Pinjaman				
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		103,956,000		103,956,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01 6212.FAC	Indeks efektivitas komunikasi publik Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	1.00 Orang	10,956,000		10,956,000
002	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU <i>Indikator RO</i>	1.00 Kegiatan	10,956,000		10,956,000
01	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
 SATUAN KERJA : (528057) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PROPINSI : (13) KALIMANTAN BARAT
 LOKASI : (51) KOTA PONTIANAK

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2021			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	4.00 Laporan	5,356,000		5,356,000
002	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS) <i>Indikator RO</i>	2.00 Kegiatan	3,280,000		3,280,000
01	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)				
003	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN <i>Indikator RO</i>	2.00 Kegiatan	2,076,000		2,076,000
01	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN				
6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	6.00 Dokumen	87,644,000		87,644,000
001	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran <i>Indikator RO</i>	6.00 Kegiatan	87,644,000		87,644,000
01	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran				
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		105,810,000		105,810,000
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u>				
01	Rata-rata indeks kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L				
6213.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	22.00 Orang	120,000		120,000
001	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan <i>Indikator RO</i>	22.00 Pegawai	120,000		120,000
01	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan				
6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	2.00 Dokumen	105,690,000		105,690,000
001	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	19,588,000		19,588,000
01	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas				
003	Reviu Belanja Pemerintah <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	86,102,000		86,102,000
01	Reviu Belanja Pemerintah				
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara		100,000		100,000
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u>				
00	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat				
01	Indeks pengendalian biaya atas SILPA				
6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	1.00 Dokumen	100,000		100,000
001	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas <i>Indikator RO</i>	1.00 Dokumen	100,000		100,000

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
 SATUAN KERJA : (528057) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PROPINSI : (13) KALIMANTAN BARAT
 LOKASI : (51) KOTA PONTIANAK

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2021			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		35,455,000		35,455,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang				
02	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang				
6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK	2.00 Laporan	35,455,000		35,455,000
	<i>Indikator KRO</i>				
001	Government Financial Statistic (GFS)	1.00 Laporan	20,118,000		20,118,000
	<i>Indikator RO</i>				
003	Laporan Keuangan BUN	1.00 Laporan	15,337,000		15,337,000
	<i>Indikator RO</i>				
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		2,800,000		2,800,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas				
6216.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK	1.00 Laporan	2,800,000		2,800,000
	<i>Indikator KRO</i>				
002	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan	1.00 Rekomendasi	2,800,000		2,800,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
 SATUAN KERJA : (528057) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PROPINSI : (13) KALIMANTAN BARAT
 LOKASI : (51) KOTA PONTIANAK

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2021			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen		3,591,410,000		3,591,410,000
	Sasaran Program :				
01	Organisasi dan SDM yang Optimal				
	Indikator Kinerja Program :				
01.08	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan-DJPb				
01.09	Tingkat implementasi learning organization-DJPb				
	Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian				
	Indikator Output Program				
	Persentase Pemenuhan Standar Soft dan Hard Competency - DJPb				
02	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
	Indikator Kinerja Program :				
02.07	Tingkat downtime sistem TIK-DJPb				
02.08	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK-DJPb				
03	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah				
	Indikator Kinerja Program :				
03.05	Indeks integritas-DJPb				
	Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi				
	Indikator Output Program				
04	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal				
	Indikator Kinerja Program :				
04.03	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus-DJPb				
	Hasil Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission)				
	Indikator Output Program				
	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus-DJPb				
	Indikator Output Program				
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		2,881,951,000		2,881,951,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu				
4715.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK	1.00 Layanan	3,804,000		3,804,000
	<i>Indikator KRO</i>				
002	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00 Dokumen	3,804,000		3,804,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I				
4715.EAC	Layanan Umum [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK	2.00 Layanan	1,144,495,000		1,144,495,000
	<i>Indikator KRO</i>				

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
SATUAN KERJA : (528057) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROPINSI : (13) KALIMANTAN BARAT
LOKASI : (51) KOTA PONTIANAK

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2021			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran <i>Indikator RO</i>	1.00 Bulan Layanan	47,761,000		47,761,000
01	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran				
004	Operasionalisasi Kantor <i>Indikator RO</i>	1.00 Bulan Layanan	1,096,734,000		1,096,734,000
01	Operasionalisasi Kantor				
4715.EAD	Layanan Sarana Internal [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	9.00 unit	638,401,000		638,401,000
001	Kendaraan Bermotor <i>Indikator RO</i>	2.00 unit	267,000,000		267,000,000
002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin <i>Indikator RO</i>	1.00 unit	235,701,000		235,701,000
003	Peralatan Fasilitas Perkantoran <i>Indikator RO</i>	6.00 unit	135,700,000		135,700,000
4715.EAE	Layanan Prasarana Internal [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	10,090.00 unit	1,074,595,000		1,074,595,000
001	Gedung/Bangunan <i>Indikator RO</i>	610.00 m2	690,213,000		690,213,000
01	Gedung/Bangunan				
002	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan <i>Indikator RO</i>	9,480.00 m2	384,382,000		384,382,000
01	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
4715.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	2.00 Dokumen	20,656,000		20,656,000
002	Laporan Keuangan Unit Eselon I <i>Indikator RO</i>	1.00 Laporan	20,464,000		20,464,000
01	Laporan Keuangan Unit Eselon I				
003	Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Eselon I <i>Indikator RO</i>	1.00 Laporan	192,000		192,000
01	Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Eselon I				
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		43,000,000		43,000,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Indeks efektivitas komunikasi publik				
4718.BMB	Komunikasi Publik [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	1.00 layanan	43,000,000		43,000,000

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
 SATUAN KERJA : (528057) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PROPINSI : (13) KALIMANTAN BARAT
 LOKASI : (51) KOTA PONTIANAK

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2021			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	Pembinaan/Edukasi Publik <i>Indikator RO</i>	1.00 Kegiatan	43,000,000		43,000,000
01	Pembinaan/Edukasi Publik				
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM		665,987,000		665,987,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Persentase penyelesaian delayering				
4719.EAF	Layanan SDM [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	114.00 orang	592,138,000		592,138,000
001	Gaji dan Tunjangan <i>Indikator RO</i>	54.00 Pegawai	583,088,000		583,088,000
01	Gaji dan Tunjangan				
002	Administrasi Kepegawaian <i>Indikator RO</i>	1.00 Pegawai	3,700,000		3,700,000
01	Administrasi Kepegawaian				
004	Pengembangan SDM <i>Indikator RO</i>	59.00 Pegawai	5,350,000		5,350,000
01	Pengembangan SDM				
4719.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	3.00 Layanan	73,849,000		73,849,000
001	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	61,672,000		61,672,000
01	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi				
003	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan <i>Indikator RO</i>	1.00 ISO	4,485,000		4,485,000
01	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan				
004	Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM <i>Indikator RO</i>	1.00 Satker	7,692,000		7,692,000
01	Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM				
4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		472,000		472,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Indeks integritas				
4722.EAK	Layanan Pengawasan Internal [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK <i>Indikator KRO</i>	1.00 Laporan	472,000		472,000
003	Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	472,000		472,000
01	Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal				

Pontianak, 25 Januari 2022

IMIK EKO PUTRO
NIP 196905081989121001

LAMPIRAN V

MATRIKS CASCADING

TAHUN 2021



MATRIKS *CASCADING* IKU KEMENKEU-TWO-THREE-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik Peta : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat

Kemenkeu-Two				Kemenkeu-Three							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	PAPK	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	Direct	Average	Proxy; Moderate
		1b-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	PPA II	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	Direct	Average	Proxy; Moderate
		1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	91	PPA I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	91	Indirect		Proxy; Moderate
					PPA II	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Nilai kualitas laporan Kajian Fiskal Regional kanwil	91	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
2	Birokrasi dan layanan publik	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,64	Bagian Umum;	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,64	Indirect	Raw Data	Exact; Moderate

Kemenkeu-Two					Kemenkeu-Three						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
2	yang agile, efektif, dan efisien	2a-N	terhadap layanan kanwil DJPb	4,64	Bidang PPA I	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan Satker terhadap layanan Bidang PPA I	4,64	Indirect	Raw Data	Exact; Moderate
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	Bidang PPA I	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan secara tepat waktu	100%	Direct	-	Proxy; High;
4	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Bidang PPA I;	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate
					Bidang PPAK;	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate
					Bidang SKKI	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate

Kemenkeu-Two				Kemenkeu-Three							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
		4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5	Bidang SKKI	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5	Direct	Average	Proxy; Moderate
		4c-CP	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	Bidang SKKI	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate
5	Pengelolaan kas yang optimal	5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	Bidang PPA I	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%	Direct	Average	Exact; Moderate
		6a-CP	Nilai Kinerja pelaksanaan	80	Bidang PPA I	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan	Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran	80	Direct	Average	Proxy; Low

Kemenkeu-Two				Kemenkeu-Three							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	0a-Cr	anggaran K/L	89	Bidang PPA I	yang efektif dan efisien	pelaksanaan anggaran K/L	89	Direct	Average	Proxy, Low
		6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	Bidang PPA II	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	Direct	Average	Proxy; Moderate
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,10%	Bidang PAPP	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,10%	Direct	Average	Proxy; Moderate
		7a-N	Nilai kualitas laporan <i>Government Finance Statistic (GFS)</i> tingkat wilayah	79	Bidang PAPP	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Nilai kualitas laporan <i>Government Finance Statistic (GFS)</i> tingkat wilayah	79	Direct	Average	Proxy; Moderate

Kemenkeu-Two			Kemenkeu-Three							
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84	Bagian Umum	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84	Direct	Average	Proxy; Moderate
	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	Bidang SKKI	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	Direct	Average	Proxy; Moderate
				Bagian Umum;	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate

Kemenkeu-Two				Kemenkeu-Three							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78							
					Bidang PPA I;	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai Bidang PPA I	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate

Kemenkeu-Two			Kemenkeu-Three						
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
			Bidang PPA II;	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Bidang PPA II	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate
			Bidang PPAK;	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate

Kemenkeu-Two			Kemenkeu-Three							
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
				Bidang SKKI.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate
	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,50%	Bagian Umum		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,50%	Direct	Average	Proxy; Moderate

Kemenkeu-Two				Kemenkeu-Three							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	82	Bagian Umum	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Nilai kualitas LK tingkat UAPPAW dan UAPPB-W	82	Direct	Average	Proxy; Moderate
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	Bagian Umum		Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	Direct	Average	Proxy; Moderate
10	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	Bagian Umum	Sistem informasi dan teknologi yang andal	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-TWO-THREE-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik Peta : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Seksi PPA II A	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi PPA II B			82	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi PPA C			82	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate							

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Seksi PPA I A	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan secara tepat waktu	100%	Indirect	Raw Data	Proxy; High							
Kepala Seksi PPA I B			100%	Indirect	Raw Data	Proxy; High							
Kepala Seksi PPA I C			100%	Indirect	Raw Data	Proxy; High							
Kepala Seksi PPA I D			100%	Indirect	Raw Data	Proxy; High							
Kepala Seksi PPA I A	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi PPA I B			87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi PPA I C			87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi PPA I D			87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi PSAPP	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi PSAPD			87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi STA	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate							

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Seksi SPB	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5	Direct	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi STA	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi PPA I A	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%	Indirect	Raw Data	Exact; Moderate							
Kepala Seksi PPA I B			82%	Indirect	Raw Data	Exact; Moderate							
Kepala Seksi PPA I C			82%	Indirect	Raw Data	Exact; Moderate							
Kepala Seksi PPA I D			82%	Indirect	Raw Data	Exact; Moderate							
Kepala Seksi PPA I A	Pelaksanaan anggaran	Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada KPPN.... (Pontianak)	89	Indirect	Raw Data	Proxy; Low							
Kepala Seksi PPA I B		Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada KPPN.... (Sanggau dan Putussibau)	89	Indirect	Raw Data	Proxy; Low							

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Seksi PPA I C	yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada KPPN.... (Singkawang)	89	Indirect	Raw Data	Proxy; Low							
Kepala Seksi PPA I D		Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada KPPN.... (Ketapang dan Sintang)	89	Indirect	Raw Data	Proxy; Low							
Kepala Seksi ASPLK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79	Direct	Average	Proxy; Moderate							

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Subbagian Penilaian Kinerja	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	Direct	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Seksi KI	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	Direct	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Subbagian Kepegawaian	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Kepegawaian	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Untung Supranto dan Siwi	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Subbagian Keuangan		Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Keuangan	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Hendri dan Melly		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Subbagian TURT		Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag TURT	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Istiqamah, Luki, dan Farah		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Subbagian Penilaian Kinerja		Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag PK	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Dian		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi PPA I A	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I A	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Fransiskus Ivan	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi PPA I B		Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I B	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Irfan S		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi PPA I C		Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I C	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Mikwan		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi PPA I D		Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I D	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Atmawati dan Aulia Ines		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi PPA II A		Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II A	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate		Ema	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Seksi PPA II B	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II B	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Hasna	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi PPA II C	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II C	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Anwar H		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi PSAPP	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Harsono	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi PSAPD	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Dina		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi ASPLK	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Anugerah Gilang		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Seksi SPB	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi SPB	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Indra dan Ratungan	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi STA	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi STA	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Aisyah		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Seksi KI	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi KI	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Afina		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
Kepala Subbagian Keuangan	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,50%	Direct	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Subbagian TURT	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,50%	Direct	Average	Proxy; Moderate							

Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
Kepala Subbagian Keuangan	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Nilai kualitas LK tingkat UAPPAW dan UAPPB-W	82		Average	Proxy; Moderate							
Kepala Subbagian TURT	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Nilai kualitas LK tingkat UAPPAW dan UAPPB-W	82	Direct	Average	Proxy; Moderate							
Kepala Subbagian TURT	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	Direct	Average	Proxy; Moderate							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE-FOUR-FIVE KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Bagian Umum

Kemenkeu-Three					Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	1a-CP	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,64														
2	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2a-CP	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	Subbag PK	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83	Direct	Average	Proxy, Moderate							
3	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2b-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Bagian Umum	77	Subbag Kepegawaian	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Kepegawaian	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Untung Supranto dan Siwi	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; Moderate
					Subbag Keuangan		Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Keuangan	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Hendri dan Melly		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; Moderate
					Subbag TURT		Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag TURT	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Istiqamah, Luki, dan Farah		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; Moderate
					Subbag PK		Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag PK	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Dian		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; Moderate
4	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2c-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75														
5	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2d-N	Persentase akurasi data SDM pada HRIS	90%	Subbag Kepegawaian	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Persentase akurasi data SDM pada HRIS	90%	Direct	Average	Proxy, Moderate							
6	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2e-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90														
7	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	3a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%	Subbag Keuangan	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%	Direct	Average	Proxy, Moderate							
					Subbag TURT			95,5%	Direct	Average	Proxy, Moderate							
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	3b-CP	Nilai kualitas LK tingkat UAPPAW dan UAPPB-W	82	Subbag Keuangan	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Nilai kualitas LK tingkat UAPPAW	82		Average	Proxy, Moderate							
					Subbag TURT		Nilai kualitas LK tingkat UAPPB-W	82	Direct	Average	Proxy, Moderate							
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	3c-CP	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	Subbag TURT	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	Direct	Average	Proxy, Moderate							

Kemenkeu-Three				Kemenkeu-Four						Kemenkeu-Five								
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
10	Sistem informasi dan teknologi yang andal	4a-CP	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%														

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasubbag Kepegawaian

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1 Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Kepegawaian	78	Untung Supranto	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
				Siwi Mulia Handayani		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
	1b-N	Nilai kualitas Pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75							
	1c-C	Persentase akurasi data SDM pada HRIS	90%	Siwi Mulia Handayani	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Persentase akurasi data SDM pada HRIS	90%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
	1d-N	Indeks ketaatan pejabat/pegawai dalam pelaksanaan penilaian perilaku	3	Untung Supranto	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketaatan pejabat/pegawai dalam pelaksanaan penilaian perilaku	3,00	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
	1e-N	Persentase akurasi data aplikasi kepegawaian DJPb	100%	Siwi Mulia Handayani	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Persentase akurasi data aplikasi kepegawaian DJPb	100%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
	1f-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian permasalahan penilaian perilaku dan dialog kinerja individu	3	Untung Supranto	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketepatan waktu penyelesaian permasalahan penilaian perilaku dan dialog kinerja individu	3,00	Direct	Raw Data	Proxy; High
	1g-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan penetapan jabatan dan peringkat jabatan pelaksana	3,25							
	1g-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat/KGB/Pensiun pegawai	3,25	Siwi Mulia Handayani	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat/KGB/Pensiun pegawai	3,25	Direct	Average	Proxy; Moderate

Sub Manajer Kinerja Organisasi




Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasubbag Keuangan

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai subbag keuangan	78	Hendri Priyadi	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap <i>hard competency</i>	78	Indirect	Average	Proxy; High
					Melly Yustriana		Nilai penguasaan terhadap <i>hard competency</i>	78	Indirect	Average	Proxy; High
		1b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75							
2	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	2a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,50%							
		2b-N	Persentase penerbitan SPM secara akurat	100%	Melly Yustriana	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Persentase SPM yang diproses secara akurat	100%	Direct	Raw Data	Proxy; High
		2c-CP	Nilai kualitas LK tingkat UAPPPA-W dan UAPPB-W	82							
		2d-N	Indeks pembayaran gaji/TKPKN/uang makan/lembur/honorarium pegawai secara akurat dan tepat waktu	3	Melly Yustriana	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Indeks pembayaran gaji/TKPKN/uang makan/lembur/honorarium pegawai secara akurat dan tepat waktu	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		2e-N	Persentase input data pada Aplikasi SMART dan e-monev	100%	Hendri Priyadi	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Persentase input data pada Aplikasi SMART dan e-monev	100%	Indirect	Raw Data	Proxy; High
		2f-N	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPA	3	Hendri Priyadi	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPA	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		2g-N	Indeks Ketepatan Waktu Pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja	3	Hendri Priyadi	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPA	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate

Sub Manajer Kinerja Organisasi


Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS *CASCADING* IKU KEMENKEU-*FOUR-FIVE* KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai subbag TURT	78	Istiqamah	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap <i>hard competency</i>	78	Indirect	Average	Proxy; High
					Luki Ardana		Nilai penguasaan terhadap <i>hard competency</i>	78	Indirect	Average	Proxy; High
					Farah		Nilai penguasaan terhadap <i>hard competency</i>	78	Indirect	Average	Proxy; High
		1b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75							
2	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	2a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%							
		2b-N	Indeks penyusunan RKBMN secara benar dan tepat waktu	3	Farah	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks penyusunan RKBMN secara benar dan tepat waktu	3	Direct	Raw Data	Proxy; High
		2c-N	Indeks penyusunan konsolidasian RKBMN wilayah secara benar dan tepat waktu	3	Luki Ardana	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks penyusunan konsolidasian RKBMN wilayah secara benar dan tepat waktu	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		2d-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95%							
		2e-CP	Nilai kualitas LK tingkat UAPPAW dan UAPPB-W	82							
		2f-N	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPB	3	Farah	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dalam menyampaikan LK Tingkat UAKPB	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS *CASCADING* IKU KEMENKEU-*FOUR-FIVE* KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasubbag Penilaian Kinerja

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1 Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Subbag Penilaian Kinerja	78	Dian Cahyaningsih	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap <i>hard competency</i>	78	Indirect	Average	Proxy; High
	1b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75							
	1c-CP	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84							
	1d-N	Indeks penyelesaian cascading Kanwil secara tepat waktu	3	Dian Cahyaningsih	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks penyelesaian cascading Kanwil secara tepat waktu	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
	1e-N	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dan Bidang lingkup Kanwil dalam menyampaikan laporan capaian kinerja	3,25	Dian Cahyaningsih	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketaatan unit kerja KPPN dan Bidang lingkup Kanwil dalam menyampaikan laporan capaian kinerja	3,25	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
	1f-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian permasalahan pengelolaan kinerja organisasi	3	Dian Cahyaningsih	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketepatan waktu penyelesaian permasalahan pengelolaan kinerja organisasi	3	Direct	Raw Data	Proxy; High
	1g-N	Indeks ketaatan pejabat/pegawai dalam melakukan upload dokumen kinerja pada aplikasi fitur pengelolaan kinerja	3	Dian Cahyaningsih	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketaatan pejabat/pegawai dalam melakukan upload dokumen kinerja pada aplikasi fitur pengelolaan kinerja	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
	1h-N	Persentase laporan capaian kinerja Kemenkeu-Two Kanwil dan Kemenkeu-Three KPPN yang disampaikan secara tepat waktu	100%							
	1i-N	Indeks ketepatan waktu pelaporan analisis beban kerja	3	Dian Cahyaningsih	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketepatan waktu pelaporan analisa beban kerja	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie PPA I A

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	FX. Ivan Dwi Kurniawan	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; High
		1b-N	Indeks kualitas laporan Spending Review	3,5							
		1c-C	Indeks kualitas laporan monev PNB	3							
		1d-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan pembinaan BLU	3,5							
2	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	2a-CP	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan secara tepat waktu	100%							
3	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Seksi PPA I A	87,5							

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
4	Pengelolaan kas yang optimal	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%							
5	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	5a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada KPPN Pontianak	89							
6	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	6a	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I A	78	FX. Ivan Dwi Kurniawan	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
		6b	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie PPA I B

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Irfan Sudarmaji	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; High
		1b-N	Indeks kualitas laporan Spending Review	3,5							
		1c-C	Indeks kualitas laporan monev PNBPN	3							
		1d-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan pembinaan BLU	3,5							
2	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	2a-CP	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan secara tepat waktu	100%							
3	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Seksi PPAI B	87,5							
4	Pengelolaan kas yang optimal	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%							
5	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	5a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada KPPN Sanggau dan Putussibau	89							

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
6	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	6a	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I B	78	Irfan Sudarmaji	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
		6b	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie PPA I C

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Mikwan	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; High
					Zakaria		Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; High
		1b-N	Indeks kualitas laporan Spending Review	3,5							
		1c-C	Indeks kualitas laporan monev PNB	3							
		1d-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan pembinaan BLU	3,5							
2	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	2a-CP	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan secara tepat waktu	100%							
3	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Seksi PPAI C	87,5							
4	Pengelolaan kas yang optimal	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%							

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
5	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	5a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada KPPN Singkawang	89							
6	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	6a	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I C	78	Mikwan	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
					Zakaria		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
		6b	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie PPA I D

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Atmawati	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; High
					Aulia Ines		Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; High
		1b-N	Indeks kualitas laporan Spending Review	3,5							
		1c-C	Indeks kualitas laporan monev PNBPNBP	3							
		1d-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan pembinaan BLU	3,5							
2	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	2a-CP	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan secara tepat waktu	100%							
3	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Seksi PPAI D	87,5							
4	Pengelolaan kas yang optimal	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	82%							

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
5	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	5a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada KPPN Ketapang dan Sintang	89							
6	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	6a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA I D	78	Atmawati	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
				78	Aulia Ines		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
		6b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE-FOUR-FIVE KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kemenkeu-Three				Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five										
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU			
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	Seksi PPA II A	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
					Seksi PPA II B		Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
					Seksi PPA II C		Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
		1b-CP	Nilai kualitas laporan Kajian Fiskal Regional kanwil	91																	
2	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	2a-N	Frekuensi penyelenggaraan Forum Group Discussion bersama Pemda	4	Seksi PPA II A	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Frekuensi penyelenggaraan Forum Group Discussion bersama Pemda	4	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
					Seksi PPA II B		Frekuensi penyelenggaraan Forum Group Discussion bersama Pemda	4	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
					Seksi PPA II C		Frekuensi penyelenggaraan Forum Group Discussion bersama Pemda	4	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
		2b-N	Indeks kualitas pembinaan pelaksanaan anggaran daerah	3	Seksi PPA II A	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks kualitas pembinaan pelaksanaan anggaran daerah	3	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
					Seksi PPA II B		Indeks kualitas pembinaan pelaksanaan anggaran daerah	3	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
					Seksi PPA II C		Indeks kualitas pembinaan pelaksanaan anggaran daerah	3	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
		2c-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah	3,25	Seksi PPA II A	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks ketepatan waktu penyampaian profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
					Seksi PPA II B		Indeks ketepatan waktu penyampaian profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										
					Seksi PPA II C		Indeks ketepatan waktu penyampaian profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah	3,25	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate										

Kemenkeu-Three			Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five								
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
3	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	3a-N	Indeks kualitas laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tingkat Kanwil	3														
		3b-CP	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90														
4	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	4a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Bidang PPA II	78	Seksi PPA II A	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II A	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Ema	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
					Seksi PPA II B		Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II B	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Hasna		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
					Seksi PPA II C		Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II C	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Anwar H		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
		4b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75														
4c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90																

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie PPA II A

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82							
		1b-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional kanwil	3							
2	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	2a-C	Frekuensi penyelenggaraan Forum Group Discussion bersama Pemda	4							
		2b-C	Indeks pembinaan pelaksanaan anggaran daerah	3							
		2c-C	Indeks ketepatan waktu penyampaian profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah	3,25							
3	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3	Ema Ashari	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		3b-N	Persentase KPPN yang mengirimkan laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa tepat waktu	100%	Ema Ashari		Persentase KPPN yang mengirimkan laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa tepat waktu	100%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
	Organisasi dan SDM	4a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II A	78	Ema Ashari	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High

Matriks Cascading 2021 (version 1) (version 1)

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
4	yang optimal dan berkinerja tinggi	4b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							
		4c-N	Indeks ketepatan waktu pelaporan analisis beban kerja	3							

Sub Manajer Kinerja Organisasi

Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie PPA II B

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82							
		1b-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional kanwil	3							
2	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	2a-C	Frekuensi penyelenggaraan Forum Group Discussion bersama Pemda	4							
		2b-C	Indeks pembinaan pelaksanaan anggaran daerah	3							
		2c-C	Indeks ketepatan waktu penyampaian profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah	3,25							
3	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3	Hasna	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
					Benyamin		Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		3b-N	Persentase KPPN yang mengirimkan laporan pemantauan dan evaluasi	100%	Hasna	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Persentase KPPN yang mengirimkan laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa tepat waktu	100%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
		3b-N	penyaluran DAK dan Dana Desa tepat waktu	100%	Benyamin		Persentase KPPN yang mengirimkan laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa tepat waktu	100%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
4	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	4a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II A	78	Hasna	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
		4b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2020

Unit Pemilik IKU : Kasie PPA II B

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five										
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU				
1	Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	82											
		1b-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional kanwil	3											
2	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	2a-C	Frekuensi penyelenggaraan Forum Group Discussion bersama Pemda	4											
		2b-C	Indeks pembinaan pelaksanaan anggaran daerah	3											
		2c-C	Indeks ketepatan waktu penyampaian profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah	3,25											
3	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3	Anwar Heriyono	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate				
		3b-N	Persentase KPPN yang mengirimkan laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa tepat waktu	100%	Anwar Heriyono		Persentase KPPN yang mengirimkan laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa tepat waktu	100%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate				
4	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	4a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PPA II A	78	Anwar Heriyono	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High				
		4b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75											
		4c-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-Three Kanwil	3											

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

Kemenkeu-Three					Kemenkeu-Four						Kemenkeu-Five								
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
1	Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-CP	Nilai kualitas LK Kuasa BUN tingkat kanwil	94															
2	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	2a-N	Nilai rata-rata kualitas LK Kuasa BUN KPPN lingkup Kanwil	94	Seksi PSAPP	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Nilai rata-rata kualitas LK Kuasa BUN KPPN lingkup Kanwil	94	Direct	Average	Proxy; Moderate								
		2b-CP	Indeks efektivitas Edukasi dan Komunikasi	87,5	Seksi PSAPP	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas Edukasi dan Komunikasi	87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate								
Seksi PSAPD	87,5				Indirect			Average	Proxy; Moderate										
3	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%															
		3b-CP	Nilai laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79	Seksi ASPLK	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Nilai laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79	Direct	Average	Proxy; Moderate								
4	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	4a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Seksi PSAPP	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Harsono	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	
					Seksi PSAPD		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Dina		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	
					Seksi ASPLK		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Anugerah Gilang		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	
		4b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75															
		4c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90															

Suh Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie PSAPP

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Persentase response rate penyelesaian permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat	100%	Harsono	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Persentase response rate penyelesaian permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat	100%	Direct	Raw Data	Proxy; High
2	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	2a-N	Nilai rata-rata kualitas LK Kuasa BUN KPPN lingkup Kanwil	94							
		2b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5							
3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	3a-N	Indeks analisa laporan keuangan tingkat UAPPA-W	4	Harsono	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks analisa laporan keuangan tingkat UAPPA-W	4	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
4	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	4a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Harsono	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Indirect	Average	Proxy; High
		4b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto

NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie PSAPD

Kemenkeu-Four					Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Persentase response rate penyelesaian permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	100%	Dina	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Persentase response rate penyelesaian permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	100%	Direct	Raw Data	Proxy; High
2	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	2a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5							
3	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	3a-N	Persentase pengumpulan data APBD	88%	Dina	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase pengumpulan data APBD	88%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		3b-N	Indeks Telaah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3,5	Dina	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks Telaah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3,5	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
4	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	4a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Dina	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High
		4b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							
		4c-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Three Kanwil	3	Dina	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Three Kanwil	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2020

Unit Pemilik IKU : Kasie ASPLK

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Indeks penyusunan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil secara tepat waktu	3,5	Anugerah Gilang	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	Indeks ketepatan waktu penyusunan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil	3,5	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
2	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	2a-CP	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79							
		2b-N	Indeks monitoring kepatuhan rekonsiliasi tingkat UAKPA	98%							
3	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	3a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Anugerah Gilang	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Raw Data	Proxy; High
		3b-N	Nilai kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	75							
		3c-N	Indeks ketepatan waktu pelaporan Analisis Beban Kerja	3	Anugerah Gilang	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks ketepatan waktu pelaporan Analisis Beban Kerja	3	Direct	Raw Data	Activity; Moderate

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE-FOUR-FIVE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Interi

Kemenkeu-Three					Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
1	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5	Seksi SPB	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5	Direct	Average	Proxy; Moderate								
		1b-CP	Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI	100%	Seksi STA	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI	100%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate								
		1c-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Seksi STA	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	Indirect	Average	Proxy; Moderate								
2	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2a-CP	Nilai rata-rata hard competency	78	Seksi SPB	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency	78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Ratungan; Indra	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency	78	Indirect	Average	Proxy; High	
					Seksi STA			78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Aisyah			78	Indirect	Average	Proxy; High	
					Seksi KI			78	Indirect	Raw Data	Proxy; Moderate	Afina Razan			78	Indirect	Average	Proxy; High	
		2b-CP	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	Seksi KI	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	Direct	Average	Proxy; Moderate								
		2c-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75															
		2d-N	Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai	97%															
		2e-N	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	98%	Seksi SPB	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	98%	Direct	Average	Proxy; Moderate								

Kemenkeu-Three				Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
		2f-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90														
3	Sistem informasi dan teknologi yang andal	3a-CP	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	Seksi STA	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks penyusunan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal	3	Direct	Average	Proxy; Moderate							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie SPB

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
1	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,5							
		1b-N	Indeks ketepatan waktu penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	3,25	Indra Gunadi	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks ketepatan waktu penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	3,25	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		1c-C	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	98%							
		1d-N	Persentase rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu	100%	Indra Gunadi	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu	100%	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		1e-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan retur SP2D KPPN	3,25	Ratungan	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan retur SP2D KPPN	3	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
2	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	2a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi Supervisi Proses Bisnis	78	Indra Gunadi	Organisasi dan SDM yang optimal	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi Supervisi Proses Bisnis	78	Indirect	Average	Proxy; High
					Ratungan		Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi Supervisi Proses Bisnis	78	Indirect	Average	Proxy; High
		2b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75							
		2c-N	Persentase KPPN yang menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001	100%							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie STA

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
1	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	1a-N	Persentase penyusunan laporan monitoring infrastruktur TIK pada KPPN	100%	Aisyah	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Persentase penyusunan laporan monitoring infrastruktur TIK pada KPPN	100%	Direct	Raw Data	Proxy; High
		1b-CP	Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI	100%							
		1c-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5							
		1d-N	Indeks validitas data pengguna SPAN	3,5	Aisyah	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Indeks validitas data pengguna SPAN	3,5	Direct	Raw Data	Proxy; Moderate
		1e-N	Persentase Penyelesaian Layanan TIK	90%	Aisyah	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Persentase Penyelesaian Layanan TIK	90%	Direct	Raw Data	Proxy; High
2	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	2a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi Supervisi Teknis Aplikasi	78	Aisyah	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi Supervisi Teknis Aplikasi	78	Indirect	Average	Proxy; High
		2b-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75							
		2c-N	Indeks ketepatan waktu pelaporan analisis beban kerja	3							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-FOUR-FIVE KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2021

Unit Pemilik IKU : Kasie KI

Kemenkeu-Four				Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis	Nama IKU		Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1 Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	1a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi Kepatuhan Internal	78	Afina Razan	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Indirect	Raw Data	Proxy; High
	1b-CP	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83							
	1c-N	Indeks penyusunan laporan monitoring kode etik pegawai	3,25	Afina Razan	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Indeks penyusunan laporan monitoring kode etik pegawai	3,25	Direct	Raw Data	Proxy; High
	1d-N	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	75							
	1e-N	Persentase penyampaian laporan penerapan pemantauan pengendalian intern secara tepat waktu	100%	Afina Razan	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Persentase penyampaian laporan penerapan pemantauan pengendalian intern secara tepat waktu	100%	Direct	Raw Data	Proxy; High
	1f-N	Persentase LHP Itjen dan BPK yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100%							
	1g-N	Indeks penyusunan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal	3							
	1h-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Three Kanwil	3							

Sub Manajer Kinerja Organisasi



Guntur Supriyanto
NIP 198208092009011011

LAMPIRAN VI

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2021



LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit : Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
 Jabatan : Kepala Kantor
 Periode Laporan : s.d. Triwulan IV Tahun 2021

NO	KODE IKU	URAIAN IKU	Q1		Q2		Sem.1		Q3		s.d. Q3		Q4		Y-2021	
			Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1a-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	99.44	94	99.44
2	1b-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	-	-	82	100	82	100	-	-	82	100	82	100	82	100
3	1c-N	Rata-rata nilai kualitas output monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	-	-	91	95.70	91	95.70	-	-	91	96	91	94.75	91	95.23
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	-	-	4.64	4.715	4.64	4.715	-	-	4.64	4.715	-	-	4.64	4.72
5	3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	87.5	95.66	87.5	95.66	-	-	87.5	95.66	87.5	97.05	87.5	96.36
7	4b-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	-	-	8.5	9.56	8.5	9.56	-	-	8.5	9.56	8.5	9.42	8.5	9.49
8	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	13%	15%	40%	38.65%	40%	38.65%	70%	73.96%	70%	73.96%	100%	100%	100%	100%
9	5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	100%	82%	100%	82%	100%	82%	100%	82%	100%	82%	100%	82%	100%
10	6a-CP	Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	98	89	90.76	89	94.20	89	93.59	89	94.00	89	94.78	89	94.19
11	6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	99.81	90	99.35	90	99.58	90	99.17	90	99.44	90	98.94	90	99.32
12	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%	100%	98.1%	N/A	98.1%	100%	98.1%	100%	98.1%	100%	98.1%	100%	98.1%	100%
13	7b-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	86.29	79	86.29
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	94.42	84	94.42

NO	KODE IKU	URAIAN IKU	Q1		Q2		Sem.1		Q3		s.d. Q3		Q4		Y-2021	
			Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real	Targ	Real
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	89.15	83	89.15
16	8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	90.94	78	90.94
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95.5%	100%	95.5%	99.72%	95.5%	99.72%	95.5%	99.06%	95.5%	100%	95.5%	97.54%	95.5%	97.54%
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	88.79	82	88.79
19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	-	-	30%	48.68%	30%	48.68%	-	-	30%	48.68%	100%	108.82%	100%	108.82%
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	-	30%	55.56%	30%	55.56%	-	-	30%	55.56%	80%	100%	80%	100%

Mengetahui,
Atasan Langsung

Hadiyanto
NIP 196210101987031006

Pontianak, 17 Januari 2022
Plh. Kepala Kanwil


Pratanto

NIP 196909101997031001

**KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Jalan K.S. Tubun No. 36, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telp (0561) 733444. Fax (0561) 732029
<http://djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kalbar/id>**